

# Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik

Kabupaten Dompu 2013



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik ini dilaksanakan atas kerjasama AIPD-Australian Aid dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu

Pelaksana studi oleh Yayasan BaKTI Makassar dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan (P2KP) Universitas Mataram NTB, dengan susunan tim sebagai berikut:

**Quality Assurance Team (QAT)-Yayasan BaKTI Makassar:** Abdul Madjid Sallatu (team leader), Sultan Suhab (operation manager), Nursini (research manager), Agussalim (senior economist), Andi Tawakkal (PFM specialist), Andi Nixia Tenriawaru (sectoral specialist), Muhammad Ashry Sallatu (management officer), St. Asma, St. Marwah dan Adya Utami (finance and administration assistant)

**Local Expert:** Ahmad Zaini

**Tim Peneliti P2KP Universitas Mataram:** Mansur Afifi, Atikah, Jalaludin, Baiq Ismiwati, Anwar Fachry, Moh. Taqiuddin, Rahmi Sofiarini, Ketut Budastra, Heri Rahadi, Badri Maulana, Juaini Pratama, Junaidi Ibrahim, dan Cahyaning Haswari

**Design and Layout:** Syamsu Alam

**KAJIAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN PUBLIK**  
Kabupaten Dompu 2013

## Acknowledgement/ Disclaimer

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



### *Acknowledgement*

Laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini diterbitkan melalui kerjasama BaKTI dengan Pemerintah Australia melalui Program *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD).

### *Disclaimer*

Pandangan dan pendapat dalam laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini bersumber dari Yayasan BaKTI, dan tidak menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

# Kata Pengantar

## Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Universitas Mataram

Laporan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik Kabupaten Dompu (PERA-Dompu) merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dompu, Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Universitas Mataram (PPKP-UNRAM), Yayasan BAKTI Makassar dan *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD).

Laporan ini disusun oleh Tim Peneliti dari PPKP UNRAM yang dipimpin oleh Mansur Afifi dengan anggota tim peneliti terdiri dari : Anwar Fachry, Jalaluddin, Moh. Taqiuddin, Zainuri, Siti Atikah, Baiq Ismiwati. Proses pengeditan dan perbaikan laporan dilakukan secara seksama dan teliti oleh I Ketut Budastra selaku editor. Pengawasan atas pelaksanaan dan kualitas hasil penelitian dilakukan oleh Ahmad Zaini (PPKP UNRAM) berkoordinasi dengan Tim PERA Universitas Hasanuddin Makassar masing-masing : A. Madjid Sallatu, Agussalim, Sultan Sahab, Tawakkal, Nursini, Nixia A. Tenriawaru, Adya Utami. Dalam proses pengumpulan data di Kabupaten, Tim Peneliti juga dibantu oleh Badri H. Nursa'i selaku peneliti lapangan untuk wilayah Kabupaten Dompu. Penelitian ini juga dibantu oleh Cahyaning Haswari, Gunawan dan Hasibuan dari PPKP UNRAM sebagai pendukung dalam hal keuangan, administrasi dan logistik.

Pelaksanaan penelitian ini akan sulit terwujud tanpa dukungan kelembagaan yang sangat berharga dari Bapak Ir. Ruslan (Kepala Bappeda/Ketua PMC Kabupaten Dompu) bersama semua anggota PMC Kabupaten Dompu sehingga memudahkan Tim Peneliti dalam proses pengumpulan data dan informasi. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada AIPD Kabupaten Dompu beserta seluruh peserta yang berpartisipasi aktif memberikan masukan-masukan berharga dalam seluruh rangkaian pertemuan atau lokakarya terkait pelaksanaan penelitian ini.

Penghargaan yang tinggi juga diberikan kepada Caroline Tupamahu (Direktur Yayasan BAKTI Makassar) beserta Anja Kusuma dan Wahyudi dari AIPD NTB yang telah memberikan arahan dan dukungan berharga selama proses penelitian ini berlangsung.

Mataram, Januari 2014  
Ketua P2KP UNRAM



Dr. Ahmad Zaini, MA.

## Kata Pengantar Direktur Program AIPD

Pemerintah Australia mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia, terutama melalui *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD). Program AIPD bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pada tahun 2013, program AIPD bermitra dengan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) telah melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran publik dalam bentuk laporan *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) di 20 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan kajian PERA ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pembangunan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, laporan ini dilengkapi dengan beberapa rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan yang terdiri dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi yang sangat relevan sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Dompu. Kedepannya, rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan terutama di sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian dengan memperhatikan isu-isu strategis seperti kemiskinan, kesetaraan gender dan mitigasi bencana alam di Kabupaten Dompu.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kami kepada Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan (P2KP) Universitas Mataram dan peneliti senior dari Universitas Hasanuddin – Yayasan BaKTI Makassar yang telah bekerja keras untuk terwujudnya laporan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu yang berperan penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini.

Kami mengharapkan bahwa laporan kajian PERA ini dapat berkontribusi bagi Kabupaten Dompu dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah demi terwujudnya perbaikan layanan publik melalui kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Dompu.

Direktur Program



**Jessica Ludwig-Maarroof**

# Kata Sambutan Bupati Dompu

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr,Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terbitnya Laporan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik (*Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA*) Kabupaten Dompu, hasil kerjasama antara Yayasan BaKTI Makassar dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan (PPKP) Universitas Mataram dengan dukungan Australian Aid melalui program AIPD. Saya berharap kiranya laporan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Dompu dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Dompu memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri dan Religius” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Dompu telah merumuskan 5 (lima) misi pembangunan yakni:

1. Menumbuhkan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan pengembangan investasi dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha;
2. Mengembangkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, dan saling menghormati sesama;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
4. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kota yang indah, nyaman, dan mempersona serta lingkungan yang lestari;
5. Menegakkan supremasi hukum, menjalankan pemerintahan yang amanah, istiqomah, dan bebas dari KKN, serta memantapkan pelayanan publik.

Kemajuan atas capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir menjadi motivasi bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Dompu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Prestasi pembangunan daerah dimaksud setidaknya dapat dilihat dari nilai komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dompu berada diatas rata-rata IPM nasional.

Dalam hal kemampuan fiskal, Kabupaten Dompu masih tergolong salah satu kabupaten dengan kemampuan fiskal yang relatif rendah. Kondisi ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Dompu.

Dalam upaya mempercepat capaian pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah Dompu menitikberatkan pada upaya efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel guna percepatan pelaksanaan program-program strategis dan unggulan daerah.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian Pembangunan dan Kependudukan (PPKP) Universitas Mataram yang telah bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis, serta menyusun laporan ini, saya juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Dompu selaku Ketua *Program Management Committee* (PMC), beserta seluruh anggota PMC lainnya atas pelaksanaan tugasnya dengan baik. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan BaKTI Makassar dan Australian Aid melalui program AIPD (*Australia Indonesia Partnership for Decentralisation*) atas dukungan dan partisipasinya sehingga laporan ini bisa terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya bagi kita dalam upaya membangun masyarakat dan daerah Kabupaten Dompu yang mandiri dan religius.  
Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

**Bupati Dompu**  
  
**Drs. H. Bambang M. Yasin**

# Daftar Isi

	Halaman
Acknowledgement/ Disclaimer	ii
Kata Pengantar P2KP Unram	iii
Kata Pengantar Direktur Program AIPD	iv
Kata Sambutan Bupati Dompu	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Karakteristik Daerah	2
1.2. Kinerja Makro Ekonomi	2
1.3. Kinerja Pembangunan Sosial	6
<b>BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1. Umum	10
2.2. Analisis Perencanaan dan Penganggaran	11
2.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran	12
2.3.1. Manajemen Kas	12
2.3.2. Pengadaan Barang dan jasa	13
2.3.3. Manajemen Aset	13
2.3.4. Akuntansi dan Pelaporan	14
2.4. Analisis Oversight dan Akuntabilitas	14
2.4.1. Audit Internal	14
2.4.2. Audit eksternal	15
2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	15
<b>BAB III PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>17</b>
3.1. Gambaran Umum	18
3.2. Analisis Struktur Pendapatan Daerah	19
3.3. Analisis Alokasi dan Diskresi	22
3.4. Analisis Surplus/Defisit Anggaran dan Pembiayaan	24
3.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	25
<b>BAB IV BELANJA DAERAH</b>	<b>27</b>
4.1. Gambaran Umum	28
4.2. Belanja Klasifikasi Ekonomi	30
4.3. Belanja Sektoral	30
4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	31
<b>BAB V SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS</b>	<b>33</b>
5.1. Sektor Pendidikan	34
5.1.1. Indikator Output dan Outcome	34
5.1.2. Belanja Sektor Pendidikan	36
5.1.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	38
5.2. Sektor Kesehatan	39
5.2.1. Belanja Kesehatan	42
5.2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	43
5.3. Sektor Infrastruktur	44
5.3.1. Infrastruktur Dasar Perumahan	44
5.3.2. Infrastruktur Jalan	44
5.3.3. Belanja Infrastruktur Daerah	45
5.3.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	47

5.4. Sektor Pertanian	47
5.4.1. Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	47
5.4.2. Analisis Belanja Sektor Pertanian Daerah	49
5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	51
<b>BAB VI ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>53</b>
6.1. Kemiskinan	54
6.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	54
6.1.2. Penyebaran Penduduk Miskin	54
6.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	55
6.1.4. Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	56
6.1.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	57
6.2. Gender	57
6.2.1. Pembangunan Gender Secara Umum	57
6.2.2. Gender dan Buruh Migran	59
6.2.3. Analisis Belanja	60
6.2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	61
6.3. Mitigasi Bencana	62
Kesimpulan dan Rekomendasi	63
Daftar Pustaka	64
Lampiran	65
Lampiran Matriks A : Kesimpulan dan Rekomendasi 66	
Lampiran Matriks B: Master Tabel	69
Lampiran Matriks C: Catatan Metodologi PERA	72

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Dompu	2
Gambar 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dompu, NTB dan Nasional dalam Kurun Waktu 2006-2010	3
Gambar 1.3.	PDRB Per Kapita Kabupaten Dompu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	4
Gambar 1.4.	Laju Inflasi Kabupaten Dompu, NTB & Nasional periode th. 2007-2011	5
Gambar 1.5	Jumlah & Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dompu tahun 2006-2011 Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek, 2007-2011	6
Gambar 1.6.	TPAK dan TPT Kabupaten Dompu periode tahun 2007-2011	7
Gambar 1.7.	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Dompu pada Tahun 2007-2011	
Gambar 2.1.	Kinerja PKD Kabupaten Dompu	11
Gambar 3.1.	Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu 2007 – 2012	18
Gambar 3.2.	Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Dompu, 2007-2011	19
Gambar 3.3.	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu 2007-2012	19
Gambar 3.4.	Komposisi PAD Kabupaten Dompu Tahun 2007– 2012	<b>20</b>
Gambar 3.5.	Kapasitas Fiskal & Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Dompu, 2007-2011	22
Gambar 3.6.	Perkembangan Surplus/Defisit Kabupaten Dompu Tahun 2007-2012	22
Gambar 3.7.	Rasio DAU Terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Dompu, 2007-2011	23
Gambar 3.8.	Rasio PAD terhadap Belanja Langsung dan Belanja Modal Kabupaten Dompu,	24
Gambar 3.9.	Perkembangan Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Dompu Tahun 2007-2012	24
Gambar 4.1.	Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007 – 2012	28
Gambar 4.2.	Belanja Daerah per Kapita dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dompu, tahun 2007-2011	29
Gambar 4.3.	Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Dompu, 2007-2011	29
Gambar 4.4.	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007 – 2012	30
Gambar 5.1.	Rasio Murid Sekolah dan rasio Murid Guru Dompu, 2007 dan 2011	34
Gambar 5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) 2007 dan 2011	35
Gambar 5.3.	Angka Putus Sekolah (DO) 2007 dan 2011 dan rata-rata penurunannya	35
Gambar 5.4.	Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke atas	36
Gambar 5.5.	Rata-rata Lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas	36
Gambar 5.6.	Belanja sektor pendidikan dan proporsi terhadap Belanja total	37

Gambar 5.7.	Proporsi Belanja Langsung sektor pendidikan Dompu	37
Gambar 5.8.	Proporsi belanja sektor pendidikan menurut klasifikasi ekonomi, Dompu	38
Gambar 5.9.	Rasio fasilitas kesehatan & tenaga kesehatan per 10.000 penduduk	39
Gambar 5.10.	Proporsi Prporso perawatan antenatal (K1,K4)	40
Gambar 5.11.	Proporsi penolong persalinan oleh tenaga kesehatan	40
Gambar 5.12.	Persentase berat adan bayi lahir rendah	41
Gambar 5.13.	Angka harapan hidup, 2007-2011	41
Gambar 5.14.	Proporsi belanja Sektor kesehatan	42
Gambar 5.15.	Proporsi belanja langsung Kabupaten Dompu	42
Gambar 5.16.	Proporsi belanja sektor kesehatan menurut klasifikasi ekonomi Kabupaten Dompu	43
Gambar 5.17.	Proporsi Akses Rumah Tangga Terhadap Infrastruktur Dasar Perumahan di Kabupaten Dompu, 2007-2011	44
Gambar 5.18.	Kualitas jalan berdasarkan tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Dompu, 2007-2011 (Persen).	45
Gambar 5.19.	Proporsi Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011	45
Gambar 5.20.	Proporsi Belanja Sektor Infrastruktur Klasifikasi Langsung/Tidak Langsung Kabupaten Dompu, 2007-2011	46
Gambar 5.21.	Belanja Infrastruktur Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Dompu, 2007-2011 (persen)	46
Gambar 5.22.	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditas Unggulan Kabupaten Dompu 2007-2011	48
Gambar 5.23.	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jambu Mete di Kabupaten Dompu 2007-2011	49
Gambar 5.24.	Proporsi belanja sektor pertanian terhadap total belanja APBD Kabupaten Dompu	49
Gambar 5.25.	Proporsi Belanja Sektor Pertanian Kabupaten Dompu Menurut Klasifikasi Ekonomi, 2007-2011	50
Gambar 5.26.	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Sektor Pertanian Kabupaten Dompu, 2007-2011	50
Gambar 6.1.	Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dompu 2007-2011.	54
Gambar 6.2.	Sebaran Penduduk Miskin per kecamatan di Kabupaten Dompu	55
Gambar 6.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Dompu, tahun 2007-2010	55
Gambar 6.4.	Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dompu 2010 (%)	56
Gambar 6.5.	Perkembangan IPG di Kabupaten Dompu Tahun 2007-2011	58
Gambar 6.6.	Kesenjangan gender di Kabupaten Dompu Tahun 2007-2011	58
Gambar 6.7.	Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Dompu tahun 2007-2011	59
Gambar 6.8.	Belanja Daerah Untuk Urusan Buruh migran dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi di Kabupaten Dompu, Tahun 2007-2011	60
Gambar 6.9.	Belanja Langsung Untuk Urusan Buruh migran dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Dompu, tahun 2007-2011	61
Gambar 6.10.	Komposisi Realisasi Total Belanja pada Urusan Kesbangpolinmas menurut klasifikasi ekonomi, 2010-2011	63

## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Kabupaten Dompu 2007-2010	3
Tabel 1.2.	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Dompu Berdasarkan Harga Konstan tahun 2000	4
Tabel 1.3.	Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Dompu 2006-2011	5
Tabel 2.1.	Grade/Skor Menurut Bidang dan Kategori PKD di Kabupaten Dompu	10
Tabel 3.1.	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011 (Persen)	18
Tabel 3.2.	Penerimaan DBH Kabupaten Dompu, 2007 – 2011	20
Tabel 3.3.	PAD Kabupaten Dompu, 2007-2011	21
Tabel 3.4.	Alokasi DAK Menurut Sektor di Kabupaten Dompu, 2007 – 2012	23
Tabel 3.5.	Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011	25
Tabel 4.1.	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran Belanja Daerah 4 Kabupaten di Provinsi NTB, 2007-2011 (persen)	28
Tabel 4.2.	Belanja Daerah Menurut Sektor di Kabupaten Dompu, 2007-2011	31

## Daftar Singkatan

AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APM	Angka Partisipasi Murni
ARBD	Analisa Resiko Bencana Daerah
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPPKB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BPS	Biro Pusat Statistik
DAU	Dana Alokasi Umum
DIKPORA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
DPPKAD	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah
DPPKD	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah
GERDUBANGDES	Gerakan Terpadu Bangun Desa
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IHK	Indeks Harga Konsumen
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IRBI	Indeks Rawan Bencana Indonesia
JFA	Jabatan Fungsional Auditor
JFP2UPD	Jabatan Fungsi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah
K1	Kunjungan Antenatal Pertama
K4	Kunjungan Antenatal Keempat
KLU	Kabupaten Lombok Utara
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
NTB	Nusa Tenggara Barat
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Pamswakarsa	Pengamanan Swakarsa
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto

PEA	Public Expenditure Analysis
PERA	Public Expenditure and Revenue Analysis
PerKaDa	Peraturan Kepala Daerah
PFM	Public Finance Manajement
PKD	Pengelolaan Keuangan Daerah
PMA	Penanaman Modal Asing
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POSKEDES	Pos Kesehatan Desa
PPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rekon	Rencana Kontinjensi
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RMG	Rasio Murid Guru
RMS	Rasio Murid Sekolah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SIM	Sistim Informasi Manajemen
SIMBADA	Sistim Informasi Barang Daerah
SIPKD	Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	Standar Operasional dan Prosedur
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPK	Tingkat Penghunian Kamar
ULP	Unit Layanan Pengadaan
WDP	Wajar Dengan Pengecualian

# Ringkasan Eksekutif

## Pendahuluan

**Kabupaten Dompu adalah kabupaten yang berada di bagian tengah pulau Sumbawa.** Secara geografis sebagian wilayah Kabupaten Dompu merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah antara 15-40 persen. Ketinggian sebagian besar wilayah Kabupaten Dompu berkisar antara 100-1000 meter dari permukaan laut, dan hanya 7,65 persen wilayahnya berada di ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Namun demikian, Kabupaten Dompu memiliki potensi sumber daya pertanian yang relatif besar. Pemerintah daerah telah menetapkan bahwa pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas pembangunan daerah dengan komoditas unggulan daerah berupa sapi, jagung, dan rumput laut. Ketiga komoditas tersebut juga merupakan komoditas unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan program unggulan PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut).

**Perekonomian Kabupaten Dompu tumbuh positif dan berfluktuasi selama kurun waktu 2006-2010.** Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,29 persen lalu turun pada tahun 2010 menjadi 4,57 persen. Sektor primer dan sekunder mengalami pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor tersier. Kontribusi sektor primer, khususnya sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami penurunan yaitu dari 42,94 persen pada tahun 2006 menjadi 38,45 persen pada tahun 2010. Sementara itu, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor tersier seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa secara konsisten terus meningkat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB.

**Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dompu relatif baik dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.** Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007-2011 adalah sebesar 0,68 per tahun. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Dompu adalah sebesar 64,0 kemudian meningkat menjadi 66,70 pada tahun 2011. IPM Kabupaten Dompu adalah lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Namun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk relatif tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,39 persen per tahun. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi dengan kecenderungan semakin tinggi dalam kurun waktu 2007-2011. Rata-rata TPAK Kabupaten Dompu adalah sebesar 65,87 persen, sedangkan rata-rata TPT adalah sebesar 5,89 persen.

## Pengelolaan Keuangan Daerah

**Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori baik.** Dari tiga bidang PKD, dua bidang menunjukkan kinerja baik yakni bidang perencanaan dan penganggaran, dan bidang pelaksanaan anggaran. Sementara itu, untuk bidang Oversight dan Akuntabilitas masuk dalam kinerja sedang. Kinerja sedang pada bidang Oversight dan Akuntabilitas disebabkan oleh buruknya kinerja Audit dan Pengawasan Eksternal, dan Kerangka Peraturan Perundangan Daerah. Sementara itu, aspek yang lain seperti pengawasan internal, hutang, dan investasi publik masuk dalam kategori baik. Buruknya kinerja kedua aspek tersebut diatas menyebabkan laporan keuangan Kabupaten Dompu belum dapat keluar dari opini “disclaimer” dari BPK. Selama lima tahun terakhir, BPK menolak untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (disclaimer).

**Tugas yang berat dari pemerintah Kabupaten Dompu adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar dapat keluar dari predikat “disclaimer”.** Untuk itu Kabupaten Dompu perlu berupaya secara komprehensif memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah terutama pada aspek Audit dan Pengawasan Eksternal, dan Kerangka Peraturan Perundangan Daerah. Peningkatan kinerja pada audit dan bidang pengawasan eksternal dapat dilakukan dengan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, perbaikan kinerja sub-bidang Kerangka Peraturan dan Perundangan Daerah dapat dilakukan dengan melengkapi peraturan perundangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pendapatan daerah Dompu meningkat rata-rata sebesar 5 persen per tahun selama kurun waktu 2007 – 2011.** Realisasi pendapatan Kabupaten Dompu meningkat Rp 456 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 555 milyar pada tahun 2011. Pendapatan ini sebagian besar berasal dana perimbangan (rata-rata 85 persen), sementara lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar masing-masing 10 persen dan 5 persen. Besarnya kontribusi dana perimbangan menunjukkan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat.

**Belanja daerah Kabupaten Dompu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 persen dalam periode 2007-2012.** Pada tahun 2007 total belanja daerah pemerintah Kabupaten Dompu sebesar Rp 434 milyar meningkat menjadi Rp 529 milyar pada tahun 2011. Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

**Untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengusulkan revisi formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).** Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu intensifikasi penerimaan dari sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dan pembaharuan basis data potensi pajak dan retribusi daerah.

**Perhitungan besarnya alokasi DAU harus didasarkan kepada permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah seperti tingkat kemiskinan, status kesehatan masyarakat, lama sekolah, dan kondisi infrastruktur dasar.** Ini berarti dalam penentuan alokasi DAU tiga indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara terpisah. Dengan perhitungan seperti ini maka jumlah DAU yang akan dialokasikan kepada daerah dengan kondisi IPM dan infrastruktur dasar yang rendah akan meningkat secara signifikan.

**Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja daerah dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada belanja modal.** Besarnya alokasi belanja kepada belanja pegawai menunjukkan struktur belanja yang kurang mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kedepan, pemerintah daerah harus mengurangi secara bertahap proporsi belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal. Pengurangan belanja pegawai dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

## **Sektor-Sektor Strategis**

### **Sektor Pendidikan**

**Sektor pendidikan mendapat prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2011-2015 sehingga memperoleh anggaran yang relatif besar dan meningkat dari tahun ke tahun.** Namun demikian, kinerja pendidikan Kabupaten Dompu meskipun mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut berjalan relatif lamban sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah indikator output dan outcome. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya proporsi belanja langsung dan belanja modal terhadap belanja urusan pendidikan.

**Untuk mempercepat peningkatan kinerja sektor pendidikan maka perlu dievaluasi struktur belanja sektor pendidikan dengan memberikan perhatian pada peningkatan proporsi belanja modal.** Peningkatan belanja modal hendaknya diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

### **Sektor Kesehatan**

**Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan kinerja yang positif meskipun bergerak dengan relatif lamban.** Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan beberapa indikator kesehatan baik berupa indikator output (luaran) maupun indikator outcome (hasil) seperti **rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 penduduk, perawatan antenatal (K1 dan K4), persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan umur harapan hidup.**

**Lambannya perkembangan kinerja sektor kesehatan disebabkan antara lain oleh struktur belanja yang didominasi oleh belanja pegawai.** Proporsi belanja pegawai dalam lima tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 61,1 persen, sementara rata-rata proposi belanja modal hanya sebesar 24,6 persen. Demikian pula belanja program lebih didominasi oleh belanja yang terkait dengan kebutuhan institusi kesehatan seperti pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Pustu, program pelayanan administrasi perkantoran, dan program obat dan perbekalan kesehatan. Program upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak mendapat alokasi anggaran yang rendah.

## **Infrastruktur**

**Kinerja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007- 2011, secara umum relatif kurang baik.** Meskipun indeks aksesibilitas jalan dan mobilitas jalan di atas Standar Pelayanan Minimum, kualitas jalan yang ditunjukkan oleh tingkat kemantapan jalan masih di bawah 50 persen. Demikian juga dengan aksesibilitas RT terhadap infrastruktur dasar perumahan juga relatif rendah (sanitasi layak masih di bawah 50 persen) kecuali terhadap air minum layak.

**Belanja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu adalah rata-rata 9.52 persen dari total belanja daerah, dengan tren meningkat dalam periode 2007-2011.** Belanja infrastruktur naik dari Rp 37,40 miliar (8,62 persen) pada tahun 2007 menjadi Rp 63,80 miliar (12,06 persen) tahun 2011. Peningkatan belanja infrastruktur ini telah berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor infrastruktur di Kabupaten Dompu.

**Pembangunan sektor infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kabupaten Dompu ke depan.** Untuk meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas RT terhadap sanitasi layak yang masih relatif rendah, maka ke depan pemda Kabupaten Dompu diharapkan lebih serius berikhtiar meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas RT terhadap sanitasi layak dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih proporsional terhadap program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan sanitasi layak, atau merealokasi anggaran untuk program pembangunan jalan yang selama ini cukup besar ke program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan infrastruktur dasar perumahan yang terkait dengan sanitasi layak.

## **Pertanian**

**Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Dompu.** Dalam periode 2007-2010, sektor pertanian menjadi sumber pertumbuhan dan memberi kontribusi rata-rata 39 persen terhadap PDRB, dan 31 persen terhadap kesempatan kerja. Kinerja output (luaran) dan outcome (hasil) sektor pertanian untuk 4 komoditas unggulan (jagung, jambu mete, sapi dan rumput laut) secara umum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keberhasilan pencapaian ini terjadi karena dukungan teknis dan non teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu, Provinsi NTB (melalui program PIJAR dan Bumi Sejuta Sapi) dan dukungan pemerintah pusat.

**Meskipun sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB dan kesempatan kerja daerah, namun sektor ini mendapat proporsi belanja daerah (pada 4 SKPD terkait yaitu Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, dan Peternakan) relatif kecil.** Proporsi belanja daerah untuk keempat SKPD tersebut hanya sebesar 5,04 persen pada tahun 2007 kemudian menurun menjadi 3,03 persen pada tahun 2011. Oleh karena itu seharusnya sektor pertanian menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Kabupaten Dompu dan seharusnya mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Jika penambahan anggaran sektor pertanian belum memungkinkan maka perlu dilakukan re-alokasi sebagian anggaran belanja baik dari belanja modal maupun dari belanja program untuk mendukung program pengembangan *off-farm* seperti penanganan pasca panen, peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil.

## Isu-Isu Strategis

### Kemiskinan

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan daerah (kelembagaan, program dan kebijakan, dan anggaran) telah memberikan kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu sebesar 10,40 persen dari tahun 2007 hingga 2011 atau 2,60 persen per tahun. Tingkat kemiskinan Kabupaten Dompu selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan empat program unggulan berbasis pada optimalisasi komoditas dan potensi lokal.

Pemerintah daerah masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan pokok dalam percepatan penurunan angka kemiskinan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain lemahnya kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), belum fokusnya target sasaran (penerima dan wilayah) akibat belum dimanfaatkan data dasar kemiskinan terpadu yang sudah ada, dan jenis program lebih mengutamakan pembangunan fisik dan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Dompu perlu mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan fungsi dan peran TKPKD dan pemanfaatan data kemiskinan terpadu. Penguatan fungsi dan peran TKPKD melalui pemanfaatan data kemiskinan terpadu sebagai dasar perencanaan program SKPD agar lebih terfokus, pemantauan dan evaluasi efektifitas program SKPD dalam pencapaian target penurunan kemiskinan, dan koordinasi dan integrasi program kemiskinan dari berbagai pihak (Pihak Donor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta Inisiatif Perusahaan dan Organisasi Masyarakat Sipil).

### Gender dan Buruh Migran

Pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Dompu tergolong cukup memadai dibandingkan dengan kabupaten lain bahkan lebih tinggi dari rata-rata indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) provinsi NTB. Namun demikian, IPG Kabupaten Dompu secara konsisten lebih rendah daripada Indeks pembangunan manusia (IPM) sehingga membuktikan adanya kesenjangan gender.

Dalam periode 2007-2011 jumlah buruh migran Kabupaten Dompu cenderung menurun dan masih didominasi oleh perempuan (84 persen). Kecenderungan penurunan jumlah buruh migran dari Kabupaten Dompu pada periode 3 tahun terakhir kemungkinan terkait dengan banyaknya ditemukan permasalahan kekerasan terhadap buruh migran dan adanya kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Disamping memberikan keuntungan bagi daerah baik dari sisi tenaga kerja maupun remitansi, buruh migran juga membawa beberapa permasalahan yaitu kekerasan, pengasuhan anak, penyakit menular, dan trafficking. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman dan pelatihan kerja yang terbatas, program penyiapan dan fasilitasi pendukung buruh migran yang belum optimal dan perlindungan buruh migran yang masih kurang. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih kepada program-program yang mendukung penguatan kapasitas buruh migran dengan memberikan proporsi anggaran yang lebih besar. Selama ini pemerintah hanya mengalokasikan rata-rata sebesar 3 persen dari total APBD per tahun.

### Mitigasi Bencana

Kabupaten Dompu memiliki tingkat kerawanan tinggi (70) dari ancaman sejumlah bencana potensial baik bencana alam maupun non alam (konflik sosial). Penanggulangan bencana belum menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Dompu belum mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai dalam APBD untuk penanggulangan bencana. Anggaran untuk tanggap darurat memanfaatkan dana tidak terduga pada Sekretariat Daerah. Sementara, anggaran untuk kesiapsiagaan (pra bencana) serta rehabilitasi dan rekonstruksi (pasca bencana) sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Propinsi (APBD I) dan Pemerintah Pusat (APBN). Sementara itu, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

**Mengingat tingginya kerawanan daerah dari ancaman bencana, maka penanggulangan bencana harus menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD-Renstra SKPD).** Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas, fungsi, dan peran BPBD dalam menanggulangi bencana. Penguatan tersebut terkait dengan koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan bencana pada SKPD terkait dan penyiapan instrumen penanggulangan bencana. Instrumen penanggualangan bencana terdiri dari Analisa Risiko Bencana Daerah (ARBD), Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana (Perda PB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah (RAD), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Rencana Kontijensi (Renkon) bencana prioritas.

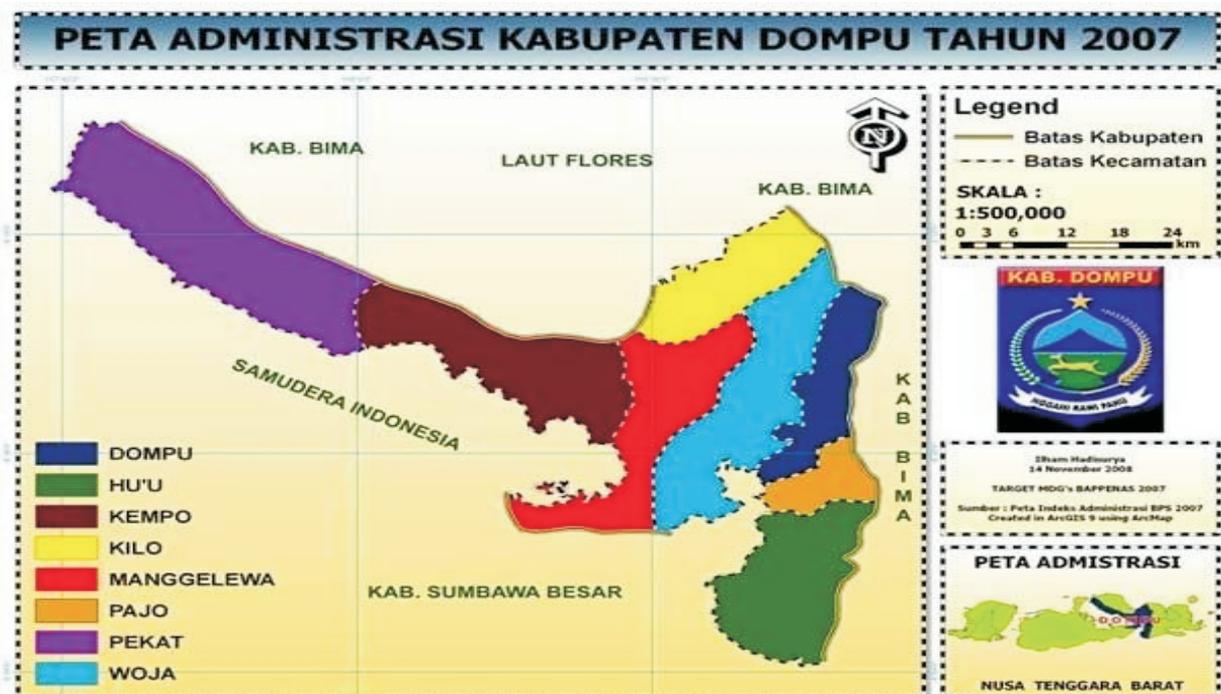
# Bab 1

## Pendahuluan

## 1.1. Karakteristik Daerah

Kabupaten Dompu adalah kabupaten yang berada di bagian tengah pulau Sumbawa. Secara administratif Kabupaten Dompu terbagi dalam delapan wilayah kecamatan dengan total wilayah seluas 2.321,55 km<sup>2</sup>. Kabupaten Dompu selain berbatasan dengan daratan yaitu Kabupaten Sumbawa di barat dan Kabupaten Bima di utara dan timur, juga berbatasan dengan perairan Teluk Saleh di barat dan Samudera Hindia di selatan. Secara geografis sebagian wilayah Kabupaten Dompu merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah antara 15-40 persen. Ketinggian sebagian besar wilayah Kabupaten Dompu berkisar antara 100-1000 meter dari permukaan laut, dan hanya 7,65 persen wilayahnya berada di ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Dompu



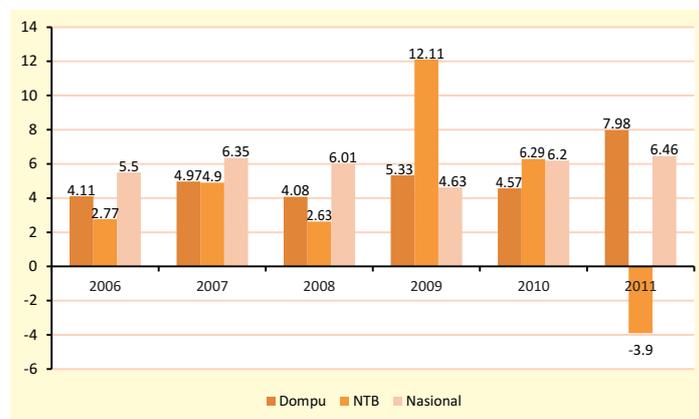
Kabupaten Dompu memiliki potensi sumber daya pertanian yang relatif besar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2014, pemerintah daerah telah menetapkan bahwa pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas pembangunan daerah. Komoditas yang menjadi program unggulan daerah adalah sapi, jagung, dan rumput laut. Hal ini sejalan program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadikan ketiga komoditas tersebut sebagai program unggulan yang dikenal dengan program unggulan PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas tata kelola (manajemen) dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

## 1.2. Kinerja Makro Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Dompu tumbuh positif dan berfluktuasi selama kurun waktu 2006-2011. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,98 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,08 persen. Dibandingkan dengan provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu lebih rendah hanya dalam kurun waktu 2009 dan 2010. Secara

umum selama kurun waktu lima tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu masih dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, Lombok Barat dan Bima kecuali pada dua tahun terakhir

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dompu, NTB dan Nasional dalam Kurun Waktu 2006-2011



Sumber: BPS (2007-2012).

**Pertumbuhan sektor primer dan sekunder di Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2007-2010 mengalami pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor tersier.** Bahkan pada tahun 2010, pertumbuhan sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,56 persen. Namun demikian, pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang relatif tinggi yaitu sebesar 8,31 persen. Sektor primer lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan tumbuh positif dengan kecenderungan berfluktuasi. Sektor tersier seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 11,22 persen per tahun. Selain itu, sektor tersier yang tumbuh dengan laju pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa-jasa rata, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Walaupun demikian, sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memegang peran yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Dompu.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dompu 2007-2011

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					Sumber Pertumbuhan				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	2,60	2,73	2,79	-0,56	8,31	1,12	1,15	1,16	-0,22	3,19
2. Pertambangan & Penggalian	6,74	4,75	5,56	8,21	6,39	0,16	0,11	0,13	0,19	0,16
3. Industri Pengolahan	5,27	3,25	7,34	5,38	3,07	0,22	0,13	0,30	0,22	0,13
4. Listrik, Gas & Air Bersih	6,84	3,60	5,84	6,58	5,09	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
5. Bangunan	6,08	6,75	7,36	8,63	9,98	0,40	0,45	0,50	0,60	0,72
6. Perdagangan, Hotel & Resto	5,45	4,91	7,50	6,59	7,29	0,99	0,89	1,38	1,24	1,39
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,30	5,79	4,83	7,30	6,05	0,28	0,37	0,31	0,47	0,40
8. Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan	16,83	6,27	8,54	11,30	13,18	1,04	0,43	0,60	0,81	1,01
9. Jasa-Jasa	5,83	4,05	7,09	9,23	6,86	0,76	0,53	0,93	1,23	0,96
PDRB	4,97	4,08	5,33	4,57	7,98	4,97	4,08	5,33	4,57	7,98

Sumber: dihitung dari PDRB Kabupaten Dompu.

**Struktur perekonomian Kabupaten Dompu mengalami pergeseran selama kurun waktu 2006-2011.** Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik regional bruto terus mengalami penurunan yaitu dari 42,94 persen pada tahun 2006 menjadi 38,77 persen pada tahun 2011. Sementara itu, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan kontribusi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor tersier seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa secara konsisten mengalami peningkatan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Kedua sektor terakhir memberikan sumbangan sebesar 21,62 persen terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2010.

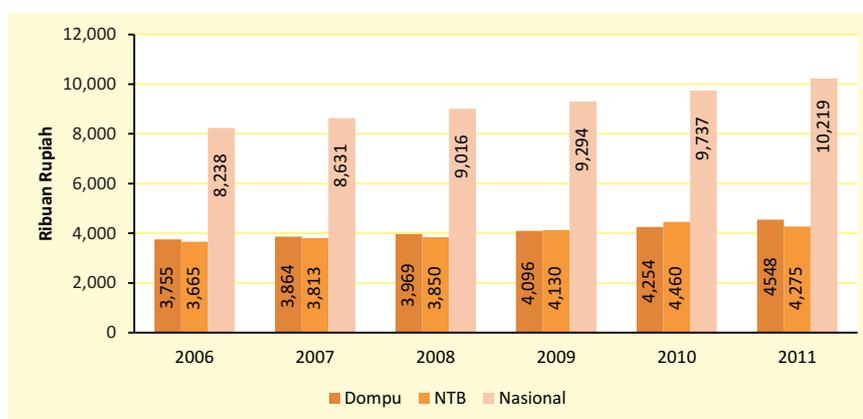
**Tabel 1.2. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Dompu Berdasarkan Harga Konstan tahun 2000**

Sektor Ekonomi	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (dalam persen)					
	2006	2007	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011
1. Pertanian	42,94	41,97	41,45	40,43	38,45	38,77
2. Pertambangan dan Penggalian	2,30	2,34	2,36	2,36	2,44	2,40
3. Industri Pengolahan	4,11	4,12	4,09	4,17	4,20	3,88
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36
5. Bangunan	6,54	6,61	6,78	6,91	7,18	7,49
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,15	18,23	18,37	18,75	19,12	18,99
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,43	6,38	6,49	6,46	6,63	6,49
8. Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan	6,15	6,85	6,99	7,21	7,67	8,35
9. Jasa -Jasa	13,03	13,13	13,13	13,35	13,95	13,26
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Dompu tahun 2007-2012,  
Keterangan: \*)Angka Sementara

**Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, PDRB per kapita (atas harga konstan tahun 2000) Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2006-2011 juga mengalami peningkatan yang positif.** Pada tahun 2006 PDRB per kapita Kabupaten Dompu adalah Rp 3.754.613 kemudian meningkat menjadi Rp 4.547.815 pada tahun 2011. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara rata-rata PDRB per kapita tumbuh secara positif pada tingkat 4,22 persen per tahun. Dibandingkan dengan provinsi NTB, PDRB per kapita Kabupaten Dompu lebih tinggi pada periode 2006-2008, tetapi kemudian menjadi lebih rendah pada dua tahun berikutnya akibat pertumbuhan ekonomi Dompu melambat dibandingkan dengan NTB. Namun demikian, pada tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Dompu lebih tinggi dari PDRB per kapita provinsi dan juga yang tertinggi diantara kabupaten lainnya dalam studi ini.

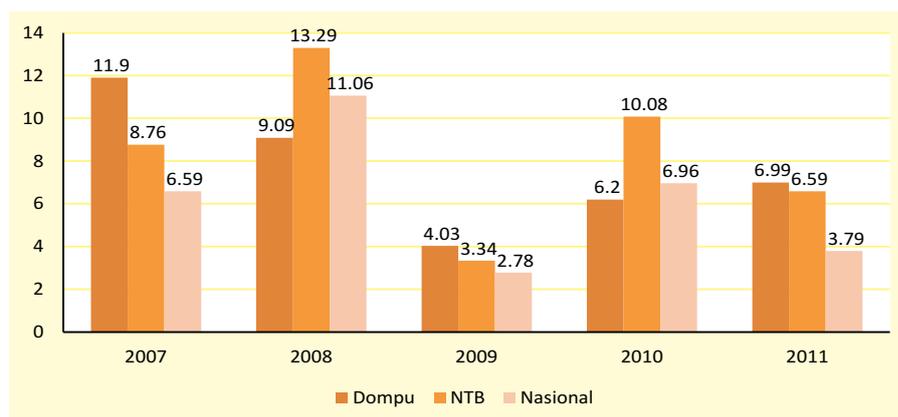
**Gambar 1.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Dompu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**



Sumber: BPS, 2007-2012.

**Laju inflasi di Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2007-2011 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun.** Pada tahun 2007 angka inflasi Kabupaten Dompu mencapai angka dua digit yaitu 11,90 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya 8,76 persen pada tahun yang sama. Namun demikian, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 laju inflasi dapat ditekan menjadi satu digit dan mengalami titik terendah pada tahun 2009 dengan laju inflasi sebesar 4,03 persen. Pada tahun 2011 laju inflasi di Kabupaten Dompu relatif sama dengan laju inflasi provinsi dan kabupaten lainnya yaitu berada pada kisaran 6 persen. Faktor penyumbang inflasi yang dominan pada tahun 2011 adalah kelompok perumahan, dan kelompok listrik, gas dan bahan bakar.

Gambar 1.4. Laju Inflasi Kabupaten Dompu, NTB dan Nasional Periode Tahun .2007-2011



Sumber: BPS, 2012.

**Realisasi investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2006-2011 relatif kecil.** Realisasi PMDN hanya terjadi pada tahun 2006 dan 2011 dengan kecenderungan meningkat yaitu dari Rp 47.951,29 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 52.013,73 juta pada tahun 2011. Dibandingkan dengan kabupaten lain, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Dompu selama kurun waktu yang sama adalah yang paling rendah kecuali pada tahun 2011. Realisasi investasi PMDN di Kabupaten Dompu pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PMDN di kabupaten Bima. Bidang usaha yang dikembangkan melalui PMDN di Kabupaten Dompu adalah perkebunan tebu terpadu dengan industri gula, peternakan, tambak udang, pariwisata, dan pertambangan mangaan dan mineral, perkebunan jambu mete, dan industri kayu.

Tabel 1.3. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Dompu 2006-2011

Tahun	PMDN (dalam Rupiah)	PMA (dalam USD)
2006	47.951,29	-
2007	-	-
2008	-	-
2009	-	-
2010	-	-
2011	52.013,73	2.333.000

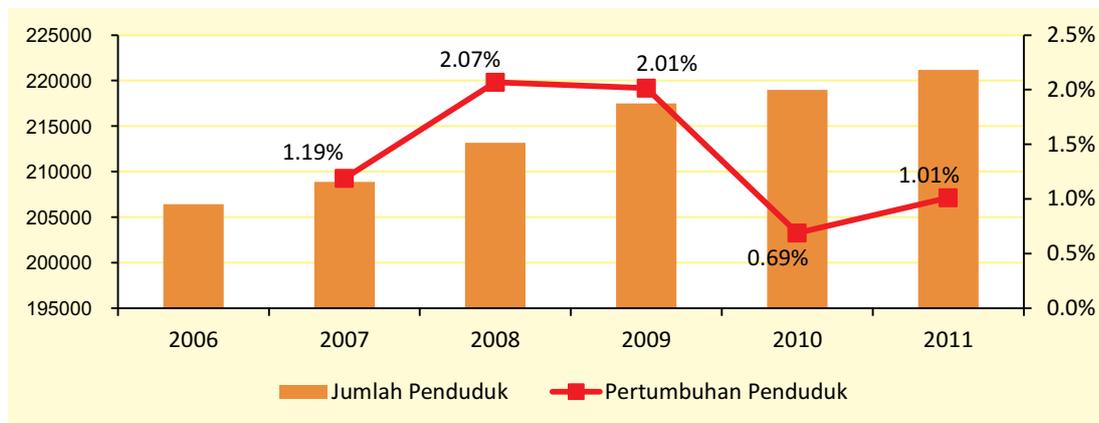
Sumber: BKPM NTB 2012.

**Seperti investasi PMDN, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Dompu juga relatif rendah.** Selama kurun waktu enam tahun terakhir, realisasi PMA hanya terjadi pada tahun 2011 dengan nilai investasi sebesar USD 2.333.000. Bidang usaha yang dikembangkan dengan investasi tersebut adalah jasa penunjang pertambangan umum, industri perikanan, *cottage*, dan *ship service*. Dibandingkan dengan kabupaten lain, nilai PMA ini hanya sedikit lebih besar dari nilai realisasi PMA di Kabupaten Bima pada tahun yang sama, sementara kabupaten lainnya berada di atasnya. Namun secara kumulatif, realisasi investasi PMA di Kabupaten Dompu pada kurun waktu 2006-2011 adalah yang terendah. Ini menunjukkan bahwa minat investor asing menanamkan modalnya di Kabupaten Dompu relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

### 1.3. Kinerja Pembangunan Sosial

**Jumlah penduduk Kabupaten Dompu bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang positif.** Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2006-2011 adalah rata-rata sebesar 1,39 persen per tahun. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Dompu adalah 206.414 jiwa, kemudian tumbuh menjadi 221.184 jiwa pada tahun 2011. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, jumlah penduduk di Kabupaten Dompu adalah yang terendah setelah kabupaten Lombok Utara dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 sebesar 95,2 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara itu, pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun di Kabupaten Dompu adalah yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Bima. Adapun pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun terendah adalah di Kabupaten Lombok Utara dengan laju pertumbuhan sebesar -1,67 persen.

Gambar 1.5. Jumlah & Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dompu tahun 2006-2011

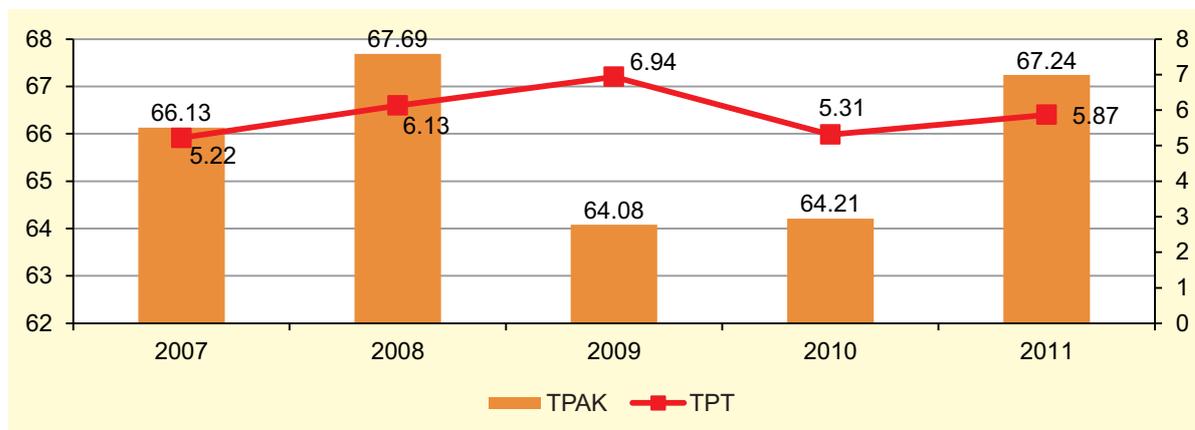


Sumber: BPS, 2007-2012.

**Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Dompu berfluktuasi dengan kecenderungan semakin tinggi pada kurun waktu 2007-2011.** Pada tahun 2007 TPAK Kabupaten Dompu adalah sebesar 66,13 persen menurun menjadi 64,08 persen pada tahun 2009 dan kemudian meningkat menjadi 67,24 persen pada tahun 2011. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum TPAK di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan dalam waktu lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan kabupaten lain dan rata-rata provinsi, TPAK Kabupaten Dompu relatif tidak jauh berbeda kecuali pada tahun 2009. TPAK Kabupaten Dompu pada tahun 2009 adalah yang tertinggi diantara kabupaten lainnya yaitu sebesar 64,08 persen tetapi lebih kecil dari TPAK provinsi sebesar 68,66 persen. Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar partisipasi penduduk usia produktif di pasar pasar kerja.

**Dalam kurun waktu 2007-2011 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dompu berfluktuasi.** Angka TPT di Kabupaten Dompu berkisar antara 5,22 persen hingga 6,94 persen dimana angka TPT tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2007. Pada tahun 2009 TPT Kabupaten Dompu adalah yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan rata-rata provinsi. Angka TPT tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan TPT rata-rata nasional. Angka TPT terendah sebesar 5,22 persen masih dianggap wajar karena masih lebih tinggi dari TPT alamiah sebesar 4 persen. Namun demikian, rendahnya angka TPT dipengaruhi oleh metode pengukuran pengangguran terbuka dengan menggunakan jam kerja yang sangat rendah. Seseorang dianggap tidak menganggur adalah apabila selama satu minggu terakhir yang bersangkutan pernah bekerja sekurang-kurangnya 1 jam dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

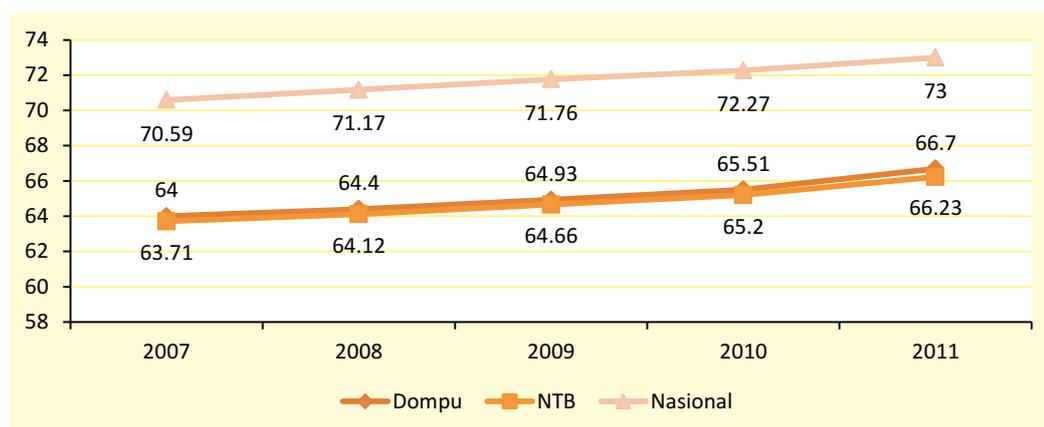
Gambar 1.6. TPAK dan TPT Kabupaten Dompu periode tahun 2007-2011



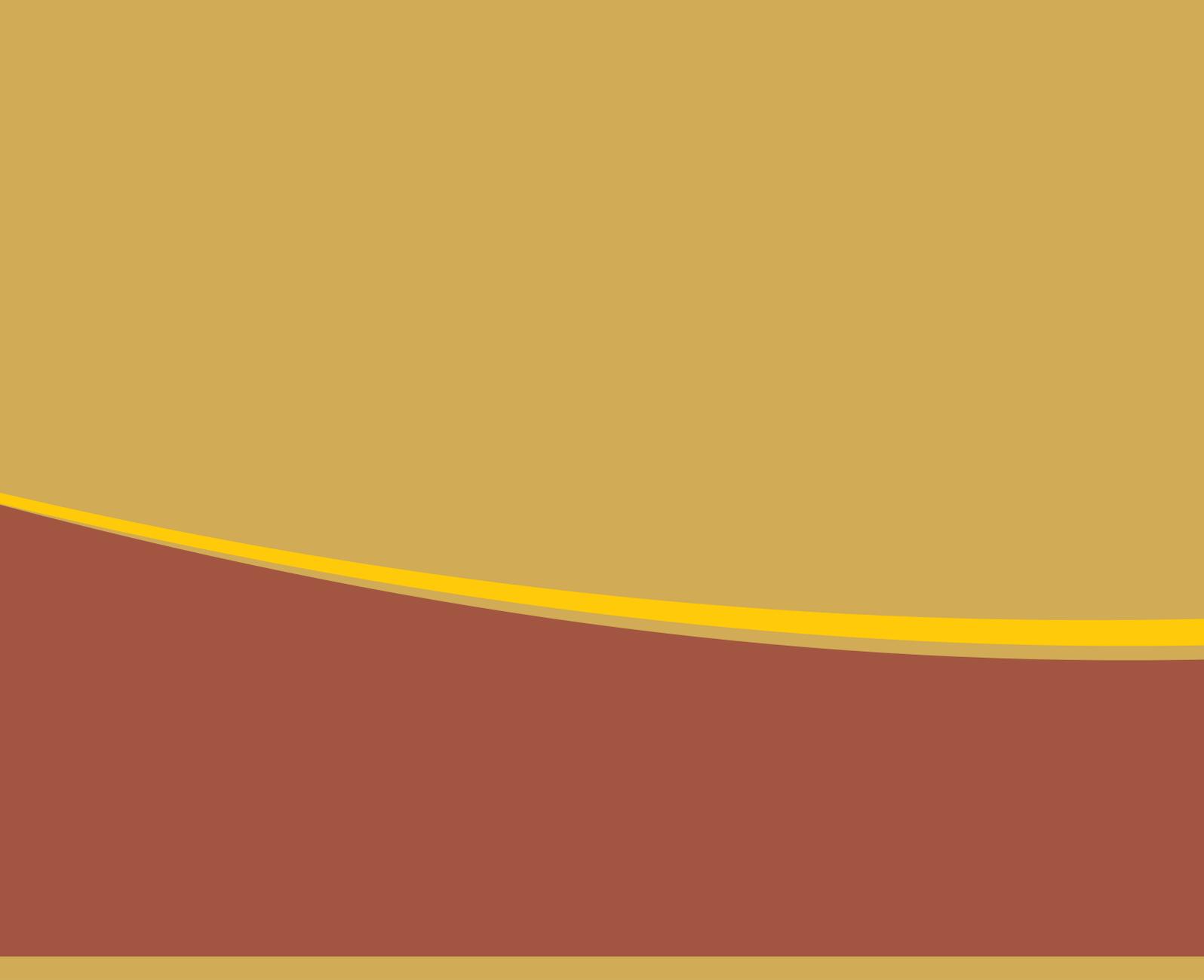
Sumber: BPS, 2007- 2012.

**Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir.** Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007-2011 adalah sebesar 0,68 per tahun. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Dompu adalah sebesar 64,0 kemudian meningkat menjadi 66,70 pada tahun 2011. IPM Kabupaten Dompu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi yaitu 66,23 pada tahun 2011. Namun demikian, angka IPM Kabupaten Dompu masih lebih rendah dari angka IPM rata-rata nasional 73,00 pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dompu lebih baik dari kabupaten lainnya di Provinsi NTB. Perkembangan angka IPM Kabupaten Dompu tidak lebih baik dari kabupaten lainnya kecuali kabupaten Bima. Peningkatan IPM Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara masih lebih tinggi dari Kabupaten Dompu yaitu 0,8 untuk Kabupaten Lombok Barat dan 1,05 untuk Kabupaten Lombok Utara. Peningkatan angka IPM memerlukan upaya yang semakin besar ketika angka IPM sudah berada pada tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi angka IPM maka semakin sulit untuk meningkatkannya.

Gambar 1.7. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Dompu pada Tahun 2007-2011



Sumber: BPS, 2012.



# Bab 2

## Pengelolaan Keuangan Daerah

## 2.1. Umum

**Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) atau *Public Finance Management (PFM)* merupakan kegiatan diagnostik dengan mengumpulkan informasi mengenai kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.** Tujuan analisis adalah untuk memperoleh gambaran sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi yang dikumpulkan menyangkut 9 bidang strategis dengan 25 *outcome* dan 160 indikator untuk memberi nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kesembilan bidang strategis tersebut adalah: Kerangka Peraturan Perundangan Daerah; Perencanaan dan Penganggaran; Pengelolaan kas; Pengadaan Barang dan Jasa; Akuntansi dan Pelaporan; Pengawasan Internal; Hutang dan Investasi Publik; Pengelolaan Aset; dan Pengawasan Eksternal. Untuk penyederhanaan, bidang-bidang strategis tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; dan *Oversight* dan Akuntabilitas.

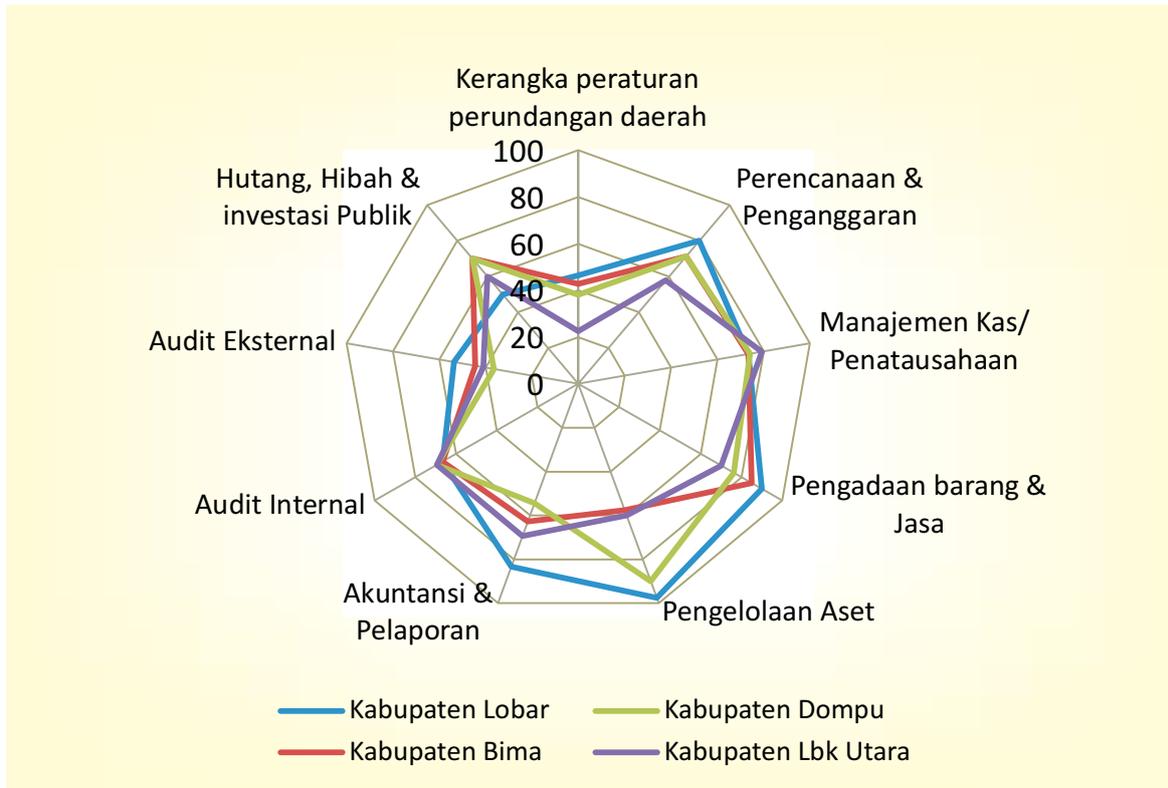
**Secara umum, kinerja PKD Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori baik, urutan ketiga dari 4 kabupaten yang disurvei di Provinsi NTB.** Kinerja masing-masing bidang PKD dinilai bervariasi. Kinerja baik ditunjukkan oleh bidang-bidang: Pengelolaan Aset; Perencanaan dan Penganggaran; Manajemen Kas; Pengadaan Barang dan Jasa; Audit Internal; dan Hutang, Hibah dan Investasi Publik. Kinerja sedang diperoleh oleh bidang Akuntansi dan pelaporan. Kinerja buruk terjadi pada bidang Audit eksternal dan Kerangka Peraturan dan Perundangan Daerah. Kabupaten Dompu memiliki kinerja ketiga diantara 4 kabupaten yang dianalisis di Provinsi NTB.

Tabel 2.1. Grade/Skor Menurut Bidang dan Kategori PKD di Kabupaten Dompu

BIDANG	SKOR	GRADE (%)	KATEGORI
I. Perencanaan dan Penganggaran	11,4	71,25	Baik
II. Pelaksanaan Anggaran	58,25	69,35	Baik
Pengelolaan Kas	20,25	67,5	Baik
Pengadaan Barang dan Jasa	12,2	76,25	Baik
Pengelolaan Aset	16	80	Baik
Akuntansi dan Pelaporan	9,8	54,44	Sedang
III. Oversight dan Akuntabilitas	16,5	56,9	Sedang
Pengawasan Internal	12,5	69,44	Baik
Audit dan Pengawasan Eksternal	4	36,36	Buruk
Hutang dan Investasi Publik	7	70	Baik
Kerangka Peraturan Perundangan Daerah	8	38,09	Buruk
Total statemen	101,15	63,22	Baik

Sumber: Hasil Survei PKD 2012

**Gambar 2.1. Kinerja PKD Kabupaten Dompu**



Sumber: Hasil survei Pengelolaan Keuangan Daerah

## 2.2 Analisis Perencanaan dan Penganggaran

**Perencanaan dan penganggaran Kabupaten Dompu berkinerja baik, namun perbedaan antara APDB murni dan APBD perubahan berada di atas ketentuan perundang-undangan.** Kegiatan bidang perencanaan dan penganggaran umumnya telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. PKD Kabupaten Dompu berkinerja sangat baik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran multi tahun; berkinerja baik dalam sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif; dan berkinerja sedang dalam penentuan target anggaran yang layak dan proses penyusunan yang realistis. Peningkatan kinerja bidang perencanaan dan penganggaran masih dimungkinkan dengan perbaikan penentuan target anggaran agar perbedaan antara APDB murni dan APBD perubahan bisa berada di dalam batas ketentuan. Pada tahun 2011, perbedaan antara APBD murni dan APBD-P untuk kelompok belanja langsung sebesar 37,61 persen, jauh di atas ketentuan maksimal 10 persen.

**Perencanaan partisipatif di Kabupaten Dompu telah berjalan dengan baik dan mengikuti ketentuan.** Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dapat disimpulkan bahwa RKPD dibuat dengan selalu memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Penyusunan rencana ataupun evaluasi di dilakukan dengan melihat sekala prioritas program sesuai dokumen RPJMD, Renstra dan Renja masing-masing SKPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

**Dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD 2010 – 2014) dengan indikator kinerja terukur secara kuantitatif tersedia bagi penyelenggaraan PKD Kabupaten Dompu.** RPJMD Kabupaten Dompu mengintegrasikan indikator capaian SPM dalam program sektor-sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Dokumen perencanaan yang ada, termasuk renstra dan renja SKPD dilengkapi dengan pagu indikatif dan indikator terukur, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

**Perbedaan antara target dan realisasi APBD Kabupaten Dompu masih dalam batas yang diperbolehkan, dalam tiga tahun terakhir.** Dalam periode ini, perbedaan antara target dan realisasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Dompu rata-rata 7,65 persen sementara perbedaan antara target dan realisasi pendapatan rata-rata 0,49 persen. Perbedaan antara target dan realisasi APBD tersebut masih dibawah batas maksimal yang diperbolehkan, 10 persen. Selisih realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Dompu juga masih berada dalam batas yang diperbolehkan, rata-rata surplus 2,98 persen, dalam 3 tahun terakhir. Perubahan anggaran tahun berjalan, bila diperlukan, dilakukan berdasarkan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang didukung oleh laporan rencana anggaran (LRA) semester I.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu menjalankan tupoksinya sesuai dengan mekanisme yang semestinya.** TAPD melakukan evaluasi dan sinkronisasi RKA-SKPD yang diusulkan, bersama dengan KUA dan PPA. Koordinasi antar unit kerja dilakukan secara efektif sejak tahap awal perencanaan hingga pada tahap akhir pembahasan di DPRD. Pada tahap awal, koordinasi antar unit kerja dilakukan pada tingkat forum SKPD, dan program-program prioritas diseleksi sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran. Selanjutnya, pada tahap akhir, program dan kegiatan yang direncanakan diklinis oleh DPRD bersama SKPD. Namun demikian, keterlambatan pengusulan rencana ke DPRD masih sering terjadi karena keterbatasan kemampuan staf perencana di tingkat SKPD dan seringnya terjadi pergantian staf.

**Penetapan APBD Kabupaten Dompu seringkali terlambat, dikarenakan kendala keterbatasan kapasitas sebagian anggota legislatif dan eksekutif dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.** Penetapan APBD Kabupaten Dompu terlambat 29 hari dari jadwal semestinya untuk tahun 2010, dan 10 hari untuk tahun 2012. Keterlambatan penetapan APBD ini seringkali sebagai akibat dari pembahasan RAPBD di DPRD yang berjalan lambat karena adanya perbedaan persepsi tentang program-program prioritas antara DPRD dan eksekutif. Pihak eksekutif mengusulkan program berdasarkan hasil musrenbang sedangkan DPRD mengusulkan program berdasarkan hasil reses atau jaring asmara anggota DPRD perseorangan, bukan hasil keputusan institusi: fraksi, komisi atau DPRD. Keterlambatan penetapan APBD tersebut juga disebabkan oleh keterlambatan pengajuan dan pembahasan rancangan KUA PPA dan RKA SKPD pada tingkat TAPD. Faktor lainnya adalah: keterbatasan kapasitas sebagian anggota legislatif dan eksekutif dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

**Akses publik terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Dompu masih kurang.** Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan dokumen penganggaran (KUA-PPA dan APBD) pemerintah daerah Kabupaten Dompu belum dapat diakses oleh masyarakat luas melalui media masa maupun internet. Meski, dokumen tersebut sebenarnya tidak ditutupi dan dirahasiakan, hanya kalangan tertentu yang mengaksesnya, misalnya untuk kepentingan penelitian atau kepentingan lainnya.

## **2.3 Analisis Pelaksanaan Anggaran**

**Pelaksanaan anggaran daerah Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori baik.** Kinerja baik ditunjukkan dalam pelaksanaan manajemen aset, bidang pengadaan barang dan jasa, dan bidang manajemen kas. Kinerja sedang ditemukan dalam pelaksanaan bidang akuntansi dan pelaporan.

### **2.3.1. Manajemen Kas**

**Pengelolaan kas daerah Kabupaten Dompu telah menerapkan praktek-praktek yang baik, namun masih lemah dalam sistem penetapan dan penagihan pendapatan daerah.** Pengelolaan kas kabupaten Dompu memiliki kinerja baik dan sangat baik dalam hal: (i) kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien; (ii) pengelolaan dan pengendalian penerimaan kas, pembayaran

kas serta surplus kas temporer; dan (iii) peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan. Namun, berkinerja buruk dalam sistem penetapan dan penagihan pendapatan daerah. Retribusi daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah dibatalkan serta masih ada pendapatan daerah yang tidak disetor ke kas daerah.

**PKD Kabupaten Dompu diselenggarakan oleh sebuah institusi daerah yang terpadu (DPPKAD), meskipun masih belum didukung dengan kerangka regulasi daerah yang lengkap.** Institusi ini belum didukung dengan kerangka regulasi daerah yang lengkap, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara nasional untuk penyelenggaraan PKD yang efektif. Beberapa peraturan perundangan daerah yang belum dibuat sampai dengan masa penelitian ini adalah: (i) sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; (ii) kebijakan akuntansi pemerintah daerah; (iii) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (iv) dan analisis standar belanja APBD.

**Kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah dilaksanakan sesuai ketentuan.** Pengelolaan kas pemerintah daerah kabupaten Dompu diselenggarakan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur dan pengendalian kas secara efisien berdasarkan ketentuan perundangan. Ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (i) anggaran kas dibuat berdasarkan rancangan DPA; (ii) Surat Penyediaan Dana dibuat berdasarkan anggaran kas; (iii) SPM diterbitkan maksimal 2 hari setelah diterimanya SPP; (iv) SP2D diterbitkan maksimal 2 hari juga setelah diterimanya pengajuan SPM; dan (v) penetapan prosedur pembukaan rekening bank untuk kas.

**Sistem penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dompu masih belum efisien.** Hal ini terutama karena: (i) dasar penetapan pajak/retribusi daerah tidak diverifikasi setiap tahun; (ii) belum adanya Unit Layanan menanggapi pertanyaan para pembayar pajak; dan (iii) belum adanya sanksi bagi para wajib pajak/retribusi yang melanggar ketentuan.

### 2.3.2 Pengadaan Barang dan jasa

**Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori berkinerja baik.** Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Dompu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Proses dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis pengadaan barang dan jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah berfungsi dengan baik. Pengumuman tender maupun penjelasan lelang sudah dapat dilihat secara online di web LPSE daerah. Pendaftaran tender juga dapat dilakukan secara online melalui web daerah tersebut.

### 2.3.3 Manajemen Aset

**Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Dompu masuk dalam kategori berkinerja baik.** Penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset daerah kabupaten Dompu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan daerah. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah didukung dengan regulasi daerah yang cukup komprehensif, meliputi: (i) SK Kepala Daerah tentang status penggunaan barang, dan SK Kepala Daerah tentang pedoman penatausahaan barang daerah; (ii) Perda tentang pengelolaan barang daerah, dan Perda tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang daerah; dan (iii) rencana tahunan kebutuhan pemeliharaan barang daerah, laporan tahunan pemeliharaan barang daerah tingkat SKPD, dan KIR yang memuat informasi pemeliharaan aset.

**Sistem informasi barang daerah (SIMBADA) berbasis komputer belum digunakan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Dompu.** Pada dasarnya perangkat yang dibutuhkan dalam penggunaan SIMBADA sudah tersedia. Akan tetapi belum diaplikasikan, disebabkan SDM yang akan menangani penggunaan SIMBADA belum siap. Sistem informasi barang daerah yang digunakan sementara masih bersifat manual.

### 2.3.4. Akuntansi dan Pelaporan

**Kinerja bidang akuntansi dan pelaporan Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori sedang dengan banyak kelemahan yang perlu disempurnakan, termasuk dalam hal regulasi.** Pelaksanaan bidang akuntansi dan pelaporan di kabupaten Dompu belum didukung dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen yang terintegrasi. Kapasitas SDM dan kelembagaan pelaksana fungsi akuntansi dan keuangan daerah masih belum baik. Meskipun, transaksi dan saldo keuangan daerah telah dibukukan secara akurat dan tepat waktu, akan tetapi kualitas laporan keuangan dan informasi manajemen daerah masih tergolong buruk.

**Terdapat jumlah SDM yang mencukupi standar kebutuhan untuk bidang akuntansi dan pelaporan di SKPKD Kabupaten Dompu, tapi penempatannya masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya.** Lebih dari 10 persen staf DPPKAD berlatar belakang pendidikan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi. Meski jumlahnya telah memenuhi standar kebutuhan, namun penempatannya masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sekitar 20 persen dari Kepala Bidang di DPPKAD tidak berpendidikan akuntansi atau manajemen keuangan.

**Standar kebutuhan SDM untuk bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh SKPD lainnya masih belum terpenuhi baik dalam hal jumlah maupun penempatannya.** Jumlah SDM bidang akuntansi dan pelaporan di setiap SKDP (kecuali DPPKAD) kurang dari 10 persen. Sebagian besar dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD tersebut adalah tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Untuk mengatasi permasalahan SDM ini, staf pengelola keuangan daerah telah dijadwalkan untuk mengikuti diklat teknis bidang akuntansi, penatausahaan dan kebhendahaan setiap tahun.

**Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi belum digunakan dalam PKD Kabupaten Dompu.** Semua bidang di DPPKAD Kabupaten Dompu masih menggunakan sistem manual dan belum terintegrasi. Catatan akuntansi belum dilengkapi dengan kartu kendali kegiatan dan belanja, dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program. Namun demikian seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah telah dicatat secara akurat dan tepat waktu. Ini ditunjukkan oleh lengkapnya rincian pos-pos laporan keuangan, dan adanya ketentuan batas waktu pencairan SP2D dan pengakuan transaksi/SPJ pada akhir tahun anggaran.

**Kinerja laporan keuangan dan informasi manajemen keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori buruk.** Meskipun laporan keuangan telah disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, namun masih banyak kelemahan, diantaranya manual akuntansi belum ada. Diketahui bahwa pada bulan desember 2010 terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran di 67 SKPD yang belum disetor ke kas daerah dan ada yang disetor pada tahun 2011 melewati tanggal 31 desember 2010. Hal ini tidak sesuai dengan permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah pasal 220 ayat 8.

## 2.4 Analisis Oversight dan Akuntabilitas

**Oversight dan akuntabilitas pada PKD Kabupaten Dompu secara umum memiliki kinerja dalam kategori sedang.** Kinerja masing-masing bidang yang termasuk kedalam kelompok bidang ini akan dibahas pada 2 bagian berikut.

### 2.4.1. Audit Internal

**Audit Internal Kabupaten Dompu masuk dalam kategori berkinerja baik.** Ini berarti bahwa sebagian besar dari kegiatan audit internal dalam PKD Kabupaten Dompu telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Audit internal di Kabupaten Dompu terselenggara secara efektif berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Audit Internal.** Berpedoman pada SOP yang sudah dibuat, Inspektorat

Kabupaten Dompu dapat mengoptimalkan penggunaan SDM untuk pelaksanaan tugas audit secara efektif. Pelaksanaan audit menerapkan Standar Audit Internal Pemerintah (AIP) dengan baik, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim audit dibentuk sesuai dengan kebutuhan diaudit.

**Inspektorat Daerah sebagai pelaksana audit internal di Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi anggaran dan SDM yang masih dibawah standar kebutuhan minimal.** Jumlah staf inspektorat dengan kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) baru mencapai 24 persen, masih dibawah standar kebutuhan minimal 50 persen. Staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi hanya 4 orang dari total 41 orang, dan hanya 2 orang yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan peningkatkan kinerja pemeriksa keuangan. Pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas pemeriksa direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 10 kali pada tahun 2012. Inspektorat mendapat alokasi anggaran sebesar 0,58 persen APBD, yang masih jauh dibawah ketentuan minimal sebesar 2 persen.

## 2.4.2 Audit Eksternal

**Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Kabupaten Dompu berdasarkan audit eksternal termasuk dalam kategori buruk.** Sebagian besar penyelenggaraan kegiatan PKD Kabupaten Dompu masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Dompu dalam beberapa tahun terakhir adalah opini disclaimer.** Hal ini karena PKD Kabupaten Dompu dinilai bekualitas sangat buruk, dimana; terjadi kesalahan berulang dalam pengungkapan dan pembebanan akun-akun pada laporan keuangan. Rekomendasi BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Dompu dari tahun 2003-2009 masih banyak yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang telah dilakukan belum optimal. Dari 28 temuan audit BPK untuk LKPD 2010 pada Sistem Pengendalian internal, baru 20 temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti. Demikian pula pada LHP yang menyangkut kepatuhan terhadap perundangan, dari 37 temuan 10 temuan belum ditindaklanjuti sama sekali dan 22 temuan masih belum sesuai/tuntas. Sementara temuan terhadap LKPD 2011 belum ada yang tindaklanjuti secara tuntas.

**Penggunaan dana tidak sesuai mekanisme adalah temuan penting audit eksternal di Kabupaten Dompu pada tahun 2011.** Pada tahun ini, audit eksternal menemukan bahwa penggunaan dana jamkesmas tidak melalui mekanisme APBD. Dana Jamkesmas digulirkan dari pusat langsung ke masing-masing rekening SKPD, sementara pihak terkait tidak tahu ke dalam program/kegiatan apa dana tersebut telah dimasukkan pada anggaran SKPD.

**Akses publik terhadap LKPD dan LHP masih sangat terbatas.** Pembahasan hasil audit BPK dalam sidang DPRD umumnya dihadiri oleh anggota dewan dan eksekutif, sementara masyarakat jarang dilibatkan, sehingga terkesan hasil audit hanya boleh diketahui oleh pihak eksekutif dan legislatif.

## 2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kinerja Pengelolaan Keuangan Publik di Kabupaten Dompu menunjukkan hasil yang baik, terutama pada bidang pengelolaan aset.** Namun ada beberapa kekurangan yang masih memerlukan perhatian, yakni dibidang Audit dan Pengawasan Eksternal, Kerangka Peraturan dan Perundangan, serta bidang Akuntansi dan Pelaporan.

**Perencanaan dan Penganggaran termasuk dalam kategori baik dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan yang memuat rencana capaian disertai indikator kinerja yang dapat diukur.** Hanya saja pelaksanaan tahapan-tahapan dalam perencanaan seringkali tidak tepat waktu serta perbedaan antara APBD murni dan APBD-P masih lebih dari 10 persen. Oleh karena itu Pemda Dompu hendaknya: (i) mengupayakan tersedianya dokumen perencanaan (RKPD, Renja SKPD) dan penganggaran (KUA/PPA, RKA-SKPD, APBD) yang tepat waktu melalui peningkatan kapasitas SDM perencana di tingkat SKPD dan

peningkatan koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan dokumen perencanaan dapat berjalan lebih efektif; (ii) mengupayakan agar perbedaan antara APBD induk dan APBD-P untuk kelompok belanja langsung kurang dari 10% melalui pelatihan/penyegaran mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD/APBD-P terutama untuk kelompok belanja langsung serta pelatihan dan pendampingan teknis untuk penyusunan Analisis Standar Belanja untuk APBD.

**Pelaksanaan Anggaran, Kabupaten Dompu sudah dapat menerapkan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan dengan baik.** Bidang pengelolaan aset mendapatkan grade 80 persen meski SIMBADA berbasis komputer belum diterapkan karena SDM yang belum siap. Bidang akuntansi dan pelaporan masih kurang bagus, disebabkan penempatan SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi baik pada tingkat SKPKD maupun SKPD. Pelaksanaan anggaran sudah terkategori relatif baik, namun belum sepenuhnya didukung dengan regulasi yang lengkap walaupun sudah diselenggarakan melalui institusi daerah yang terpadu (DPPKAD). Disarankan agar pemda Dompu segera menerapkan SIMBADA berbasis komputer pada pengelolaan asetnya dengan segera memberikan pelatihan pegoperasian perangkat lunak terkait dengan penggunaan SIMBADA pada SDM bidang aset. Pada bidang akuntansi dan pelaporan pemda hendaknya meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan SKPD melalui Pelatihan dan pendampingan bidang akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah serta kebhendaharaan secara rutin pada pengelola keuangan daerah dan Staf Keuangan SKPD serta menempatkan SDM yang berkualifikasi pendidikan akuntansi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan melengkapi peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Perda mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Standar dan prosedur audit internal dapat dilaksanakan dengan baik, meski dengan keterbatasan SDM dan sumberdaya anggaran, sementara dalam pengawasan eksternal masih banyak ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik.** Laporan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Dompu tidak memberikan opini (disclaimer) dalam 5 tahun terakhir. Peran Inspektorat Daerah sebagai pelaksana audit internal dalam menopang pengelolaan keuangan daerah kearah yang lebih baik dapat dioptimalkan melalui peningkatan sumberdaya (anggaran) serta SDM auditor yang berkualitas. Pada bidang audit eksternal direkomendasikan agar: (i) meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah pada masyarakat melalui publikasi laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); (ii) penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan; (iii) terus berupaya meningkatkan status laporan audit eksternal dari disclaimer menjadi yang lebih baik dengan cara menindaklanjuti dengan segera setiap rekomendasi dalam hasil LHP sesuai saran yang diberikan BPK.

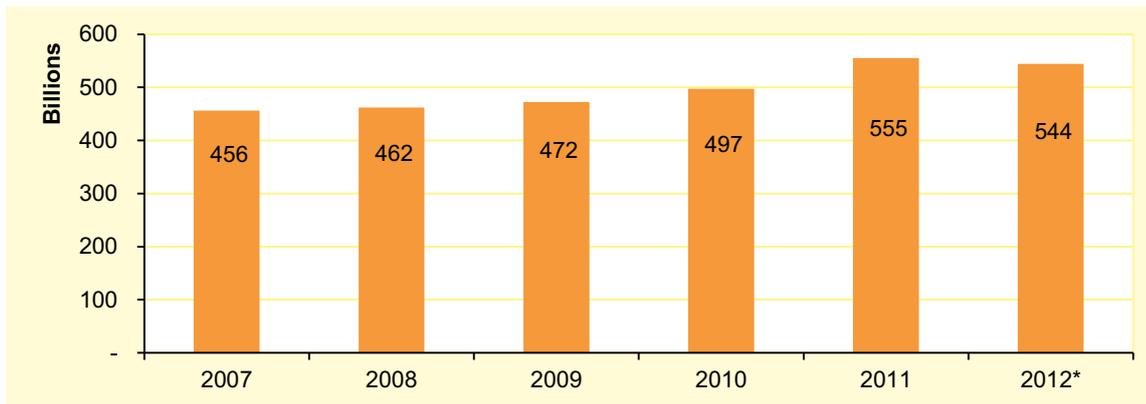
# Bab 3

## Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

### 3.1. Gambaran Umum

**Pendapatan daerah Dompu meningkat rata-rata sebesar 5 persen per tahun, dalam kurun waktu 2007 – 2011.** Dalam periode ini, realisasi pendapatan Kabupaten Dompu meningkat antara 1 persen hingga 12 persen setiap tahunnya. Realisasi pendapatan Kabupaten Dompu sebesar Rp 456 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 555 milyar pada tahun 2011. Sumber pendapatan daerah meliputi: dana perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 3.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, 2007 – 2012



Sumber : Diolah oleh Tim PERA dari Database P2KP-UNRAM

Catatan : Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011. Data tahun 2012 adalah perkiraan berdasarkan anggaran (APBD), bukan realisasi.

**Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap anggaran pendapatan Kabupaten Dompu mencapai 100 persen dalam lima tahun terakhir.** Rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan Kabupaten Dompu meningkat dari 98 persen pada tahun 2007 menjadi 111,3 persen pada tahun 2011. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, rasio tersebut mengalami perkembangan tahunan yang berfluktuasi, dengan rata-rata 3 persen per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan pemerintah Kabupaten Dompu untuk merealisasikan rencana pendapatan.

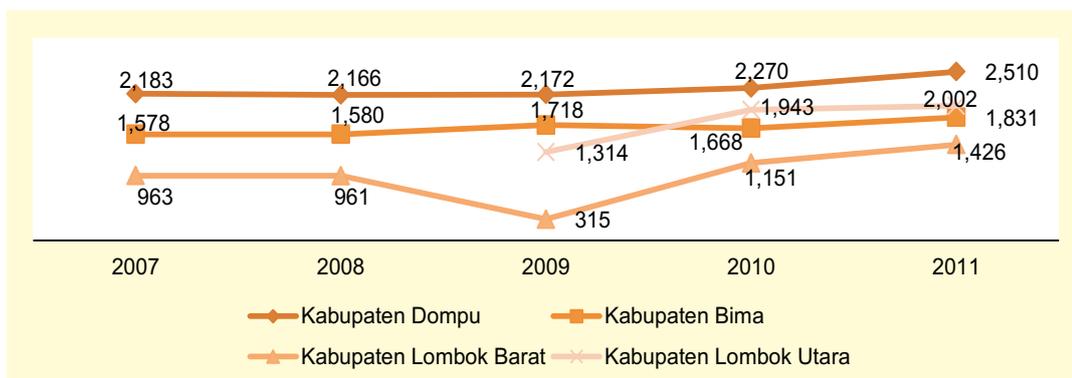
Tabel 3.1. Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011 (Persen)

Kabupaten	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	98.76	105.38	102.87	113.44	111.30
Bima	97.83	97.61	96.72	111.70	106.59
Lombok Barat	102.23	101.76	112.70	106.32	104.35
Lombok Utara			112.0	115.7	112.2

Sumber : Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA

**Pendapatan daerah per kapita Kabupaten Dompu juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.** Dalam periode 2007-2011, pendapatan daerah perkapita Kabupaten Dompu meningkat dari Rp 2,18 juta tahun 2007 menjadi Rp 2,51 juta tahun 2011. Peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah perkapita, rata-rata 4 persen setiap tahunnya. Dibandingkan dengan 3 kabupaten lain yang dianalisis dalam penelitian ini, Kabupaten Dompu memiliki pendapatan daerah per kapita yang lebih besar.

Gambar 3.2. Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Dompu, 2007-2011

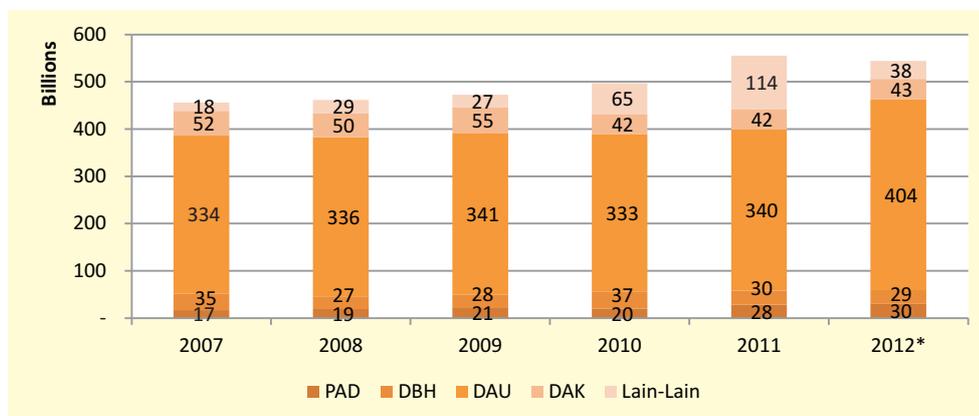


Sumber : Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA  
 Catatan : Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011.

## 3.2 Analisis Struktur Pendapatan Daerah

Dana perimbangan mendominasi struktur pendapatan daerah Kabupaten Dompu, dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2007-2011, rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dompu adalah 85 persen, sedangkan kontribusi PAD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 5 persen, dan 10 persen. Dana perimbangan meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Gambar 3.3. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, Tahun 2007-2012



Sumber : Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA  
 Catatan : Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011. Data tahun 2012 adalah perkiraan berdasarkan anggaran (APBD), bukan realisasi.

DAU merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dompu, meski dengan tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Dalam periode 2007-2011, kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dompu menurun dari 73 persen pada tahun 2007 menjadi 61 persen pada tahun 2011. Dalam periode yang sama, nilai nominal DAU Kabupaten Dompu mengalami peningkatan; dari Rp 334 milyar menjadi Rp 340 milyar.

DAK memberi kontribusi antara 7 hingga 11 persen pada pendapatan daerah Kabupaten Dompu, juga dengan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir. Perolehan DAK Kabupaten Dompu meningkat dari Rp 52 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 55 milyar tahun 2009, selanjutnya menurun menjadi Rp 42 milyar

pada tahun 2011. Dalam periode yang sama, kontribusi DAK terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dompu menurun dari 11 persen pada tahun 2007 menjadi 7 persen pada tahun 2011.

**DBH merupakan jenis dana perimbangan dengan kontribusi terkecil pada pendapatan daerah Kabupaten Dompu, dengan tren menurun untuk DBH-pajak tapi meningkat untuk DBH-non pajak dalam lima tahun terakhir.** Penerimaan DBH-pajak menurun dari Rp 30,19 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 20,07 milyar pada tahun 2009 dan Rp 18,95 milyar pada tahun 2011. Sementara penerimaan DBH-non pajak meningkat dari Rp 5,2 milyar menjadi Rp 14,3 milyar tahun 2010 dan Rp 11,1 milyar tahun 2011.

**Tabel 3.2. Penerimaan DBH Kabupaten Dompu, 2007 – 2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
bagi hasil pajak	30.19	21.53	20.07	22.23	18.95	29.23
bagi hasil bukan pajak	5.27	5.67	8.36	14.31	11.06	.00

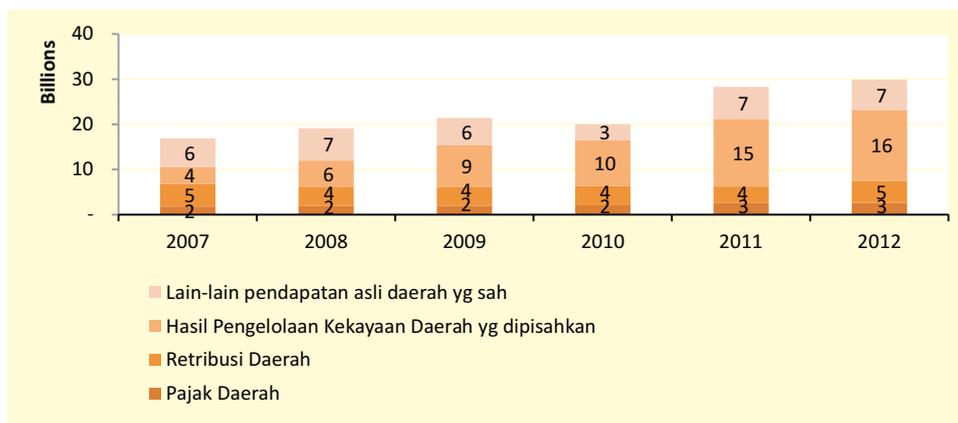
**Sumber:** Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram.

**Catatan:** Data menggunakan angka riil, tahun dasar 2011.

**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan yang meningkat secara tajam, walaupun belum memberikan kontribusi yang besar dalam lima tahun terakhir.** Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah Dompu sebesar 3 persen pada tahun 2007, meningkat menjadi 13 persen dan 20 persen masing-masing pada tahun 2010 dan 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya sumber penerimaan daerah selain dari dana perimbangan, seperti dana insentif daerah, bantuan tunjangan guru, maupun dana penyesuaian.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 15 persen selama kurun waktu 2007-2011.** Dalam periode 2007-2011, perolehan PAD Kabupaten Dompu meningkat dari Rp 16 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 28 milyar pada tahun 2011. Dibandingkan dengan PAD 3 kabupaten yang diteliti dalam penelitian ini, perolehan Kabupaten Dompu relatif lebih kecil dari perolehan Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat, tapi lebih besar dari perolehan Kabupaten Lombok Utara.

**Gambar 3.4. Komposisi PAD Kabupaten Dompu, 2007 – 2012**



**Sumber:** Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA

**Catatan:** Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011. Data tahun 2012 adalah perkiraan berdasarkan anggaran (APBD), bukan realisasi.

**Kontributor terbesar terhadap PAD Kabupaten Dompu adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.** Kontribusi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Dompu meningkat dari 37 persen pada tahun 2007 menjadi 25 persen pada tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah (nominal) perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari Rp 3,7 milyar tahun 2007 menjadi Rp 14,8 milyar tahun 2011. Peningkatan tersebut bersumber dari penyertaan modal daerah pada BUMD. Sementara, pada periode yang sama, kontribusi pajak daerah berkisar antara 9 persen dan 11 persen, sedangkan kontribusi retribusi daerah sebesar 30 persen pada tahun 2007 menurun menjadi 13 persen pada tahun 2011.

Tabel 3.3. PAD Kabupaten Dompu Tahun 2007 - 2011

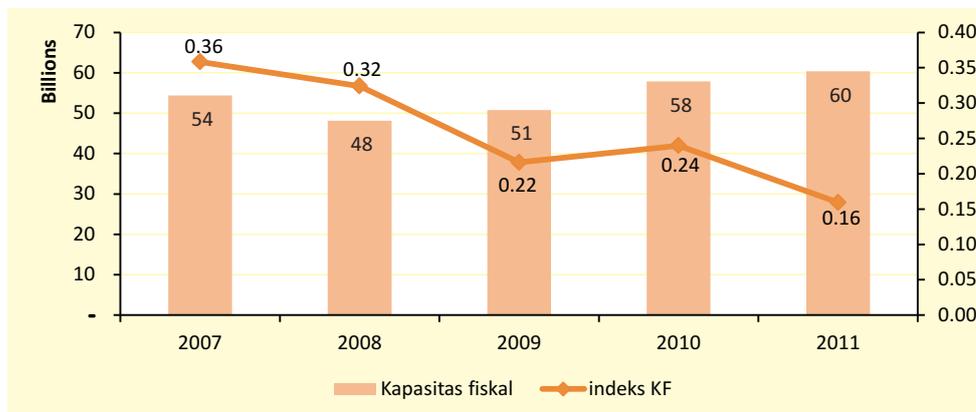
Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	Rp Mil	%								
Pajak Daerah	1,075		1,378		1,466		1,819		2,676	
Pajak Hotel	46	4.2	45	3,3	54	3,7	27	1.5	61	2.3
Pajak Restoran	4	5.9	71	5,1	71	4,9	58	3.2	136	5.1
Pajak Hiburan	3	0.3	1	0,1	7	0,5	3	.1	4	0.1
Pajak Reklame	17	1.6	17	1,2	26	1,8	24	1.3	31	1.2
Pajak Penerangan Jalan	747	68.6	875	63,5	1,088	74,2	1,464	80.5	1,779	66.5
Pajak Pengambilan Bhan Galian Gol.C	209	19.4	367	26,6	217	14,8	243	13.4	664	24.8
Pajak Parkir	1	0.1	2	0,1	1	0,1	1	0.1	1	0.0
Retribusi Daerah	3,013		2,973		3,299		3,722		3,545	
Retribusi Jasa Umum	1,824	60.5	1,897	63,8	2,137	64,8	2,467	66.3	2,340	66.0
Retribusi Jasa Usaha	852	28.3	863	29,0	871	26,4	939	25.2	886	25.0
Retribusi Perizinan Tertentu	190	6.3	213	7,2	291	8,8	316	8.5	319	9.0
Hasil PKD yang Dipisahkan	2,254		4,198		7,103		8,896		14,849	
Bagian Lba pada BUMD	2,254	100	4,198	100	7,041	100	8,896	100	14,849	100
Bagian Laba pada Perush. Swasta										
Lain-lain PAD yang Sah	3,791		5,115		4,689		3,042		7,187	
Hasil Penjualan Aset Daerah	139	3.7	12	0,2	32	0,7		-		-
Jasa Giro	2,041	53.9	2,455	48	2,295	48,9	1,479	48.8	1,531	21.3
Pendapatan Bunga Deposito	759	20.0	550	10,7	996	21,2	631	20.8	1,111	15.5
Tuntutan Ganti Kerugian daerah	1	0.0	294	5,8	317	6,8	232	7.6	2,132	29.7
Pendapatan Denda atas Keterlambatan		-		-	39	0,8	31	1.0		-
Pendapatan dari Pemngembalian	258	6.8	505	9,9	367	7,8	274	9.0		3.4
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1	0.0		-	62	1,3	41	1.4		-
Sumbangan Pihak Ke-tiga	286	7.5	669	13,1	581	12,4	262	8.6		2.0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	306	8.1	630	12,3		-	81	2.7		-
BPHTB		-				-		-		0.2

Sumber : Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA

Catatan : Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011.

**Kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Dompu adalah termasuk dalam klasifikasi rendah dalam periode 2007-2011.** Kapasitas fiskal yang digunakan sesuai dengan PP no 55/2005 tentang dana perimbangan, khususnya penentuan jumlah DAU yang diterima, yaitu penjumlahan PAD dan DBH. Berdasarkan peraturan tersebut, kapasitas fiskal Kabupaten Dompu pada tahun 2007 sebesar Rp 54 milyar meningkat menjadi Rp 60 milyar pada tahun 2011. Proporsi kapasitas fiskal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dompu selama kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 11 persen setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Dompu memiliki tingkat keleluasaan yang rendah dalam pembuatan keputusan penggunaan anggaran pendapatannya. Kondisi ini didukung juga dengan indeks kapasitas fiskal. Berdasarkan PMK No.73/PMK.02/2006 tentang pinjaman daerah, indeks ini digunakan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan kapasitas fiskalnya. Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Dompu sebesar 0.36 pada tahun 2007 dan sebesar 0,16 atau lebih kecil lagi pada tahun 2011. Ini berarti bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Dompu termasuk dalam klasifikasi rendah, dengan indeks kurang dari 0,5.

Gambar 3.5. Kapasitas Fiskal dan Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Dompu, 2007-2011



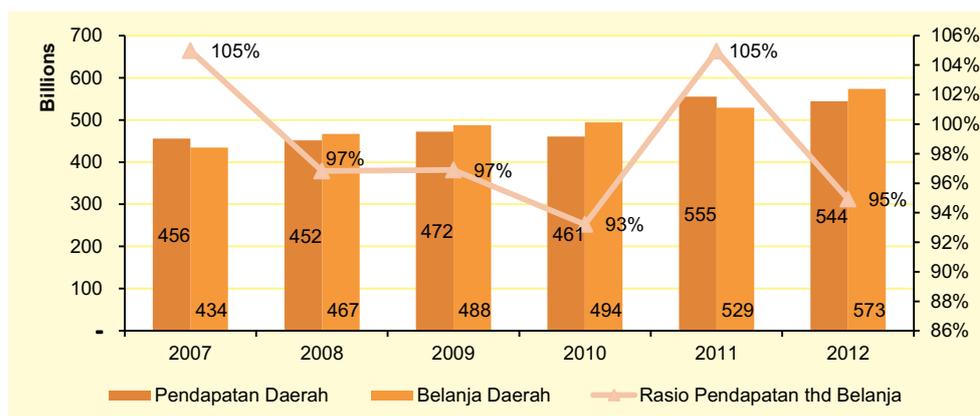
Sumber : database P2KP Unram dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Diolah oleh Tim PERA.

Catatan : Data menggunakan angka riil, tahun dasar 2011.

### 3.3 Analisis Alokasi dan Diskresi

Belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Dompu cenderung tidak berimbang dalam lima tahun terakhir. Dalam periode 2007-2011, rasio pendapatan terhadap belanja daerah Kabupaten Dompu berkisar antara 95 persen dan 105 persen. Rasio di bawah 100 persen berarti belanja lebih kecil dari pendapatan, atau surplus. Sebaliknya, rasio di atas 100 persen berarti defisit. Surplus anggaran sebesar 5 persen terjadi pada tahun 2007 dan 2011, sementara defisit anggaran sebesar 3 persen dialami pada tahun 2008 dan 2009. Dengan demikian, Kabupaten Dompu mengalami surplus/defisit anggaran yang belum melampaui batas maksimal (6 persen) yang diperbolehkan ketentuan anggaran berimbang.

Gambar 3.6. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007 – 2011

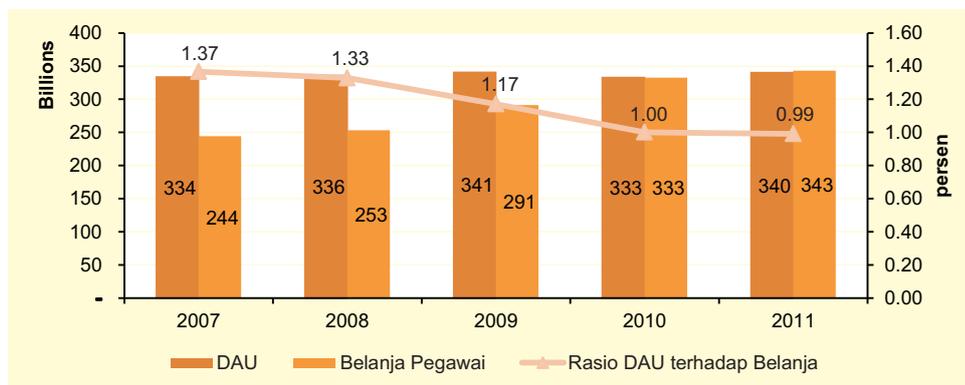


Sumber : database P2KP Unram Diolah oleh Tim PERA

Catatan : Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi.

Belanja pegawai menyerap hampir seluruh DAU Kabupaten Dompu dalam kurun waktu lima tahun 2007-2011. Dalam kurun waktu tersebut, rasio DAU terhadap belanja pegawai Kabupaten Dompu menurun dari 1,37 tahun 2007 menjadi 0,99 tahun 2011. Ini berarti belanja pegawai menyerap 73 persen DAU pada tahun 2007 dan lebih dari 100 persen DAU pada tahun 2011. Ini berarti bahwa belanja pegawai seluruhnya tidak bisa ditutupi oleh DAU sehingga harus menggunakan dana APBD lainnya. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengajukan revisi perhitungan DAU, khususnya pada formula kebutuhan fiskal.

Gambar 3.7. Rasio DAU Terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Dompu, 2007-2011



Sumber : Database P2KP-UNRAM Diolah oleh Tim PERA

Catatan : Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011.

**Alokasi DAK Kabupaten Dompu didominasi oleh sektor pelayanan dasar.** Sektor pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) selalu memperoleh alokasi DAK terbesar (80% atau lebih) dibandingkan sektor lainnya, walaupun secara nominal jumlah perolehannya menurun sejak tahun 2009; dari Rp 34,603 milyar menjadi Rp 29,63 milyar pada tahun 2011. Penurunan tersebut diiringi dengan peningkatan cakupan sektor/bidang lainnya, seperti: Keluarga Berencana (KB), Sarana PDDT, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 3.4. Alokasi DAK Menurut Sektor di Kabupaten Dompu, 2007 – 2012

Sektor	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp Juta	%										
Pendidikan	11,192	31%	14,579	34%	19,918	4%	16,793	40%	13,883	33%	12,388	28%
Kesehatan	6,667	19%	6,667	16%	8,398	17%	7,547	18%	4,804	11%	5,786	13%
Kependudukan	-	0%	872	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Jalan	6,193	17%	7,768	18%	7,415	15%	3,934	9%	6,234	15%	7,952	18%
Irigasi	2,763	8%	3,365	8%	2,289	5%	1,514	4%	2,815	7%	3,593	8%
Air & Kes. Lingkungan	2,065	6%	2,224	5%	2,267	5%	1,396	3%	1,901	4%	1,819	4%
Kelautan & Perikanan	2,648	7%	2,648	6%	3,361	5%	2,991	7%	3,350	8%	3,131	7%
Pertanian	3,653	10%	3,653	9%	2,613	5%	4,092	10%	4,822	11%	3,942	9%
Pras. Pemerintah	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LH	701	2%	701	2%	629	1%	616	1%	681	2%	841	2%
Kehutanan	-	0%	-	0%	-	0%	1,098	3%	1,029	2%	1,219	3%
KB	-	0%	-	0%	757	2%	758	2%	889	2%	606	1%
Sarana PDDT	-	0%	-	0%	1,478	3%	967	2%	959	2%	1,145	3%
Perdagangan	-	0%	-	0%	459	1%	-	0%	956	2%	1,051	2%
Keselamatan Transportasi	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	174	0%	218	0%
Transportasi Desa	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Permukiman	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Total</b>	<b>35,882</b>	<b>100%</b>	<b>42,477</b>	<b>100%</b>	<b>48,584</b>	<b>100%</b>	<b>41,707</b>	<b>100%</b>	<b>42,497</b>	<b>100%</b>	<b>43,691</b>	<b>100%</b>

Sumber : Diolah oleh Tim PERA bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Departemen Keuangan tahun 2007-2012

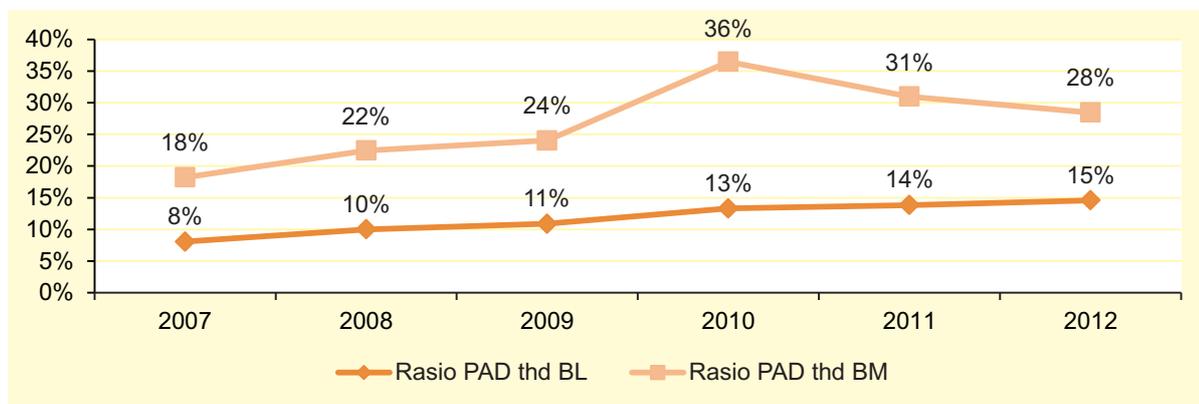
Catatan : Data merupakan angka nominal.

**Pemerintah daerah Kabupaten Dompu masih belum mampu menghasilkan PAD yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja langsungnya, meski telah terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2007-2011.** Dalam kurun waktu ini, rasio PAD terhadap belanja langsung meningkat tajam, dari 8 persen pada tahun 2007 menjadi 15 persen pada tahun 2011. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD pemerintah Kabupaten Dompu untuk memenuhi kebutuhan belanja langsungnya semakin meningkat dalam periode lima tahun terakhir.

**Pemerintah daerah Kabupaten Dompu berhasil menutupi seluruh kebutuhan belanja modalnya dengan PAD pada tahun 2011.** Dalam periode 2007 – 2011, rasio PAD terhadap belanja modal Kabupaten Dompu meningkat dari 18 persen pada tahun 2007 menjadi 36 persen pada tahun 2010 dan 28 persen pada

tahun 2011. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD Kabupaten Dompu untuk menutupi kebutuhan belanja modalnya telah meningkat secara drastis, dari posisi defisit menjadi posisi surplus dalam periode waktu tersebut.

Gambar 3.8. Rasio PAD terhadap Belanja Langsung dan Belanja Modal Kabupaten Dompu, 2007-2011



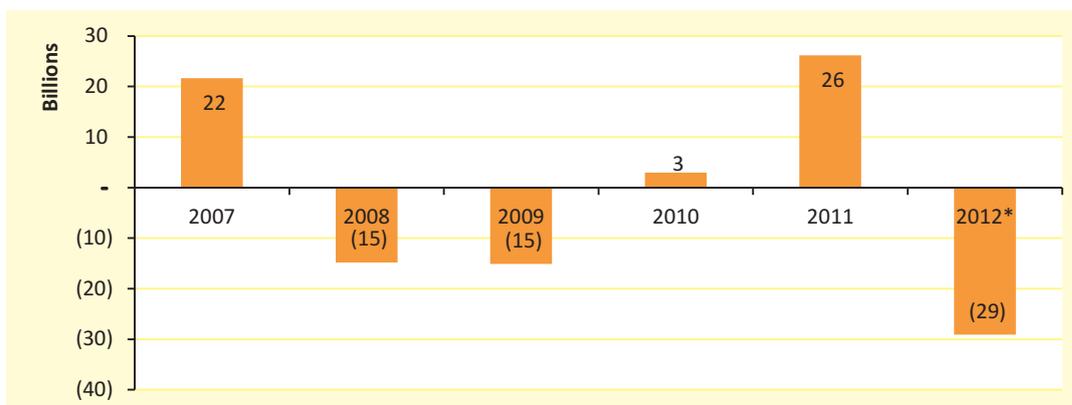
Sumber : Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram

Catatan : Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi.

### 3.4 Analisis Surplus/Defisit Anggaran dan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Dompu mengalami surplus dan defisit dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh surplus sebesar Rp 22 milyar menjadi Rp 26 milyar pada tahun 2011, meskipun diantara kedua tahun tersebut sempat mengalami defisit. Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh terjadinya peningkatan PAD yang bersumber dari bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, serta tuntutan ganti kerugian daerah. Perolehan surplus pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2011 sebesar 5 persen dari jumlah pendapatan daerah, lebih rendah dibandingkan pemerintah kabupaten Lombok Utara (9 persen). Pemerintah Kabupaten Dompu mengalami defisit sebesar 3 persen pada tahun 2008 dan 2009. Defisit tersebut berada dalam rentang yang diperbolehkan oleh kementerian keuangan (maksimum 6% dari total pendapatan daerah).

Gambar 3.9. Perkembangan Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Dompu Tahun 2007-2012



Sumber : database P2KP Unram Diolah oleh Tim PERA

Catatan : Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi.

**Pemerintah Kabupaten Dompu adalah selalu memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) dalam periode 2007 - 2011.** Dalam kurun waktu ini, SiLPA pemerintah Kabupaten Dompu berkisar antara Rp. 19 milyar dan Rp. 74 milyar setiap tahun, dengan kecenderungan yang menurun: dari Rp. 74 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp. 57 milyar pada tahun 2011. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah Kabupaten Dompu menerima pembiayaan dari: SiLPA tahun anggaran sebelumnya setiap tahun, pencairan dana cadangan pada tahun 2010, dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pada tahun 2007. Dalam periode yang sama, pemerintah Kabupaten Dompu mengeluarkan pembiayaan untuk: penyertaan modal pada BUMD setiap tahun, dan pembentukan dana cadangan setiap tahun (kecuali 2010).

**Tabel 3.5. Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011**

Uraian Pembiayaan	Kab. Dompu					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Surplus/Defisit	21,626.24	-14,834.53	-15,130.43	2,989.34	26,151.13	-29,101.63
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
SILPA TA Sebelumnya	64,325.77	64,491.83	38,134.47	30,025.74	34,068.07	38,717.01
Pencairan dana cadangan	.00	.00	.00	5,349.50	.00	.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	711.39	.00	.00	.00	.00	.00
penerimaan piutang daerah	.00	.00	.00	.00	62.50	.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65,037.17	64,491.83	38,134.47	35,375.24	34,130.57	.00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
Pembentukan Dana Cadangan	1,289.47	1,182.02	1,136.23	.00	1,000.00	.96
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10,730.57	7,044.20	1,988.41	6,852.95	2,000.00	8.65
Pembayaran Pokok Utang	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Pemberian Pinjaman Daerah	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,020.04	8,226.23	3,124.64	6,852.95	3,000.00	9.62
Pembiayaan Netto	53,017.12	56,265.61	35,009.83	28,522.29	31,130.57	29,101.63
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>74,643.37</b>	<b>41,431.07</b>	<b>19,879.39</b>	<b>31,511.63</b>	<b>57,281.70</b>	<b>.00</b>

**Sumber :** Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram

**Catatan :** Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi.

## 3.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Tingkat kemandirian daerah Dompu relatif rendah, yang diindikasikan oleh tingginya kontribusi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) pada pendapatan daerah (rata-rata 85 persen), dan rendahnya kontribusi PAD (rata-rata 5 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (10 persen) selama periode 2007 – 2011. Akibatnya, kapasitas fiskal yang tersedia bagi Kabupaten Dompu untuk dapat dikelola secara mandiri relatif rendah, rata-rata sebesar 11 persen setiap tahunnya. Sebagian besar (73 persen) dari DAU digunakan untuk belanja pegawai.

Terkait dengan kondisi tersebut diatas, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dengan dukungan teknologi informasi yang terpadu. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengintensifkan sumber-sumber pajak daerah maupun retribusi daerah yang sudah ada, seperti; pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, retribusi jasa usaha, maupun retribusi perijinan tertentu. Untuk mencapai intensifikasi tersebut, dibutuhkan pola pemungutan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, antara lain melalui penyederhanaan administrasi pajak dan retribusi, mempercepat proses penyusunan perda pajak dan retribusi daerah, memperbaiki tarif retribusi, meningkatkan kapasitas administratur pajak dan retribusi, dan meningkatkan koordinasi pemungutan retribusi dengan SKPD terkait. Untuk memperkuat optimalisasi, pemerintah daerah juga harus memperbaharui secara kontinyu basis data penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan cara mengidentifikasi: pembayar pajak baru, jumlah pembayar pajak (lama), serta data (jumlah, luas, dan sebagainya) obyek pajak baik obyek pajak lama maupun obyek pajak baru.

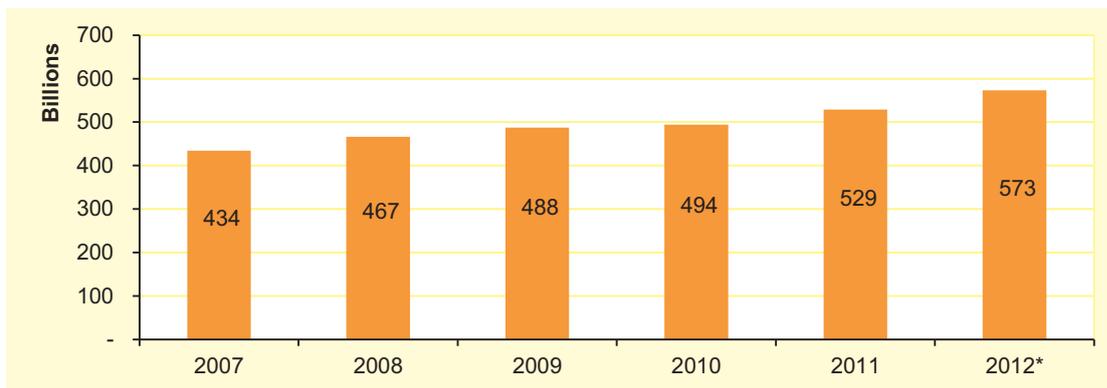
Terkait dengan sebagian besar DAU habis digunakan untuk belanja pegawai, dipandang penting bagi pemerintah daerah Dompu untuk memperjuangkan alokasi dana perimbangan yang lebih besar. Ini dapat dilakukan dengan mengusulkan revisi formula perhitungan kebutuhan fiskal. Tiga indikator utama IPM, yaitu; indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks paritas daya beli, selama ini hanya dimasukkan dalam satu komponen dalam penghitungan kebutuhan fiskal, harus dibuat menjadi tiga komponen yang terpisah, ditambah dengan tingkat kemiskinan, dan kebutuhan infrastruktur dasar, sehingga akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan jumlah DAU.

# Bab 4 Belanja Daerah

## 4.1 Gambaran Umum

**Belanja daerah Kabupaten Dompu mengalami pertumbuhan rata-rata 5,7 persen sedikit cepat dari pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 5 persen dalam periode 2007-2012.** Total belanja pemerintah Kabupaten Dompu sebesar Rp 434 milyar pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 529 milyar pada tahun 2011. Rata-rata peningkatan belanja daerah seiring dengan peningkatan pendapatan daerah sebesar 5 persen setiap tahunnya. Peningkatan belanja daerah mengindikasikan adanya perhatian pemerintah Kabupaten Dompu untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas di Kabupaten Dompu.

Gambar 4.1. Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007 – 2012



Sumber : Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram

Catatan : Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi

**Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pemerintah Kabupaten Dompu cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.** Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Dompu adalah sebesar 86,6 persen pada tahun 2007, meningkat menjadi 100,4 persen pada tahun 2011. Ini berarti terdapat perbedaan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah sebesar 4 persen hingga 13 persen dalam periode 2007-2011. Perbedaan ini mengindikasikan pemerintah melaksanakan atau merealisasikan belanja daerah sampai dengan batas maksimalnya, yaitu anggaran belanja.

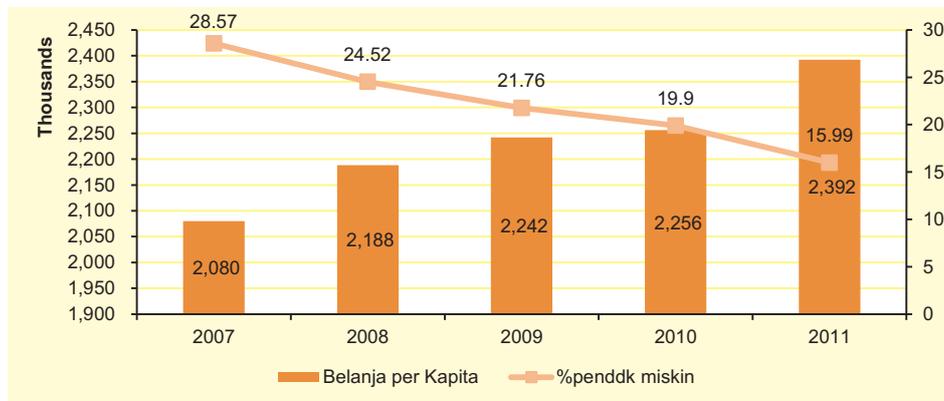
Tabel 4.1. Rasio Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011 (Persen)

Kabupaten	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	86.6	96.7	97.2	104.7	100.4
Bima	95.0	97.9	93.4	107.1	101.0
Lombok Barat	98.2	99.5	109.7	100.5	101.8
Lombok Utara			93.6	102.5	96.6

Sumber : Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram

**Dalam periode 2007-2011 belanja daerah perkapita pemerintah Kabupaten Dompu cenderung meningkat.** Belanja daerah perkapita Kabupaten Dompu meningkat dari Rp 2,08 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 2,39 juta pada tahun 2011. Tren peningkatan belanja per kapita ini disertai oleh tren penurunan persentase penduduk miskin. Belanja per kapita Kabupaten Dompu diatas rata-rata belanja perkapita 3 kabupaten lain (Bima, Lombok Barat, Lombok Utara).

Gambar 4.2. Belanja Daerah per Kapita dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dompu, tahun 2007 - 2011



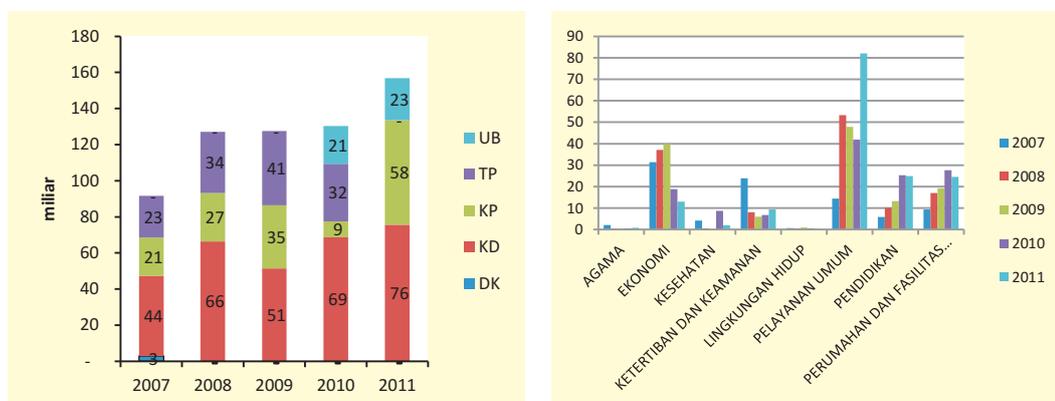
Sumber : Diolah oleh Tim PERA dari database P2KP Unram.

**Pembangunan di Kabupaten Dompu tidak hanya didanai dari APBD, tetapi juga didanai dari pemerintah pusat melalui mekanisme APBN.** Belanja pemerintah pusat melalui mekanisme APBN di Kabupaten Dompu cukup besar dengan rata-rata Rp 126,7 milyar per tahun selama periode 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Dompu sebesar Rp 91,6 milyar meningkat mendekati 2 kali lipat menjadi Rp 156,8 milyar pada tahun 2011.

**Belanja pemerintah pusat di Kabupaten Dompu lebih banyak dikelola oleh Kantor Daerah rata-rata 48,35 persen dari total dana APBN di Dompu.** Pada tahun 2007, jumlah anggaran dialokasikan di Kabupaten Dompumelalui Kantor Daerah sebesar Rp 44 milyar cenderung meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp 76 milyar pada tahun 2011 (kecuali tahun 2009). Dana yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui tugas pembantuan relative sedikit, hanya berkisar rata-rata 21,75 persen dari total belanja pemerintah pusat di Kabupaten Dompu. Pada tahun 2011, belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh Kantor Pusat di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan lebih dari 6 kali lipat dari tahun tahun sebelumnya (Rp 9 milyar) menjadi Rp 58 milyar.

**Dari delapan klasifikasi fungsi, fungsi pelayanan umum memperoleh alokasi anggaran terbesar dan meningkat hampir 100 persen pada tahun 2011.** Untuk fungsi pelayanan umum, peruntukan belanja terutama untuk melayani pertanahan nasional dan kemananan. Kemudian menyusul fungsi ekonomi yang memperoleh alokasi belanja rata-rata 28 milyar setiap tahun. Untuk fungsi ekonomi, lebih banyak diperuntukkan kepada pengairan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Gambar 4.3. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Dompu, 2007-2011



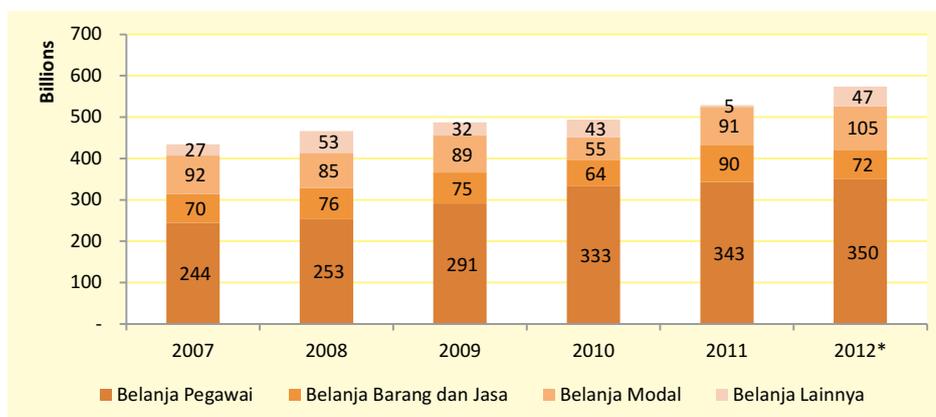
Sumber: Kementerian Keuangan, DJPK

## 4.2 Belanja Klasifikasi Ekonomi

**Struktur belanja daerah Kabupaten Dompu didominasi oleh belanja pegawai.** Proporsi belanja pegawai Kabupaten Dompu terhadap total belanja daerah sebesar 54 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 65 persen pada tahun 2011. Belanja modal serta belanja barang dan jasa memiliki proporsi yang cenderung serupa, yaitu rata-rata sebesar 17 persen dan 16 persen setiap tahunnya, sedangkan belanja lainnya memiliki proporsi yang kecil yaitu sebesar 7 persen. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Dompu lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten Lombok Utara.

**Dalam periode 2007-2011, tren belanja pegawai cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan belanja modal.** Jumlah belanja pegawai meningkat dari Rp 244 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 343 milyar pada tahun 2011. Belanja modal meningkat dari Rp 70 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 90 milyar pada tahun 2011. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, sedangkan belanja lainnya mengalami penurunan dalam periode yang sama.

Gambar 4.4. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007 - 2012



Sumber : database P2KP Unram. Diolah oleh Tim PERA

## 4.3 Belanja Sektoral

**Sektor pelayanan dasar menyerap sebagian besar belanja daerah Kabupaten Dompu.** Dalam periode 2007-2011, belanja pemerintah Kabupaten Dompu sebagian besar (59 persen) dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan dasar. Sektor-sektor pelayanan dasar yang dimaksud adalah yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selebihnya digunakan untuk belanja pemerintahan umum (26 persen), pertanian (3 persen) dan sektor lainnya (12 persen).

**Dari ketiga sektor pelayanan dasar, sektor pendidikan memperoleh alokasi belanja terbesar dibandingkan dengan sektor kesehatan dan infrastruktur.** Dalam kurun waktu 2007-2011, proporsi belanja urusan pendidikan berkisar antara 36 persen hingga 45 persen dari total belanja pemerintah Kabupaten Dompu. Proporsi ini setimpal dengan alokasi DAK untuk urusan pendidikan yang sebesar 30 persen setiap tahunnya. Sedangkan proporsi belanja sektor kesehatan adalah rata-rata 8,7 persen dan infrastruktur adalah rata-rata 11 persen, setiap tahunnya. Untuk sektor infrastruktur khususnya urusan pekerjaan umum mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan urusan perhubungan.

**Sektor pertanian yang juga merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Dompu, namun porsi alokasi belanja untuk sektor tersebut adalah terendah diantara sektor strategis lainnya.** Selama periode pengamatan, belanja yang teralokasi ke sektor pertanian rata-rata sebesar Rp 15,92 milyar atau 3,4 persen. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat untuk pengembangan sektor pertanian cukup besar. Rendahnya porsi belanja untuk sektor pertanian pada tahun 2011 adalah akibat dari melonjaknya porsi belanja untuk urusan otonomi daerah/pemerintahan umum dari 1 persen di tahun 2010 menjadi 22 persen dari total belanja daerah di tahun 2011.

Tabel 4.2. Belanja Daerah Menurut Sektor di Kabupaten Dompu, 2007-2011

Belanja Urusan	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp Mil	%										
Pendidiaan	152.98	35	181.20	39	208.74	43	207.03	42	227.97	43	236.96	41
Kesehatan	37.13	9	34.47	7	35.15	7	35.15	7	49.98	9	38.85	7
Infrastruktur:												
Pekerjaan Umum	33.51	8	41.31	9	43.04	9	43.04	9	58.83	11	42.98	7
Penataan Ruang	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.79	0	0.00	-
Perhubungan	4.10	1	3.29	1	5.32	1	4.97	1	4.97	1	5.70	1
Pertanian/Peternakan/Perkebunan	21.26	5	5.83	1	33.98	7	9.29	2	9.29	2	11.41	2
Otonomi Daerh/Pem. Umum	130.02	30	133.13	29	6.22	1	7.08	1	115.60	22	127.44	22
Urusan Lainnya	55.42	13	67.31	14	155.11	32	87.50	38	61.66	12	110.01	19
Jumlah Belanja	434.42		466.53		487.56		494.07		529.09		573.36	

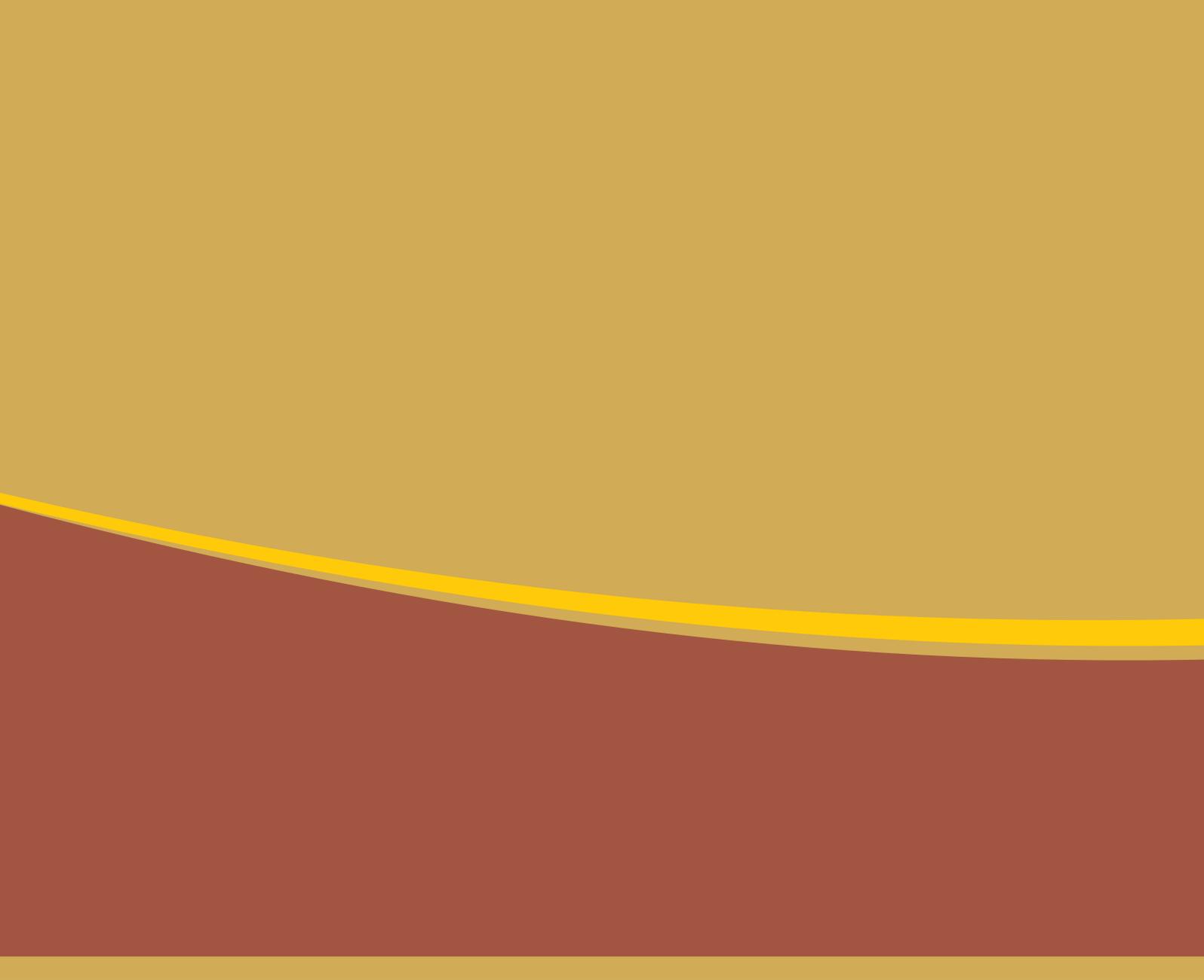
Sumber : database P2KP Unram Diolah oleh Tim PERA

Catatan : Data merupakan angka riil. Data tahun 2012 merupakan anggaran bukan realisasi

## 4.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 5,7 persen. Alokasi terbesar belanja daerah diperuntukkan bagi belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai yang sudah melebihi 50 persen dari total belanja daerah, mengindikasikan struktur belanja daerah yang kurang seimbang. Kondisi yang sama untuk klasifikasi sektor, terdapat kecenderungan porsi belanja yang kurang berimbang. Porsi belanja untuk sektor infrastruktur dan kesehatan masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor pemerintahan umum.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan re-konfigurasi struktur belanja dengan menurunkan secara bertahap proporsi belanja pegawai dan meningkatkan proporsi belanja modal. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain dengan (i) mengevaluasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan serta menyesuaikan dengan kemampuan anggarannya (ii) melakukan moratorium penerimaan pegawai, dan (iii) tidak memperpanjang masa pension, (iv) meningkatkan porsi belanja untuk sektor-sektor strategis lainnya secara bertahap seperti sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur.



# Bab 5

## Sektor-sektor Strategis

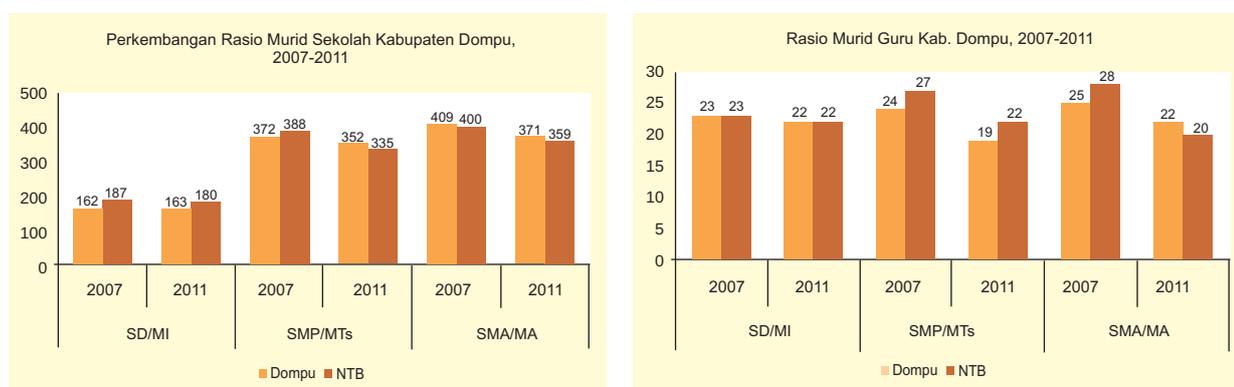
## 5.1 Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan mendapat prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2011-2015, tertuang dalam misi ketiga yakni meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu juga telah menetapkan visi yakni *“Terwujudnya Insan yang Cerdas, Kompetitif, Demokratis dan Religius, Bertumpu Pada Kualitas Kekhususan, dan Potensi Daerah yang Dilandasi Semangat Nggahi Rawi Pahu “* dalam Dokumen Rencana Pendidikan Dikdasmen

### 5.1.1 Indikator Output dan Outcome

**Rasio murid-sekolah (RMS) dan rasio murid-guru (RMG) untuk jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah di Kabupaten Dompu menunjukkan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2007-2011.** Pada tahun 2007, setiap SD di Dompu menampung murid rata-rata 162 orang dengan RMG sebesar 23. Sedangkan, jenjang pendidikan SMP/MTs menampung murid rata-rata 372 orang dengan RMG sebesar 24 dan setiap SMA/MA mampu menampung murid rata-rata 409 orang dengan RMG 25. Pada periode ini, hanya RMS jenjang pendidikan SMA/MA Dompu berada di atas rata-rata Provinsi NTB. Sementara, RMG semua jenjang pendidikan berada di bawah rata-rata Provinsi NTB. Pada tahun 2011, RMS Dompu sedikit meningkat menjadi 163 orang dengan RMG justru menurun menjadi 22. RMS jenjang SMP/MTs sendiri cenderung meningkat hingga 409 orang dengan RMG menurun menjadi 19. Pada jenjang pendidikan SMA/MA, RMS dan RMG menurun masing-masing 371 orang dan 22 orang. Secara umum, kinerja pembangunan pendidikan Dompu memperlihatkan peningkatan khususnya pada jenjang pendidikan dasar selama kurun waktu 2007-2011, sebaliknya pendidikan menengah cenderung mengalami penurunan.

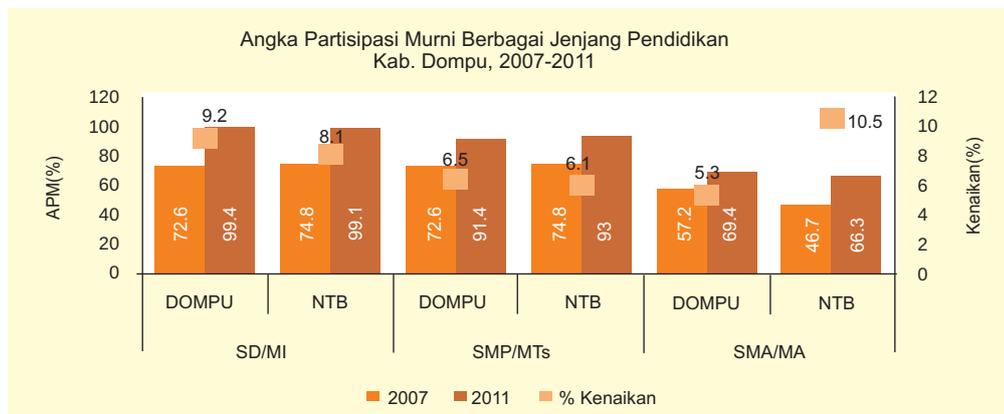
Gambar 5.1. Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru, Dompu 2007 dan 2011



Sumber: BPS, NTB dalam Angka 2008-2012

**Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan pada periode 2007-2011.** Dalam periode tersebut, APM meningkat dengan rata-rata 9,2 persen untuk SD/MI dan 6,5 persen untuk SMP/MTs serta 5,3 persen pada jenjang SMA/MA. APM pada jenjang pendidikan SMP/MI dan SMP/MTs Kabupaten Dompu lebih tinggi daripada APM Provinsi NTB. Sedangkan, APM SMA/MA masih lebih rendah dari APM provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, APM SD/MI dan SMP/MTs lebih tinggi daripada Lombok Barat dan Lombok Utara namun masih rendah dibandingkan Bima. Sementara, APM SMA/MA berada pada posisi terendah bersama Lombok Utara dibandingkan Lombok Barat dan Bima.

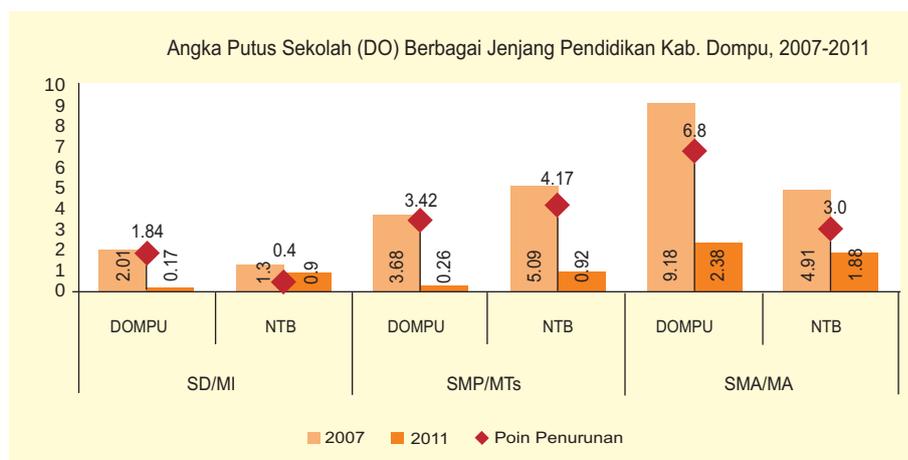
Gambar 5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) 2007 dan 2011



Sumber: Dikpora NTB dan Kabupaten, 2007-2011.

**Angka putus sekolah (DO) di Dompu menurun secara nyata pada semua jenjang pendidikan dengan laju penurunan jauh di atas rata-rata provinsi.** Dalam periode 2007-2011, angka DO di Kabupaten Dompu rata-rata menurun 128,6 persen untuk jenjang SD/MI dan 169,5 persen untuk jenjang SMP/MTs serta 58,5 persen untuk jenjang SMA/MA. Dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya, Kabupaten Dompu memiliki laju penurunan DO tertinggi kedua untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Sementara itu, laju penurunan angka DO pada jenjang pendidikan SMA/MA menempati posisi terendah.

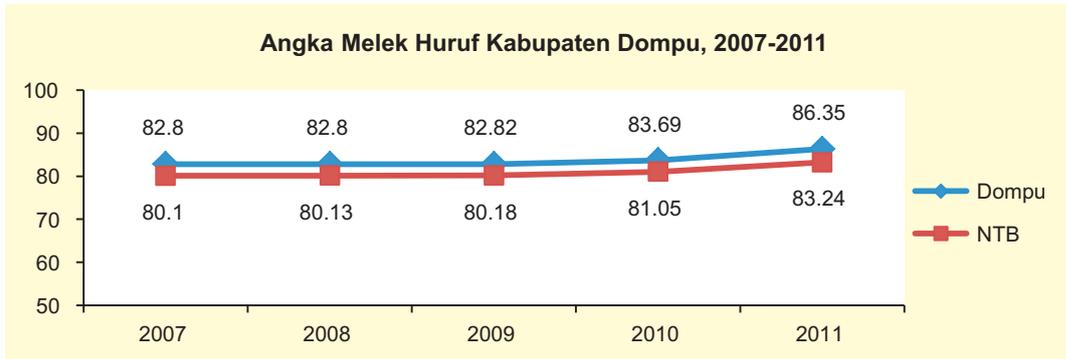
Gambar 5.3. Angka Putus Sekolah (DO) 2007-2011



Sumber: Dikpora NTB dan Kabupaten, 2007-2011.

**Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Dompu mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun 2007 ke tahun 2011 dengan laju peningkatan per tahun di atas rata-rata Provinsi NTB.** Pada tahun 2007, AMH sebesar 82,8 point meningkat menjadi 86,35 poin pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 3,55 poin dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,89 persen per tahun. Peningkatan tersebut, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 3,14 poin dengan laju pertumbuhan 0.79 persen per tahun. Peningkatan angka melek huruf di Dompu ini lebih cepat dibandingkan dengan Bima namun masih lebih lamban dibandingkan Lombok Barat dan Lombok Utara

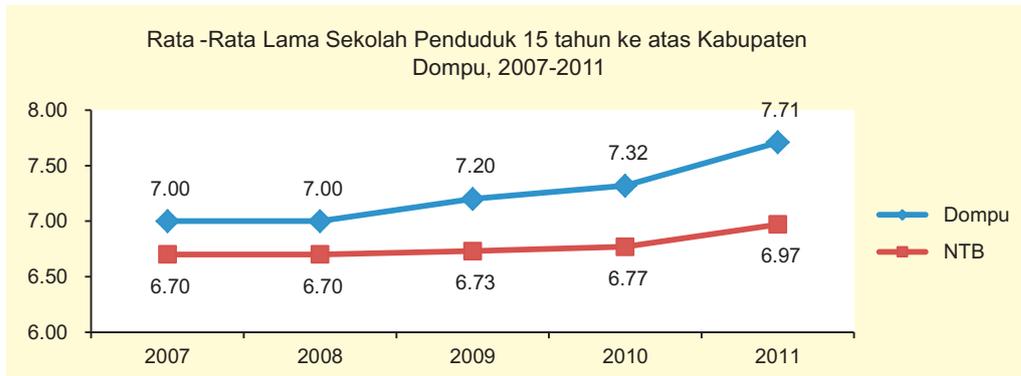
Gambar 5.4. Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas



Sumber: BPS NTB 2012.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Dompu masih rendah meskipun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir dengan persentase peningkatan di atas rata-rata Provinsi NTB. Pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dompu 7.71 tahun atau sudah menempuh pendidikan SMP/MTs. Angka ini di atas rata-rata Provinsi (6.97 tahun) dan paling tinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya. Selama periode waktu 2007-2011, rata-rata lama sekolah hanya meningkat 0,7 tahun atau naik rata-rata 2,5 persen per tahun. Rata-rata persentase peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (1,0 %) serta Bima (0,5 %) dan Lombok Barat (1,9 %) namun jauh lebih rendah dibandingkan Lombok Utara (6,6 %).

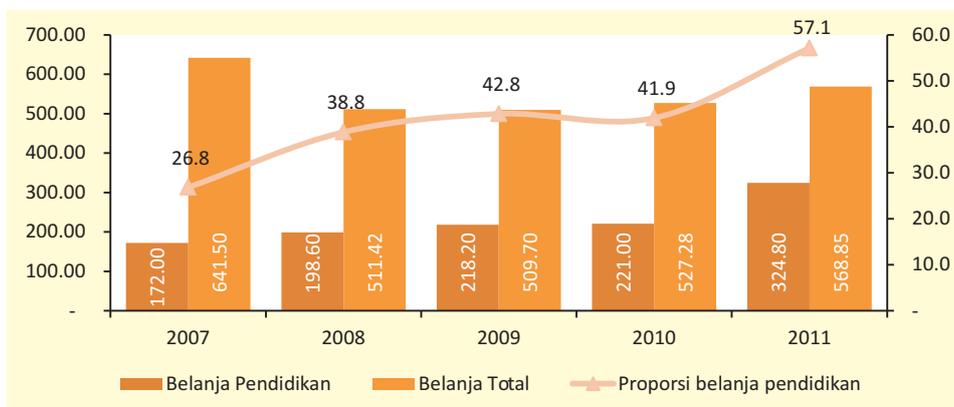
Gambar 5.5. Rata-rata lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas



### 5.1.2 Belanja Sektor Pendidikan

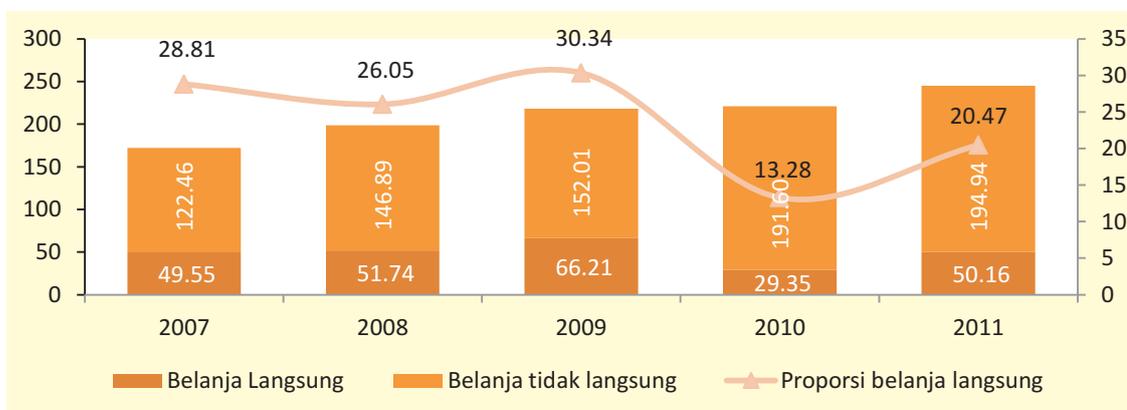
Proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Dompu rata-rata 41,8 persen per tahun dalam kurun waktu 2007-2011. Pada tahun 2007, belanja pendidikan sebesar Rp 172 milyar meningkat dua kali lipat menjadi Rp 324,8 milyar di tahun 2011 atau meningkat dengan rata-rata 18,39 persen per tahun. Pada tahun 2011, peningkatan belanja pendidikan cukup drastis mencapai 46,97 persen dari tahun 2010 (1,37 persen). Posisi relative proporsi belanja pendidikan Kabupaten Dompu dalam 5 tahun terakhir lebih rendah dibandingkan Bima dan masih lebih tinggi dari dua kabupaten lainnya.

Gambar 5.6. Belanja Sektor Pendidikan dan Proporsi terhadap Belanja Total



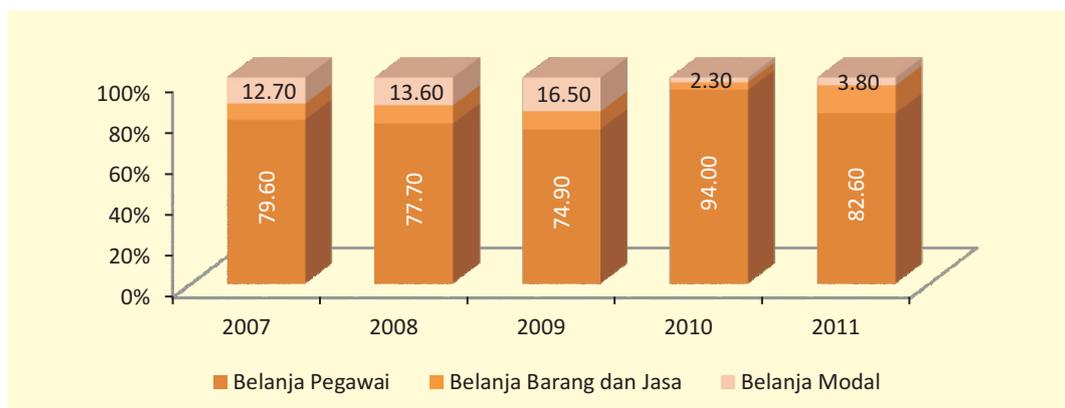
**Belanja sektor pendidikan secara konsisten didominasi oleh belanja tidak langsung dalam kurun waktu 2007-2011.** Pada tahun 2007, belanja tidak langsung 122,46 milyar meningkat setiap tahun hingga mencapai 194,94 milyar pada tahun 2011 atau bertumbuh dengan rata-rata 12,8 per tahun. Sementara dana yang teralokasi untuk belanja langsung sektor pendidikan sebesar Rp 49,55 milyar (2007), menurun menjadi Rp 29,35 milyar di tahun 2010 dan meningkat kembali menjadi Rp 50,16 Milyar di tahun 2011. Kondisi ini menggambarkan bahwa belanja untuk pembayaran gaji pegawai negeri (belanja tidak langsung) jauh diatas dari belanja program utama (belanja langsung) sektor pendidikan. Secara rata-rata proporsi belanja langsung terhadap belanja total di Dompu mencapai 23,8 persen per tahun dengan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 4,94 persen.

Gambar 5.7. Proporsi Belanja Langsung Sektor Pendidikan Kabupaten Dompu



**Belanja langsung sektor pendidikan Kabupaten Dompu didominasi oleh belanja pegawai dalam lima tahun terakhir.** Proporsi belanja pegawai terhadap belanja langsung sektor pendidikan di Kabupaten Dompu rata-rata 81,76 persen dan cenderung fluktuatif selama periode 2007-2011. Proporsi belanja modal terhadap belanja pendidikan rata-rata 9,78 persen dan menunjukkan kecenderungan penurunan dalam periode yang sama. Dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya, rata-rata proporsi belanja modal Kabupaten Dompu paling rendah dalam dua tahun terakhir (Lampiran 5.1.1). Proporsi belanja barang dan jasa sektor pendidikan Dompu berfluktuasi dari yang terendah 3,7 persen hingga tertinggi 13,6 persen dengan rata-rata 8.48 persen per tahun.

Gambar 5.8. Proporsi Belanja Sektor Pendidikan Menurut Klasifikasi Ekonomi, Dompu



**Belanja program sektor pendidikan Kabupaten Dompu lebih besar dialokasikan untuk membiayai program wajib belajar sembilan tahun selama kurun waktu 2007-2011.** Pelaksanaan program WAJAR 9 tahun menghabiskan anggaran dengan proporsi 43,79 dari total belanja langsung selama lima tahun. Program lainnya dengan proporsi pembiayaan lebih rendah adalah Dikpora Kecamatan Bidang Pendidikan (11,57 %), pelayanan administrasi perkantoran (10,21 %), program pendidikan menengah (7,32 %), peningkatan sarana dan prasarana olahraga (4,41 %), peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1,63 %) dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (1,19 %). Tingginya proporsi belanja program wajib belajar sembilan tahun telah memberikan pengaruh positif terhadap akselerasi kenaikan Angka Partisipasi Murni dan penurunan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sebaliknya, masih rendahnya proporsi belanja program pendidikan menengah berpengaruh pada lambannya pencapaian APM SMA/MA dibandingkan kabupaten lainnya.

### 5.1.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

**Dari tahun ke tahun, nilai riil dan proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Dompu mengalami peningkatan, namun sebagian besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai).** Proporsi belanja langsung dalam lima tahun terakhir rata-rata 23,79 persen per tahun dan menunjukkan kecenderungan penurunan rata-rata 4,94 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir. Proporsi belanja modal terhadap belanja urusan pendidikan berfluktuasi dari 2,3 persen hingga 13,60 persen dengan rata-rata 9,78 persen. Proporsi belanja barang dan jasa sektor pendidikan Dompu berfluktuasi dari yang terendah 3,7 persen hingga tertinggi 13,6 persen dengan rata-rata 8,48 persen.

**Dalam periode 2007-2011 terjadi peningkatan indikator pendidikan di Dompu, namun berjalan relatif lamban sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah indikator output dan outcome.** Lambannya peningkatan derajat pendidikan ini disebabkan oleh masih rendahnya proporsi belanja modal. Untuk itu, proporsi belanja modal semestinya diperbesar dan belanja program dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan hendaknya lebih diperhatikan di masa mendatang.

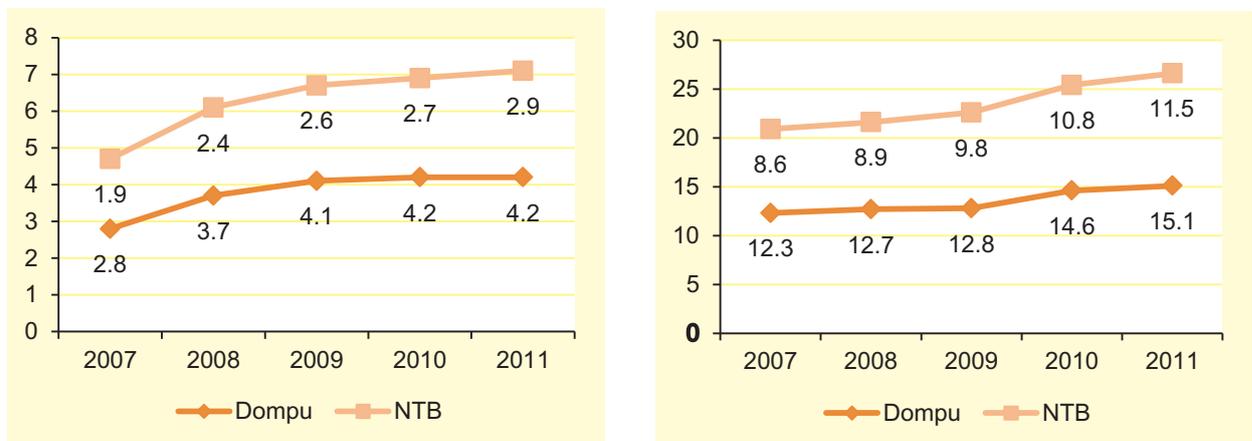
**Besarnya proporsi belanja program wajib belajar sembilan tahun telah memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan Angka Partisipasi Murni dan penurunan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan dasar.** Sebaliknya, proporsi belanja program pendidikan menengah memiliki kontribusi bagi lambannya akselerasi Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMA/MA. Karena itu, proporsi belanja untuk pendidikan menengah perlu ditingkatkan sehingga kinerja pencapaian APMD jenjang ini minimal sama dengan rata-rata Propinsi NTB. Selain itu, upaya yang lebih keras untuk meningkatkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas masih diperlukan melalui program pemberantasan buta aksara melalui jalur pendidikan non-formal.

## 5.2 Sektor Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan sektor kesehatan. Perhatian yang besar tersebut diwujudkan dengan memasukkan sektor kesehatan kedalam rumusan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2014. Penjabaran misi tersebut tertuang dalam Program Pembangunan Kesehatan sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011 – 2015. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Dompu yang sehat dan cerdas maka pemerintah daerah mencanangkan sembilan pokok program yang terdiri (1) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, (2) Upaya Kesehatan Masyarakat, (3) Upaya Kesehatan Perorangan, (4) Perbaikan Gizi Masyarakat, (5) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, (6) Lingkungan Sehat, (7) Obat dan Perbekalan Kesehatan, (8) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, dan (9) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

**Rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 penduduk di Kabupaten Dompu terus meningkat dengan peningkatan yang makin menurun selama kurun waktu 2007-2011.** Pada tahun 2007-2008 terjadi peningkatan rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 penduduk sebesar 0.9 dan merupakan peningkatan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Di tahun-tahun berikutnya peningkatan yang terjadi justru semakin kecil hingga pada tahun 2010-2011 rasio fasilitas kesehatan tidak mengalami peningkatan. Walaupun demikian, dibandingkan dengan kabupaten lainnya rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 penduduk di Kabupaten Dompu adalah yang tertinggi diantara kabupaten dalam studi dan juga lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB (Lampiran 5.2.1). Berbeda dengan fasilitas kesehatan, rasio tenaga kesehatan terhadap 10.000 penduduk mengalami peningkatan secara konsisten selama periode waktu yang sama. Meskipun rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk di Kabupaten Dompu terus meningkat tetapi pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 5,4 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 7,6 persen.

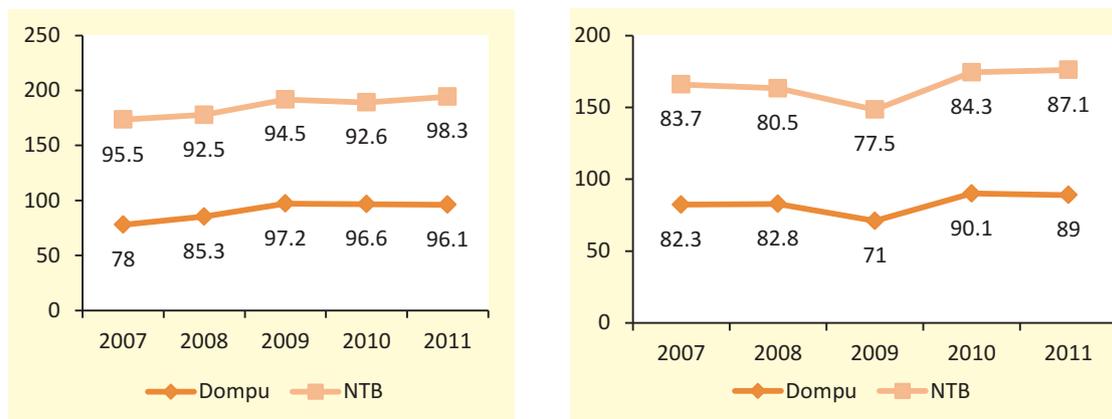
**Gambar 5.9. Rasio Fasilitas Kesehatan Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk**



Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Prov NTB 2007-2011 diolah

**Perawatan antenatal (K1 dan K4) di Kabupaten Dompu selama periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,3 persen per tahun.** Persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal pertama (K1) meningkat dari 78 persen tahun 2007 menjadi 96,6 persen tahun 2010 kemudian turun menjadi 96,1 persen tahun 2011. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2011, secara rata-rata proporsi kunjungan K1 meningkat sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, kunjungan antenatal ke-empat (K4) juga menunjukkan kecenderungan yang sama dengan K1 dalam periode yang sama tetapi dengan peningkatan rata-rata yang lebih rendah sebesar 3 persen per tahun. Dibandingkan dengan provinsi, rata-rata peningkatan kunjungan K1 dan K4 di Kabupaten Dompu lebih tinggi karena peningkatan K1 dan K4 di provinsi hanya sebesar 0,8 persen dan 1,1 persen namun lebih rendah dari kabupaten Lombok Utara dan kabupaten Bima.

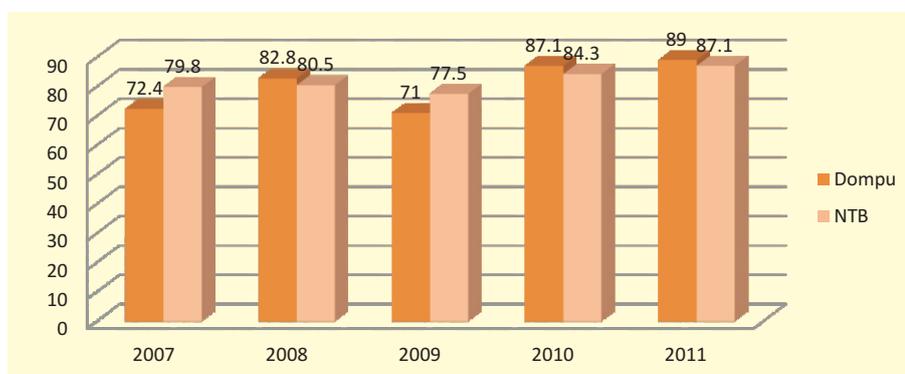
Gambar 5.10. Proporsi Perawatan Antenatal (K1, K4)



Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011 diolah

**Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi.** Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu meningkat dari 72,4 persen tahun 2007 menjadi 89,0 persen tahun 2011, atau meningkat dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun. Ini mengindikasikan tingkat kesadaran ibu hamil meningkat dan didukung oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup. Dalam kurun waktu 2007-2011 laju peningkatan rata-rata Kabupaten Dompu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang hanya sebesar 2,3 persen. Selain itu, proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu pada tahun 2011 adalah tertinggi diantara kabupaten lainnya dalam studi dan juga lebih tinggi dari rata-rata provinsi (lampiran 5.2.3).

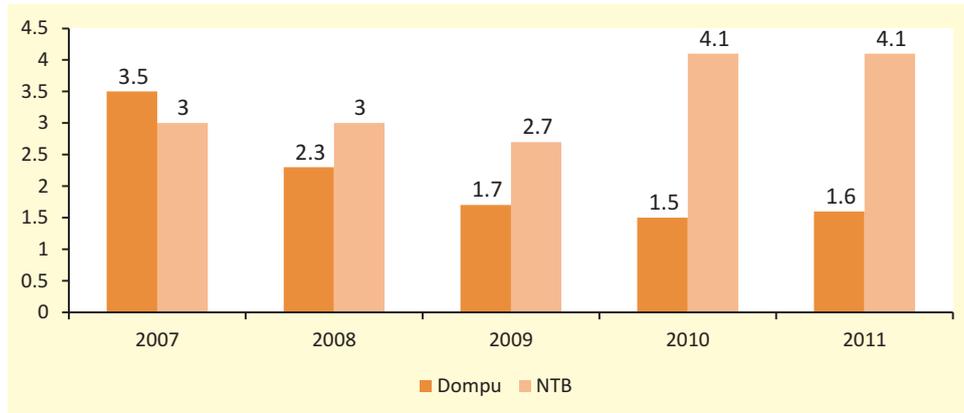
Gambar 5.11. Proporsi Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan



Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011 diolah.

**Dalam kurun waktur 2007-2011, persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Dompu cenderung menurun.** Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2007-2009 dimana persentase bayi dengan BBLR turun dari 3,5 persen menjadi 2,3 persen. Persentase bayi dengan BBLR terus mengalami penurunan hingga 2010, tetapi pada tahun 2011 angkanya meningkat sebesar 0.1 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan kabupaten lain yang masuk dalam studi, persentase bayi dengan BBLR di Kabupaten Dompu adalah yang terendah sebesar 1,5 persen pada tahun 2010 (Lampiran 5.2.4). Selain itu, rata-rata penurunan persentase bayi dengan BBLR di Kabupaten Dompu adalah yang tertinggi yaitu 16,4 persen per tahun, sementara ditingkat provinsi rata-rata angka BBLR justru mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun.

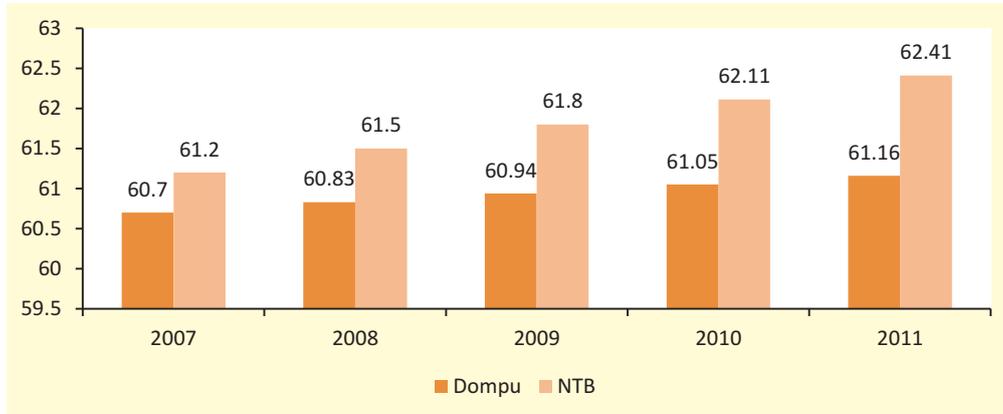
Gambar 5.12. Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah



Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011

Selama kurun waktu 2007-2011, angka harapan hidup di Kabupaten Dompu cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata yang rendah. Angka harapan hidup di Kabupaten Dompu meningkat dari 60,70 tahun pada tahun 2007 menjadi 61,16 pada tahun 2011. Angka harapan hidup di Kabupaten Dompu lebih tinggi dari kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat tetapi pertumbuhan rata-rata per tahun lebih rendah yaitu hanya 0,19 persen sementara kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat berturut-turut sebesar 0,63 persen dan 0,72 persen. Angka harapan hidup di Kabupaten Dompu masih lebih rendah daripada kabupaten Bima dan rata-rata provinsi (Lampiran 5.2.5). Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan angka harapan hidup rata-rata provinsi dan kabupaten Bima lebih tinggi dari Kabupaten Dompu yaitu sebesar masing-masing 0,5 persen.

Gambar 5.13. Angka Harapan Hidup, 2007-2011



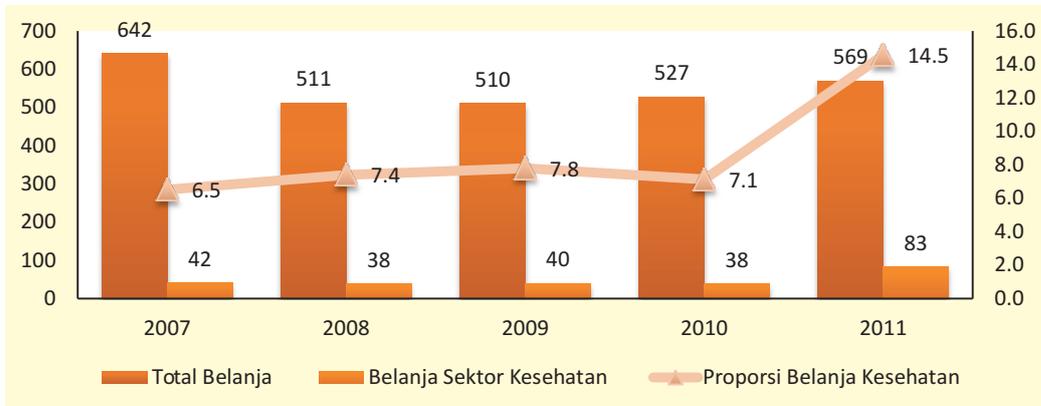
Sumber: BPS, NTB 2012

Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) tidak dibahas dalam laporan ini karena data yang tersedia di Dinas Kesehatan merupakan data berbasis fasilitas sehingga angkanya sangat rendah (*under-estimate*). Sebagai contoh, AKB di provinsi NTB tahun 2010 menurut data Dinas Kesehatan Provinsi NTB tercatat 14 per 1000 kelahiran hidup, sementara AKB menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan 48 per 1000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan AKI, data Dinas Kesehatan tahun 2007 mencatat 15 per 100.000 kelahiran hidup sementara data SDKI 2007 menunjukkan 370 per 100.000 kelahiran hidup.

## 5.2.1 Belanja Kesehatan

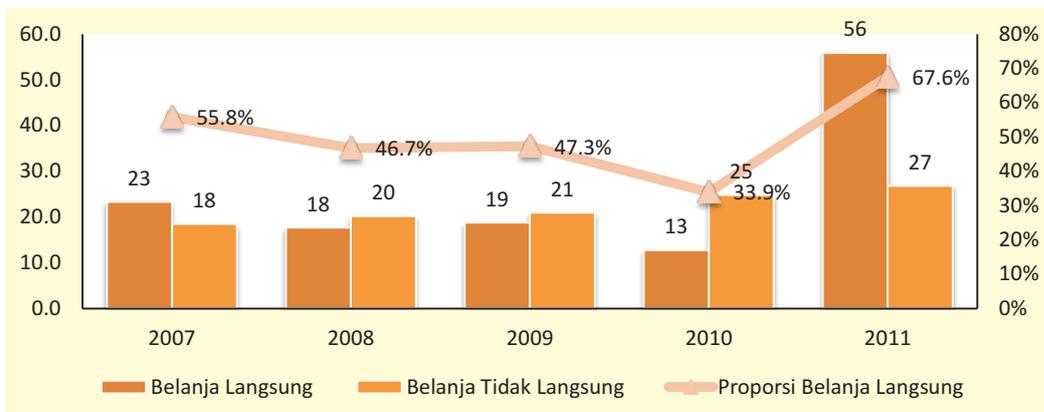
Dalam kurun waktu 2007-2011 proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Dompu masih relatif kecil tetapi cenderung meningkat. Peningkatan proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah yang terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu meningkat dari 7,1 persen pada tahun 2010 menjadi 14,5 persen pada tahun 2011. Sementara itu, sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 proporsi belanja sektor kesehatan berkisar antara 6,5 persen hingga 7,8 persen dengan total belanja sebesar Rp 38 milyar hingga Rp 42 milyar. Dengan meningkatnya proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja menjadi 14,5 persen maka belanja sektor kesehatan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja sebesar 14,5 persen merupakan proporsi terbesar diantara kabupaten lain dalam studi pada tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu memberikan perhatian yang semakin besar terhadap sektor kesehatan.

Gambar 5.14. Proporsi Belanja Sektor Kesehatan



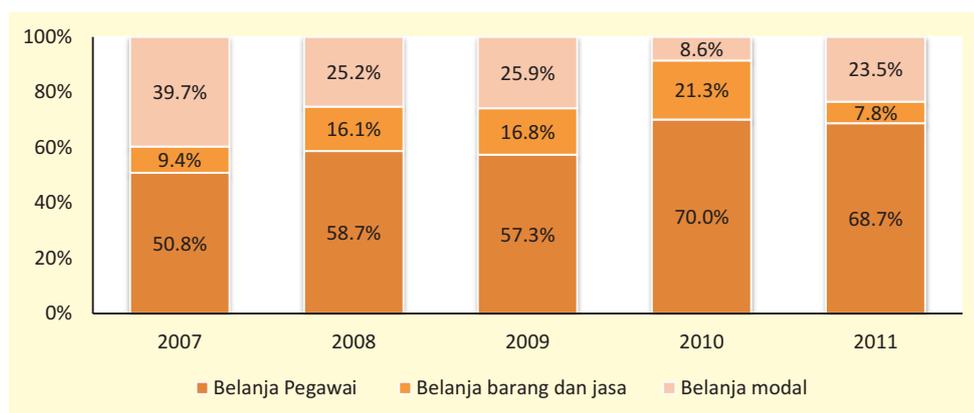
Proporsi belanja langsung sektor kesehatan di Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007-2011 rata-rata 50,3 persen dengan kecenderungan fluktuatif. Proporsi belanja langsung tertinggi sebesar 67,6 persen terjadi pada tahun 2011, sedangkan proporsi terendah sebesar 33,9 persen terjadi pada tahun 2010. Sementara itu, proporsi belanja langsung sektor kesehatan selama tahun 2007-2009 berkisar antara 55,8 persen hingga 46,7 persen. Dengan proporsi sebesar 67,6 persen, maka total belanja langsung menjadi Rp 56 milyar meningkat dari hanya Rp 13 milyar pada tahun 2010. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa perhatian pemerintah daerah Kabupaten Dompu terhadap sektor kesehatan semakin besar.

Gambar 5.15. Proporsi Belanja Langsung Sektor Kesehatan Kabupaten Dompu



Dalam lima tahun terakhir, belanja sektor kesehatan di Kabupaten Dompu didominasi oleh belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap belanja sektor kesehatan di Kabupaten Dompu rata-rata 61,1 persen dan cenderung fluktuatif selama periode 2007-2011. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja modal terhadap belanja kesehatan adalah 24,6 persen dengan proporsi terendah sebesar 8,6 persen dan tertinggi sebesar 39,7 persen. Sementara itu, proporsi belanja barang dan jasa sektor kesehatan rata-rata sebesar 14,3 persen dengan kecenderungan berfluktuasi dari terendah 7,8 persen hingga tertinggi 21,3 persen. Komposisi alokasi belanja seperti ini menunjukkan bahwa dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan pemerintah Kabupaten Dompu belum memiliki skala prioritas yang jelas dalam membangun sektor kesehatan sehingga alokasi anggaran tidak dilakukan dengan pola yang jelas atau dengan kata lain cenderung sporadis.

Gambar 5.16. Proporsi Belanja Sektor Kesehatan Menurut Klasifikasi Ekonomi, Kabupaten Dompu



Belanja sektor kesehatan Kabupaten Dompu selama periode 2007-2011 masih didominasi oleh program yang berkaitan dengan kebutuhan institusi kesehatan. Program seperti pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Pustu, program pelayanan administrasi perkantoran, dan program obat dan perbekalan kesehatan mengambil porsi anggaran yang dominan lebih dari dua per tiga proporsi anggaran. Program upaya kesehatan masyarakat memperoleh proporsi anggaran rata-rata sebesar 7,7 persen. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar 1,4 persen, dan program pelayanan kesehatan lansia dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar 0,04 persen dan 0,27 persen. Sementara itu, program pelayanan kesehatan penduduk miskin dan program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita bahkan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa pola pikir para penyelenggara pelayanan kesehatan masih menganggap bahwa persoalan kesehatan merupakan persoalan persoalan teknis medis, padahal sejatinya persoalan kesehatan masyarakat lebih berdimensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan perkembangan indikator status kesehatan masyarakat di Kabupaten Dompu menjadi lambat.

## 5.2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi

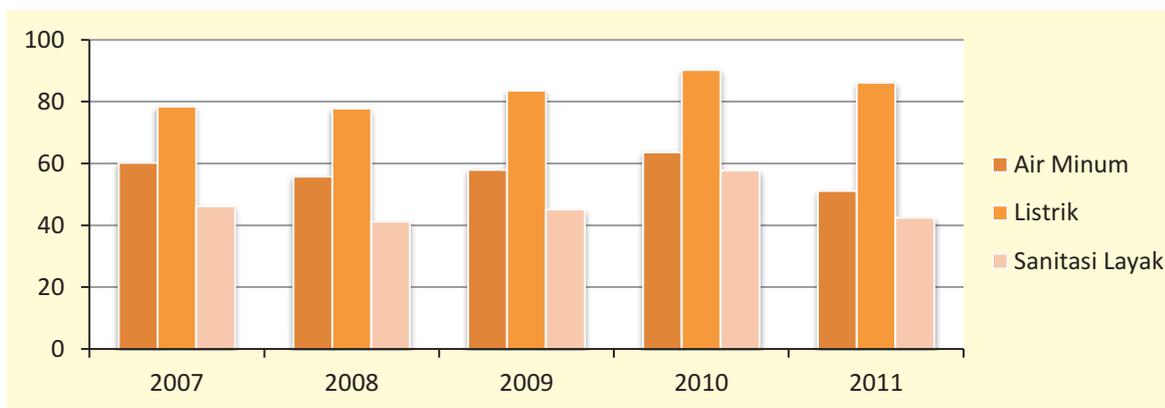
Indikator status kesehatan masyarakat Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan yang relatif lamban seperti tercermin dari indikator baik output (luaran) maupun outcome (hasil). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lamban disebabkan oleh cara pandang pemerintah dan aparat kesehatan terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang keliru. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja daerah kepada sektor kesehatan dimana sebagian besar anggaran ditujukan untuk aspek yang berkaitan dengan kebutuhan institusi kesehatan (*supply side*). Padahal sejatinya, persoalan kesehatan masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan hanya memperhatikan aspek teknis kesehatan (medis) tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Jika ingin mempercepat perkembangan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka program-program seperti promosi kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penduduk miskin, dan kesehatan lingkungan harus memperoleh perhatian yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program dimaksud harus ditingkatkan dan menjadi program prioritas.

## 5.3 Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah masih menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dompu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki misi “Melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kota yang indah, nyaman dan mempesona serta lingkungan yang lestari.” Misi ini dinyatakan sebagai misi keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2011- 2015. Bagian ini membahas output/outcome dan belanja daerah untuk sektor infrastruktur dasar, meliputi : infrastruktur dasar perumahan dan jalan.

### 5.3.1 Infrastruktur Dasar Perumahan

Gambar 5.17. Proporsi Akses Rumah Tangga Terhadap Infrastruktur Dasar Perumahan di Kabupaten Dompu, 2007-2011.



Sumber : Data Susenas (2007- 2011) diolah.

**Dalam periode 2007- 2011, akses Rumah Tangga (RT) terhadap air minum layak di Kabupaten Dompu, relatif tinggi namun cenderung pluktuatif.** Proporsi RT yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat dari 60,17 persen pada tahun 2007 menjadi 63,58 persen pada tahun 2010, dan turun menjadi 51,10 persen tahun 2011. Proporsi RT terhadap air minum layak di Kabupaten Dompu adalah tertinggi ke dua setelah kabupaten Bima dari 4 kabupaten wilayah studi dan berada di atas rata- rata provinsi, (lampiran 5.3.1).

**Akses RT terhadap listrik relatif tinggi dan cenderung meningkat dalam periode 2007-2011.** Proporsi RT terhadap listrik meningkat dari 78,42 persen pada tahun 2007 menjadi 86,1 persen pada tahun 2011. Proporsi RT terhadap listrik di Kabupaten Dompu adalah terendah ke dua setelah KLU dari 4 kabupaten wilayah studi dan masih di bawah rata- rata provinsi.

**Berbeda dengan akses RT terhadap air minum layak dan listrik, akses RT terhadap sanitasi layak adalah relatif rendah dan cenderung menurun dalam periode 2007-2011.** Proporsi RT terhadap sanitasi layak di Kabupaten Dompu menurun dari 46,19 persen pada tahun 2007 menjadi 42,5 persen pada tahun 2011. Walaupun masih di bawah rata- rata provinsi, dibandingkan dengan tiga kabupaten lain yang diteliti, proporsi RT terhadap sanitasi layak di Kabupaten Dompu adalah tertinggi kedua setelah kabupaten Bima.

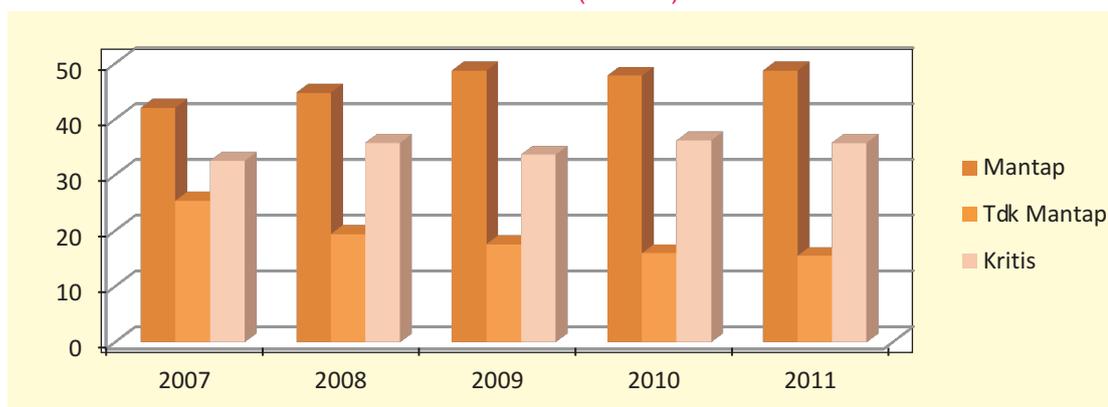
### 5.3.2 Infrastruktur Jalan

**Pada tahun 2011, panjang jalan di Kabupaten Dompu adalah 834 km, bertambah 13,17 km (1,6 persen), dari 820.83 km pada tahun 2007. Sebagian besar dari panjang jalan tersebut merupakan jalan pemerintah kabupaten dan lebih dari separuhnya (57,32 persen) permukaannya belum diaspal.** Berdasarkan pemerintah penanggung jawabnya, panjang jalan tersebut, terdiri atas: jalan kabupaten sepanjang 543,51 km (65,17 persen), jalan propinsi 216,36 km (25,94 persen) dan jalan negara sepanjang

74,13 km (8,89 persen). Berdasarkan jenis permukaannya, terdiri atas: jalan berpermukaan asfalt sepanjang 490,93 km (58,86 persen), berpermukaan krikil 166,46 (19,96 persen) dan jalan berpermukaan tanah sepanjang 176,61 km atau 21,18 persen (lampiran 5.3.2)

**Kualitas jalan berdasarkan tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Dompu, relatif rendah, meskipun terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2007-2011.** Jalan dalam kategori mantap meningkat dari 42,07 persen pada tahun 2007 menjadi 48,73 persen pada tahun 2011, tapi jalan dalam kategori kritis juga meningkat dari 32,53 persen menjadi 35,78 persen. Sementara jalan dalam kategori tidak mantap turun dari 25,40 persen menjadi 15,49 persen, dalam periode yang sama. Rata-rata tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007- 2011 adalah 46,43 persen, terendah kedua dari 4 kabupaten wilayah studi (lampiran 3.5.2).

Gambar 5.18. Kualitas Jalan Berdasarkan Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Dompu, 2007-2011 (Persen).



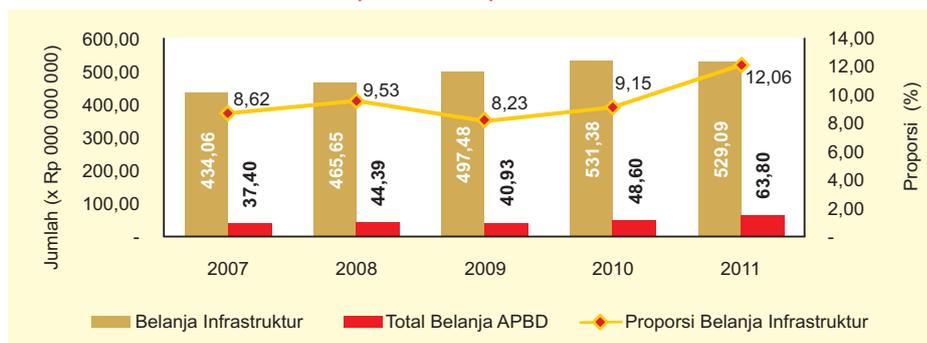
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum pada 4 kabupaten di Provinsi NTB diolah.

**Aksesibilitas dan mobilitas jalan Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori baik. Pada tahun 2011,** indeks aksesibilitas jalan di Kabupaten Dompu adalah 0.36, lebih tinggi dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 0.05. Indeks mobilitas jalan Kabupaten Dompu yang sebesar 3,77 adalah juga berada di atas SPM yang sebesar 2,00 (lampiran 5.3.4).

### 5.3.3 Analisis Belanja Infrastruktur Daerah

Belanja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu adalah rata-rata 9.52 persen dari total belanja daerah, dengan tren meningkat dalam periode 2007-2011. Belanja infrastruktur naik dari Rp.37,40 miliar (8,62 persen) pada tahun 2007 menjadi Rp.63,80 miliar (12,06 persen) tahun 2011. Peningkatan belanja infrastruktur ini telah berdampak terhadap peningkatan kinerja sector infrastruktur di Kabupaten Dompu.

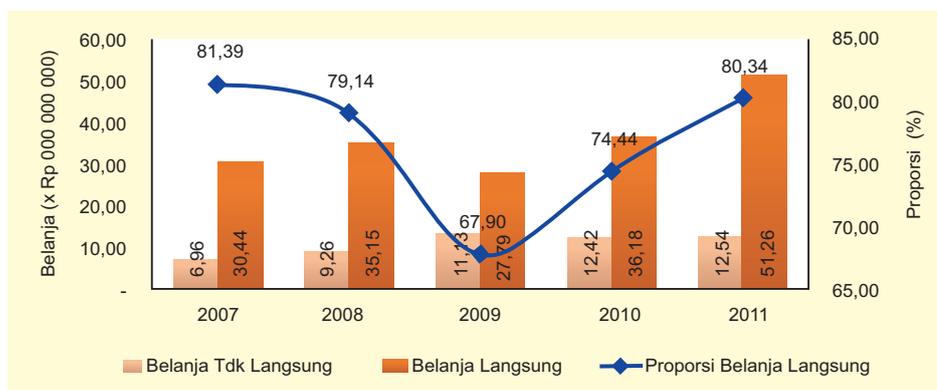
Gambar 5.19. Proporsi Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Dompu, 2007-2011



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja langsung tetap mendominasi belanja infrastruktur Kabupaten Dompu, meski mengalami penurunan dalam kurun waktu 2007- 2011.** Proporsi belanja langsung menurun dari 81,39 persen pada tahun 2007 menjadi 80,34 persen pada tahun 2011, sebaliknya proporsi belanja tidak langsung meningkat dari 18,61 persen pada tahun 2007 menjadi 19,66 persen tahun 2011.

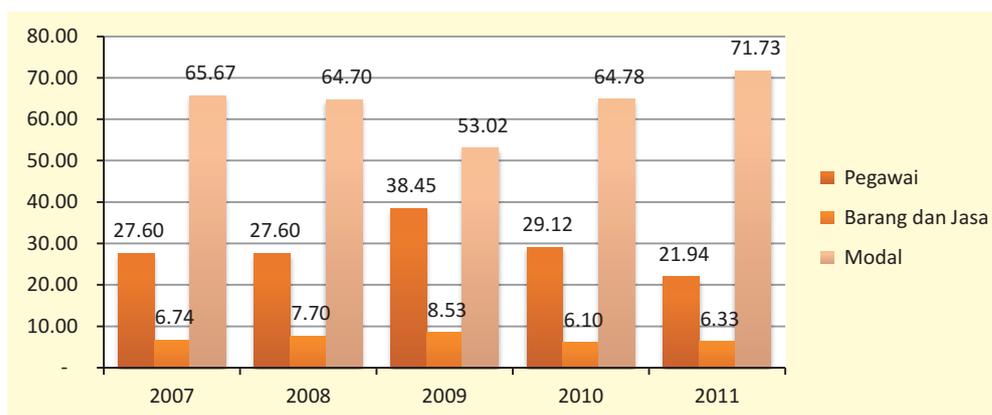
**Gambar 5.20. Proporsi Belanja Sektor Infrastruktur Klasifikasi Langsung/Tidak Langsung Kabupaten Dompu, 2007-2011**



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja modal mendominasi belanja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu, dengan tren meningkat dalam lima tahun terakhir.** Proporsi belanja modal terhadap belanja infrastruktur meningkat dari 65,67 persen pada tahun 2007 menjadi 71,73 persen pada tahun 2011. Sementara proporsi belanja pegawai menurun dari 27,60 persen menjadi 21,94 persen, sementara proporsi belanja barang dan jasa juga menurun dari 6,74 persen menjadi 6,10 persen pada periode yang sama.

**Gambar 5.21. Belanja Infrastruktur Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Dompu, 2007-2011 (persen)**



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja program sektor infrastruktur Kabupaten Dompu didominasi oleh program-program yang memiliki implikasi langsung pada peningkatan infrastruktur dasar, dalam periode 2007-2011.** Program-program tersebut adalah program pemeliharaan jalan dan jembatan, program pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya, dan program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah. Program pertama dan kedua menyerap 59,71 persen dari total belanja program sektor infrastruktur Kabupaten Dompu sebesar 173.32 miliar, dalam periode 2007-2011. Program ketiga dan keempat, masing-masing, menyerap 14,82 persen dan 5,89 persen dari total belanja program infrastruktur Kabupaten Dompu dalam periode yang sama.

## 5.3.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

Kinerja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007- 2011, secara umum relatif kurang baik. Meskipun indeks aksesibilitas jalan dan mobilitas jalan di atas Standar Pelayanan Minimum, kualitas jalan yang ditunjukkan oleh tingkat kemantapan jalan masih di bawah 50 persen. Demikian juga dengan aksesibilitas RT terhadap infrastruktur dasar perumahan juga relatif rendah (sanitasi layak masih di bawah 50 persen) kecuali terhadap air minum layak. Untuk meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas RT terhadap sanitasi layak yang masih relatif rendah, maka ke depan pemda Kabupaten Dompu perlu lebih meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas RT terhadap sanitasi layak dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih proporsional terhadap program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan sanitasi layak atau merealokasi anggaran untuk program pembangunan jalan yang selama ini cukup besar ke program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan infrastruktur dasar perumahan yang terkait dengan sanitasi layak.

## 5.4 Sektor Pertanian

**Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Dompu.** Dalam periode 2007-2010, sektor pertanian memberi kontribusi rata-rata 39 persen terhadap PDRB, dan 31 persen terhadap kesempatan kerja Kabupaten Dompu. Meskipun laju pertumbuhan sektor pertanian sangat rendah namun sector ini menjadi sumber pertumbuhan yang strategis bagi perekonomian Kabupaten Dompu seperti yang telah dipaparkan dalam Bab I. Karenanya, pembangunan sektor pertanian memberi dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Dalam periode 2007-2011, pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Dompu terfokus pada empat komoditas unggulan daerah.** Keempat komoditas unggulan daerah tersebut adalah jagung, rumput laut, jambu mete, dan sapi. Sapi, jagung, dan rumput laut (PIJAR) juga merupakan komoditas unggulan propinsi NTB.

Bagian ini akan membahas perkembangan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan belanja daerah untuk sektor pertanian dalam periode 2007-2011.

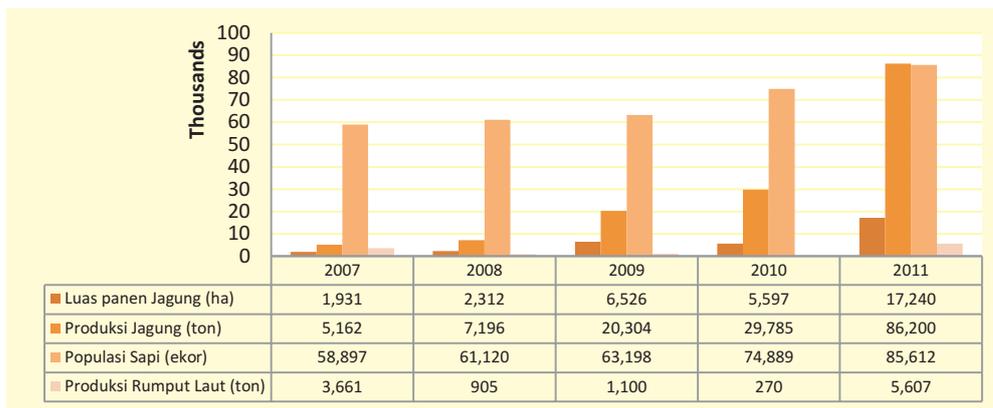
### 5.4.1 Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah

**Indikator kinerja keluaran yang digunakan untuk membahas capaian sektor pertanian dalam laporan ini meliputi luas panen, produksi tanaman, dan populasi ternak (sapi), sementara indikator hasil yang dibahas adalah produktivitas tanaman pangan (jagung dan jambu mete) dan komoditas unggulan sub sektor perikanan khususnya garam.**

**Produksi dan produktivitas jagung di Kabupaten Dompu meningkat pesat setiap tahun.** Dalam periode 2007-2011, produksi jagung di Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 392 persen per tahun; dari 5.162 ton pada tahun 2007 menjadi 86.200 ton pada tahun 2011. Kabupaten Dompu berkontribusi sekitar 4 persen terhadap total produksi jagung di NTB pada tahun 2007 lalu meningkat menjadi 19 persen pada tahun 2011 (Lampiran 5.4.1). Peningkatan produksi ini terjadi karena peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Luas panen jagung di Kabupaten Dompu meningkat dari 2.024 ha pada tahun 2007 menjadi 18.109 ha pada tahun 2011; sementara produktivitasnya meningkat dari 2,55 ton/ha menjadi 5,17 ton/ha dalam periode yang sama. Rata-rata produktivitas jagung di Dompu dalam lima tahun terakhir (4,06 ton/ha) lebih tinggi daripada rata-rata produktivitas di NTB (3,80 ton/ha). Peningkatan luas panen dan produktivitas jagung di Dompu tersebut merupakan hasil dari dukungan teknis dan non teknis yang diberikan baik oleh pemerintah (daerah dan pusat) maupun pihak swasta (selaku perusahaan inti). Perkembangan produksi dan produktivitas jagung yang pesat (di atas) dan luasnya potensi lahan yang dimiliki menjadi dasar dari ditetapkannya Kabupaten Dompu sebagai sentra utama produksi jagung nasional dan menjadi daerah contoh pengembangan jagung (pada lahan kering) di provinsi NTB.

Namun demikian, peningkatan produksi dan produktivitas jagung yang terjadi tidak diikuti secara otomatis oleh peningkatan pendapatan petani produsen. Hal ini terutama karena terkendala oleh permasalahan tidak stabilnya harga. Harga jagung pada musim panen raya rendah yaitu sekitar Rp. 1.800 per kg, sebaliknya di luar musim panen dapat mencapai Rp 2.750 per kg. Permasalahan lainnya juga terkait dengan penanganan pasca panen dan pemasaran. Masyarakat produsen umumnya belum memiliki fasilitas penyimpanan yang sesuai standar, ataupun kapasitas peningkatan perolehan nilai tambah lainnya, seperti: pengolahan, dan standarisasi/klasifikasi produk. Oleh karena itu, peningkatan produksi seringkali tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan karena harga jual produk produk menurun ataupun karena sebagian produksi tidak dapat terjual.

Gambar 5.22. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditas Unggulan Kabupaten Dompu 2007-2011



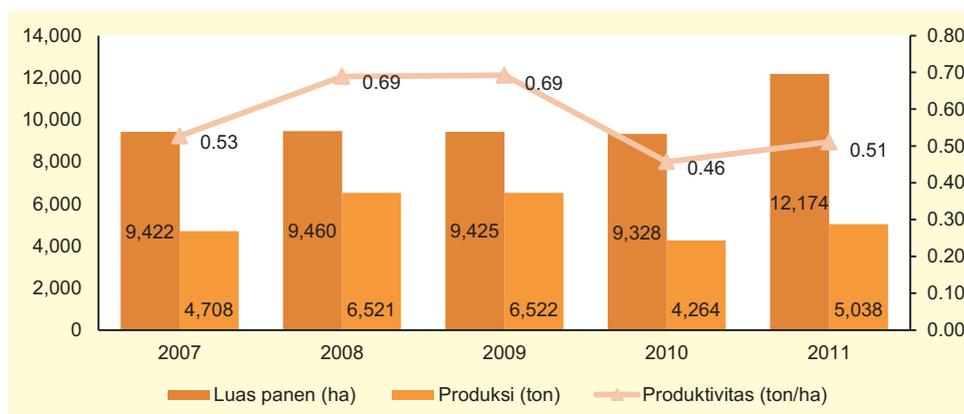
Sumber: BPS, 2008-2012

**Populasi sapi juga terus meningkat setiap tahun.** Dalam periode 2007-2011, populasi sapi di Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 10 persen per tahun; dari 58.897 ekor pada tahun 2007 menjadi 85.612 ekor pada tahun 2011. Peningkatan populasi sapi di Dompu merupakan hasil dari pelaksanaan program provinsi (Bumi Sejuta Sapi, BSS) di Kabupaten Dompu. Populasi sapi di Dompu berkontribusi sekitar 11 persen terhadap total populasi sapi di NTB (Lampiran 5.4.2). Disamping memberikan bibit/induk sapi peternak, program BSS juga memberikan dukungan teknis dan non teknis lainnya kepada masyarakat peternak sehingga produktivitas induk meningkat, dari semula setiap induk betina hanya menghasilkan 1 ekor anak setiap 2 tahun menjadi setiap tahun.

**Produksi rumput laut berfluktuasi dalam periode 2007-2011.** Dibandingkan dengan produksi pada tahun 2007, produksi rumput laut di Kabupaten Dompu meningkat pada tahun 2011 tapi menurun pada tahun 2008-2010 (Lampiran 5.4.3). Fluktuasi produksi ini bukanlah karena dukungan pemerintah yang berubah-ubah setiap tahun tetapi kemungkinan karena perubahan kondisi perairan pantai seiring dengan terjadinya anomaly perubahan iklim global. Program pengembangan rumput laut yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu menyediakan bibit, beserta dukungan teknis dan non teknis lainnya. Program pemerintah juga mendorong kemitraan swasta (selaku perusahaan inti) dan masyarakat (selaku petani).

**Produksi jambu mete cenderung meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2010.** Dibandingkan dengan produksi dan produktivitas pada tahun 2007, produksi dan produktivitas jambu mete di Kabupaten Dompu meningkat pada tahun 2008, 2009 dan 2011 tapi menurun pada tahun 2010 karena faktor musim yang kurang mendukung dan adanya serangan penyakit. Produksi jambu mete di Dompu berkontribusi hampir 50 persen terhadap total produksi di NTB dan terhitung sekitar 10 kali lebih tinggi daripada produksi di kabupaten Bima (Lampiran 5.4.4). Secara rata-rata, produksi jambu mete di Kabupaten Dompu meningkat 6 persen setahun dalam periode 2007-2011, sementara rata-rata peningkatan produktivitas hanya meningkat 2 persen dalam periode yang sama. Peningkatan produksi dan produktivitas yang relatif rendah ini karena sebagian besar tanaman dalam usia tua, sementara penanaman baru masih belum berusia produktif. Selain itu, petani juga kurang menerapkan teknologi budidaya yang sesuai dengan rekomendasi. Dukungan program pengembangan yang diberikan pemerintah berupa sarana bibit serta bantuan teknis dan non teknis lainnya.

Gambar 5.23. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jambu Mete di Kabupaten Dompu 2007-2011

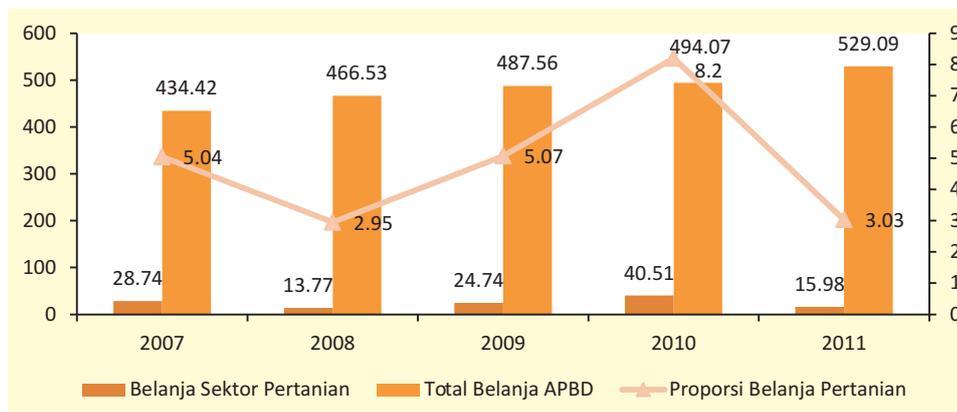


Sumber: BPS, 2008-2012

## 5.4.2 Analisis Belanja Sektor Pertanian Daerah

Meskipun berkontribusi besar terhadap PDRB dan kesempatan kerja daerah, sektor pertanian di Kabupaten Dompu mendapat alokasi belanja daerah yang relatif kecil dan cenderung menurun dalam periode 2007-2011. Belanja sektor pertanian di daerah ini meliputi belanja 4 SKPD, yaitu: pertanian tanaman pangan; perikanan dan kelautan; perkebunan; dan peternakan. Dalam periode 2007-2011, total belanja sektor pertanian menurun dari Rp 28,74 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 15,98 milyar pada tahun 2011. Proporsi belanja sektor pertanian terhadap APBD juga menurun dari 5,04 persen pada tahun 2007 menjadi 3,03 persen pada tahun 2011. Proporsi ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan proporsi belanja sektor: kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

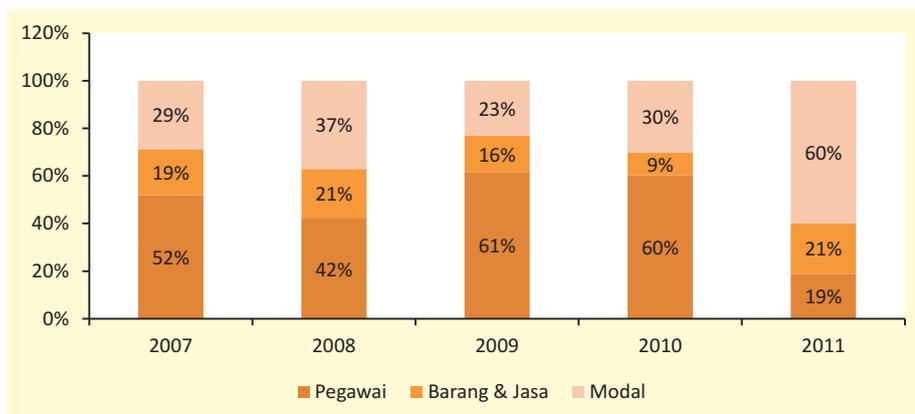
Gambar 5.24. Proporsi Belanja Sektor Pertanian Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Dompu.



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, sebagian besar dari belanja sektor pertanian Kabupaten Dompu dialokasikan untuk belanja pegawai. Dalam periode 2007-2011, rata-rata alokasi belanja sektor pertanian Kabupaten Dompu adalah 46,93 persen untuk belanja pegawai, 17,26 persen untuk belanja barang dan jasa, dan 35,81 persen untuk belanja modal.

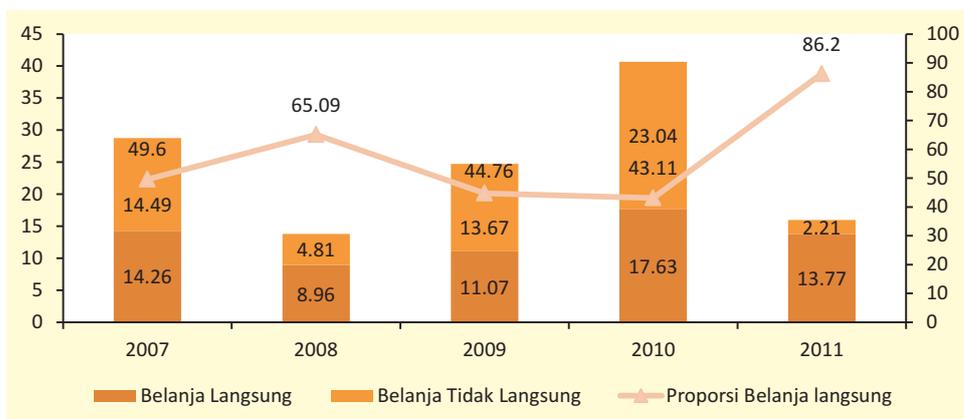
Gambar 5.25. Proporsi Belanja Sektor Pertanian Kabupaten Dompu Menurut Klasifikasi Ekonomi, 2007-2011



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja sektor pertanian didominasi oleh belanja langsung yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal.** Proporsi belanja langsung terhadap total belanja sektor pertanian meningkat dari 49,60 persen pada tahun 2007 menjadi 86,20 persen pada tahun 2011. Sebagian besar dari belanja langsung sektor pertanian tersebut dialokasikan untuk belanja modal, dengan rata-rata 61,21 persen per tahun.

Gambar 5.26. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Sektor Pertanian Kabupaten Dompu, 2007-2011



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

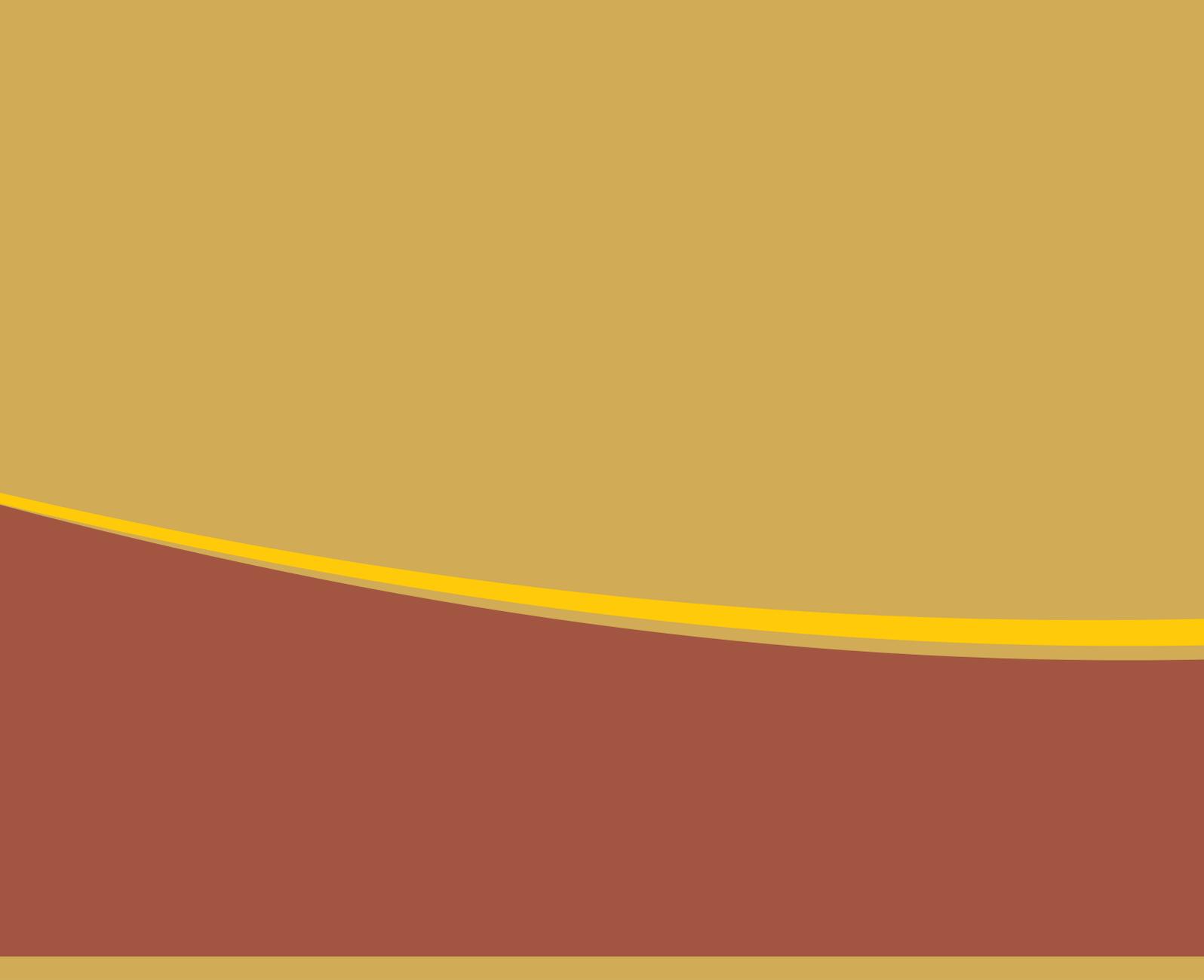
**Belanja program sektor pertanian belum dialokasikan secara proporsional.** Dalam periode 2007-2011, belanja sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura didominasi (78,29 persen) oleh belanja program ketahanan pangan dan program peningkatan kesejahteraan petani sementara sisanya dialokasikan secara tidak merata pada 5 program lainnya. Belanja sub sektor kelautan dan perikanan didominasi oleh belanja program peningkatan pengembangan perikanan tangkap (60,75 persen), sisanya dialokasikan secara tidak merata pada 4 program lainnya. Belanja program untuk sub sektor perkebunan didominasi oleh belanja program peningkatan produksi (61,42 persen), sisanya dialokasikan pada 5 program lainnya. Belanja program untuk sub sektor peternakan didominasi oleh belanja program peningkatan produksi hasil peternakan (50,67 persen) dan peningkatan penerapan teknologi peternakan (19,36 persen), sisanya dialokasikan untuk belanja 3 program lainnya.

### 5.4.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kinerja keluaran dan hasil sektor pertanian Kabupaten Dompu untuk 4 komoditas unggulan (jagung, jambu mete, sapi dan rumput laut) secara umum menunjukkan peningkatan dalam periode 2007-2011.** Peningkatan tersebut, secara rata-rata per tahun berturut-turut sebesar 392 persen, 2 persen, 11 persen, dan rumput laut meningkat tajam dari 270 ton menjadi 5.606 ton pada periode dua tahun terakhir. Keberhasilan pencapaian ini terjadi karena dukungan teknis dan non teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu, Propinsi NTB dan pemerintah pusat. Namun demikian peningkatan produksi dan produktivitas tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani produsen. Rendahnya harga jual komoditas (jagung) sebagai akibat dari kurangnya penanganan pasca panen dan kurang maksimalnya pemasaran. Permasalahan-permasalahan ini sulit diatasi oleh petani produsen secara mandiri sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk pengembangan *off-farm* yang meliputi upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta memaksimalkan pemasaran. Sementara permasalahan rendahnya produktivitas jambu mete terkait dengan usia sebagian tanaman yang sudah tua dan kurangnya penerapan teknologi budidaya, sehingga pemerintah perlu melakukan program peremajaan tanaman, memperbanyak demplot penerapan teknologi budidaya dan menyediakan tenaga penyuluh lapangan.

**Alokasi belanja pada sektor pertanian masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan.** Meskipun sektor pertanian berkontribusi besar (rata-rata 39 persen) terhadap PDRB dan 31 persen terhadap kesempatan kerja daerah, namun sektor ini mendapat proporsi belanja daerah yang relatif kecil yaitu 5,04 persen pada tahun 2007 menurun menjadi 3,03 persen pada tahun 2011. Oleh karena itu seharusnya sektor pertanian menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Kabupaten Dompu dan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar.

**Belanja sektor pertanian dalam periode 2007-2011 didominasi oleh belanja langsung yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal.** Sementara itu, belanja program dialokasikan lebih kepada program peningkatan produksi daripada program peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha serta pemasaran hasil. Oleh karena itu diperlukan realokasi sebagian anggaran belanja baik dari belanja modal maupun dari belanja program untuk mendukung program pengembangan *off-farm* seperti penanganan pasca panen, peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil.



# Bab 6

## Isu-isu Strategis

## 6.1 Kemiskinan

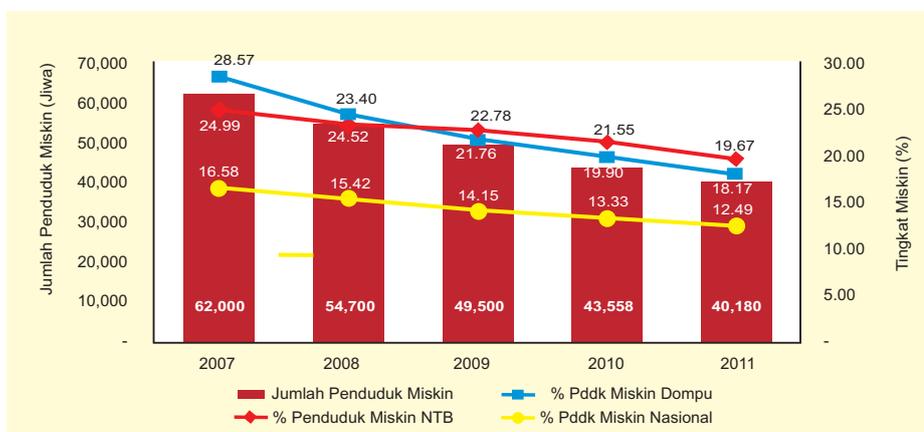
Upaya pemerintah Kabupaten Dompu dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang cukup optimal selama lima tahun terakhir. Tingkat kemiskinan penduduk terus mengalami penurunan dan jumlah penduduk miskinnya selalu berada di bawah rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinasi sejumlah kebijakan penanggulangan kemiskinan para pihak telah dilakukan melalui kelembagaan yang ada. Berbagai program inisiasi daerah disertai dengan alokasi anggaran tersendiri juga terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten.

### 6.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dompu menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2007-2011. Pada tahun 2007, penduduk miskin di Kabupaten Dompu berjumlah 62.000 jiwa. Jumlah tersebut turun sekitar 21.820 jiwa hingga menjadi 40.180 jiwa di tahun 2011. Penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2008 yakni 7.300 jiwa dan terendah di tahun 2011 sebesar 3.378 jiwa. Selama periode 2007-2011, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 5.455 jiwa per tahun.

Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dompu tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2007, penduduk miskin Kabupaten Dompu sebesar 28,57 persen dan turun sekitar 10,40 persen hingga menjadi 18,17 persen di tahun 2011. Laju penurunan penduduk miskin Dompu tercatat sekitar 2,60 persen per tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (4,05 persen) dan terendah di tahun 2011 (1,73 persen). Penurunan penduduk miskin kabupaten lainnya dalam periode yang sama, masing-masing : Lombok Barat (9,27 persen), Bima (7,46 persen) dan NTB (5,32 persen).

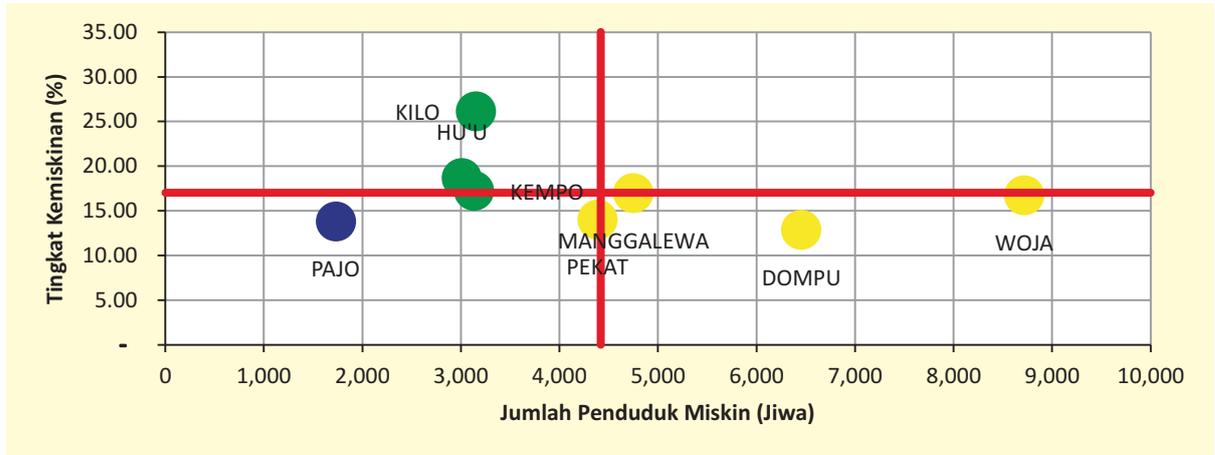
Gambar 6.1. Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dompu, 2007-2011



### 6.1.2 Penyebaran Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Dompu cenderung terkonsentrasi pada kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah. Sebanyak tiga kecamatan di Kabupaten Dompu dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata kabupaten. Kecamatan kantong kemiskinan tersebut memiliki jumlah penduduk miskin kurang dari 4.000 jiwa. Umumnya, wilayah-wilayah tersebut merupakan areal pertanian lahan kering, pinggiran kawasan hutan, kawasan pesisir dan aksesnya terhadap pusat-pusat layanan publik relatif jauh. Sebaran penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Dompu berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (BPS, 2012).

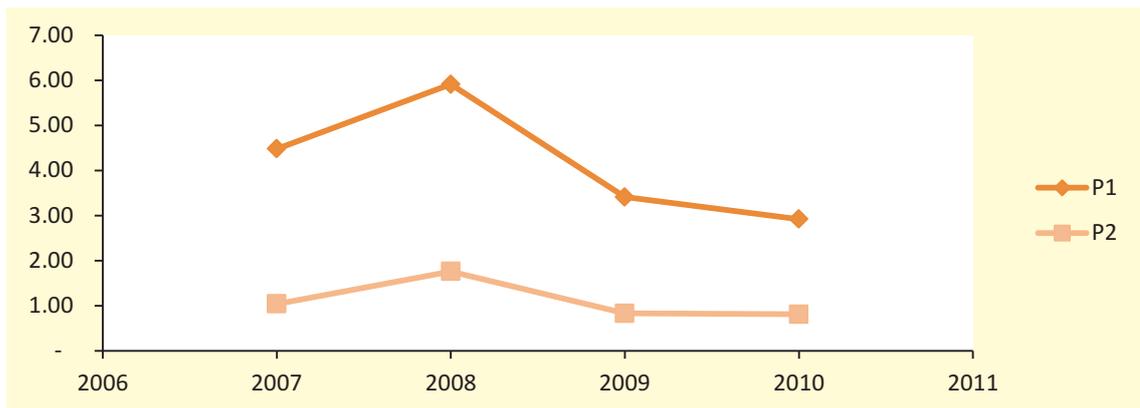
Gambar 6.2. Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat



### 6.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Dompu juga cenderung menurun selama 5 tahun terakhir.  $P_1$  menurun dari 4.48 (2007) menjadi 2.92 (2010). Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan (GK). Sementara,  $P_2$  menurun dari 1.04 (2007) menjadi 0.81 (2010). Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan antar penduduk miskin itu sendiri. Kondisi ekonomi makro daerah yang makin membaik telah berkontribusi nyata bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Gambar 6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Dompu, 2007-2010



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2011 diolah.

### 6.1.4 Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan

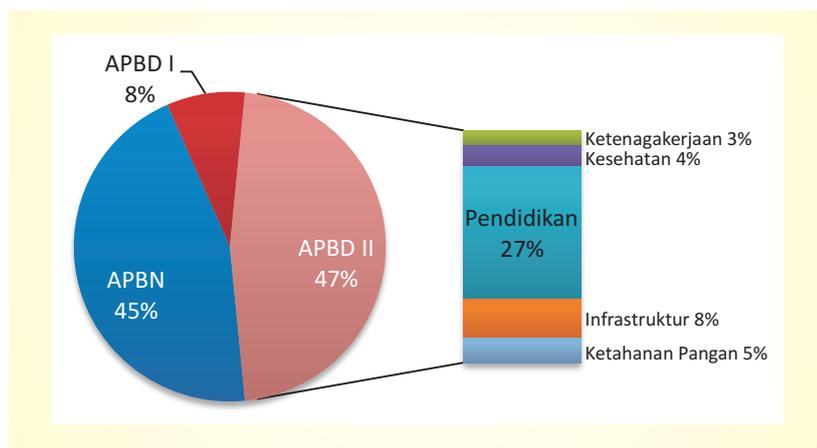
Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dompu merupakan hasil dari upaya-upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam aspek : kelembagaan, kebijakan dan program; serta anggaran.

Di bidang Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Dompu telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sejak tahun 2011. Kinerja dari TKPKD ini cukup optimal dalam hal mengkoordinasikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu sendiri maupun upaya pihak lainnya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pihak Swasta dan Komponen Masyarakat Sipil). Selain itu, TKPKD ini secara berkala memberikan pelaporan atas hasil impementasi upaya penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Provinsi NTB dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP<sub>2</sub>K). Selain itu, TKPKD Dompu telah menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2011-2015 sebagai pedoman para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dompu.

Dalam aspek program dan kebijakan, pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan sejumlah program prioritas berbasis pada optimalisasi komoditas dan potensi lokal. Terdapat 4 (empat) program prioritas daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yakni : Pengembangan usaha agribisnis berbasis komoditi lokal dengan prioritas utama pada pengembangan komoditi sapi jagung dan rumput laut (PIJAR); pengembangan Pariwisata daerah dengan fokus pada pengembangan obyek wisata Lakey, Tambora dan Satonda (Latonda); dan Pengembangan UKM , Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro khususnya pada tingkat perdesaan; dan Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki pos anggaran tersendiri untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dompu diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah dan terdistribusi pada 4 (empat) bidang yakni : ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Tahun 2010, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan

Gambar 6.4. Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Dompu Tahun 2010



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

## 6.1.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

**Persentase penduduk miskin Kabupaten Dompu tahun 2011 (18,17) lebih rendah dibandingkan rata-rata Propinsi NTB (19,67), namun masih tetap lebih tinggi daripada rata-rata Nasional (12,49).** Upaya penanggulangan kemiskinan daerah (kelembagaan, kebijakan dan anggaran) telah memberikan kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu sebesar 10,40 persen dari tahun 2007 hingga 2011. Pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan empat program unggulan berbasis pada optimalisasi komoditas dan potensi lokal. Namun demikian, pemerintah daerah masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan pokok dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, yakni : lemahnya kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); belum fokusnya target sasaran (penerima dan wilayah) akibat belum tersedianya data kemiskinan terpadu berbasis sasaran dan wilayah; dan jenis program lebih mengutamakan pembangunan fisik dan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.

**Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Dompu perlu melakukan perbaikan atau optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan dan penyediaan pangkalan data (*baseline data*).** Penguatan fungsi dan peran TKPKD dapat dilakukan dengan menyediakan data kemiskinan terpadu sebagai dasar perencanaan program SKPD agar lebih terfokus; monitoring dan evaluasi efektifitas program SKPD dalam pencapaian target penurunan kemiskinan; serta koordinasi dan integrasi program kemiskinan dari berbagai pihak (Pihak Donor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta Inisiatif Perusahaan dan Organisasi Masyarakat Sipil) agar fokus pada kecamatan-kecamatan kantong kemiskinan melalui program-program berorientasi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, penyediaan pangkalan data (*baseline data*) kemiskinan dilakukan secara terpadu berbasis orang (*by name by address*) dilengkapi dengan kondisi wilayah (karakteristik kecamatan).

## 6.2 Gender

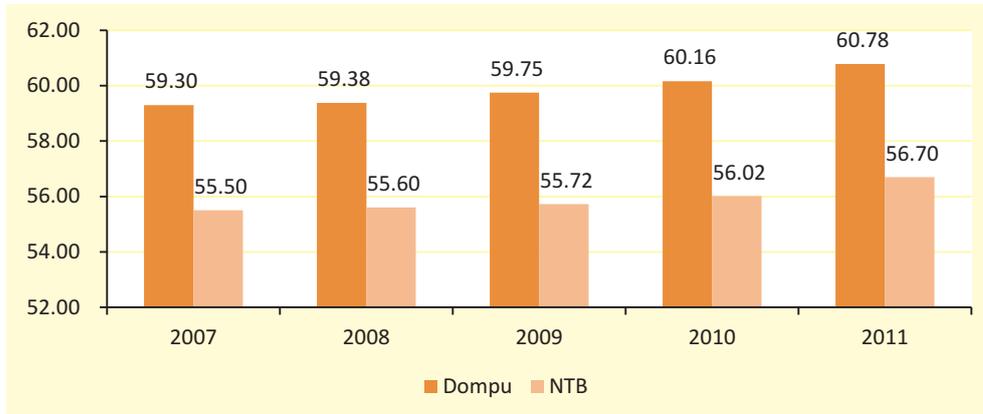
Pembangunan daerah yang berperspektif gender yaitu memberikan kesempatan dan manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan, merupakan kebijakan nasional termasuk di Kabupaten Dompu. Kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan tercermin dari angka indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

Sub bab ini membahas tentang kinerja dan belanja daerah dalam pembangunan gender di Kabupaten Dompu yang difokuskan pada isu spesifik local terkait buruh migran dalam periode 2007-2011.

### 6.2.1 Pembangunan Gender Secara Umum

**Dalam periode 2007-2011, tingkat pembangunan gender di Kabupaten Dompu menunjukkan kecenderungan yang meningkat.** Indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 29 persen, dari 59,3 pada tahun 2007 menjadi 60,78 pada tahun 2011. Dibandingkan dengan IPG kabupaten lain yang diteliti dan IPG provinsi NTB, IPG Kabupaten Dompu adalah lebih tinggi (Lampiran 6.2.1).

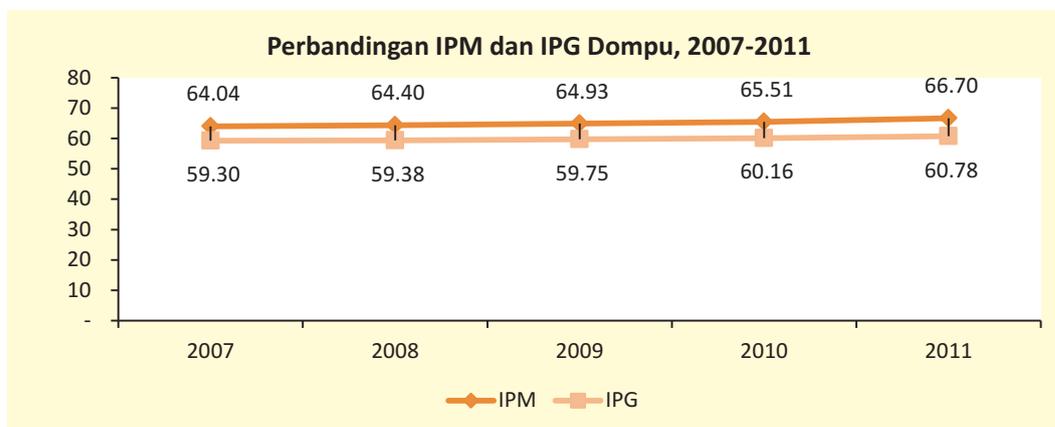
Gambar 6.5. Perkembangan IPG di Kabupaten Dompu, Tahun 2007-2011



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012. Kerjasama BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Meskipun indeks pembangunan gender mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan gender yang relatif lebar di Kabupaten Dompu. Dalam periode 2007-2011, IPG Kabupaten Dompu (di atas) secara konsisten lebih rendah daripada Indeks pembangunan manusia (IPM) yang secara berturut-turut adalah: 64,04 pada tahun 2007 meningkat menjadi 64,4 tahun 2008, 64,93 tahun 2009, 65,51 pada tahun 2010 dan 66,7 pada tahun 2011. Perbedaan IPG-IPM tersebut menggambarkan kesenjangan gender antara 4,74-5,92.

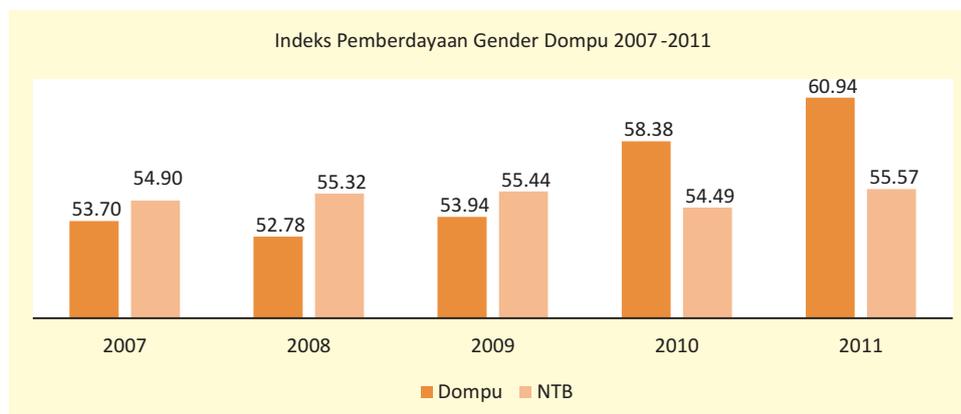
Gambar 6.6. Kesenjangan Gender di Kabupaten Dompu Tahun 2007-2011



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012. Kerjasama BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tingkat keberdayaan perempuan di Kabupaten Dompu adalah masih relative rendah, meskipun dalam posisi tertinggi diantara 4 kabupaten yang diteliti. Indeks pemberdayaan perempuan (IDG) Kabupaten Dompu adalah sebesar 53,7 pada tahun 2007, menurun menjadi 52,78 pada tahun 2008, dan kemudian meningkat menjadi 53,94, 58,38 dan 60,94 dalam periode tiga tahun berikutnya. IDG Kabupaten Dompu lebih tinggi daripada IDG kabupaten Bima, Lombok Utara, Lombok Barat dalam periode 2007-2011, dan IDG propinsi NTB pada dua tahun terakhir (Lampiran 6.2.2).

Gambar 6.7. Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Dompu Tahun 2007-2011



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012. Kerjasama BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Pembangunan gender di kabupaten ini relative masih rendah pada beberapa aspek.** Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi yaitu 17 persen anggota legislative perempuan. Selain itu masih rendahnya akses perempuan terhadap informasi dan kesempatan kerja. Perempuan juga sering menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam dunia kerja.

## 6.2.2 Gender dan Buruh Migran

**Dalam periode 2007-2011, jumlah buruh migran di Kabupaten Dompu adalah 7.724 orang dan didominasi perempuan.** Jumlah buruh migran Kabupaten Dompu adalah sebanyak 465 orang pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.143 pada tahun 2008, lalu menurun menjadi 1.251 orang pada tahun 2009, 1.911 orang pada tahun 2010 dan 1.507 orang pada tahun 2011. Berbeda dengan struktur gender buruh migran di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang didominasi oleh lelaki, struktur gender buruh migran Kabupaten Dompu (dan Bima) didominasi (84 persen) oleh perempuan (Lampiran 6.2.3). Kecenderungan menurunnya jumlah buruh migran dari Kabupaten Dompu pada periode 3 tahun terakhir kemungkinan terkait dengan banyaknya ditemukan permasalahan kekerasan terhadap buruh migran dan adanya kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

**Buruh migran menghasilkan remitansi yang relatif besar dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangganya.** Remitansi buruh migran Kabupaten Dompu adalah sebesar Rp. 86 milyar pada tahun 2011, meningkat dari Rp. 2,4 milyar pada tahun 2008. Pangsa perolehan remitansi tersebut adalah 4,6 persen dari total remitansi provinsi NTB (Lampiran 6.2.4) dan setara dengan 0,16 persen PDRB Dompu pada tahun 2009. Rumah tangga buruh migran menggunakan remitansi untuk berbagai keperluan, termasuk: biaya hidup, membayar hutang, biaya sekolah, biaya kesehatan dan membangun rumah. Sebagian rumah tangga buruh migran juga memanfaatkan remitansi untuk membuka usaha mandiri.

**Disamping memberi manfaat seperti tersebut di atas, buruh migran juga membawa serta beberapa isu yang berimplikasi pada pembangunan gender.** Diantara isu-isu tersebut adalah: kekerasan, pengasuhan anak, penyakit menular, trafficking, dan buruh migran ilegal. Disnaker NTB melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap buruh migran Kabupaten Dompu adalah: 132 pada tahun 2009, 98 kasus pada tahun 2010 dan 47 kasus pada tahun 2011. Antara 3 hingga 10 persen dari jumlah kasus kekerasan tersebut menimpa buruh migran perempuan, dan hanya sebagian kecil mendapat pendampingan hukum. LBH Apik hanya mendampingi 4 kasus kekerasan terhadap buruh migran Kabupaten Dompu (2005-2011), Lembaga Perkumpulan Panca Karsa mendampingi 9 kasus (2011) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB menangani 5 kasus (1 selesai) pada tahun 2011. Buruh migran juga dihadapkan pada isu pengasuhan anak. Buruh migran perempuan (janda) terpaksa harus menitipkan

anaknyanya pada kerabat dekatnya atau orang lain sehingga dapat menyebabkan anak menjadi terlantar dan mengalami masalah gizi buruk. Terdapat potensi tertular penyakit HIV dan AIDS bagi buruh migran, yang meningkat dari 0,29 orang pada tahun 2009 menjadi 0,55 orang pada tahun 2011. Terdapat kasus trafficking sebanyak 6 kasus (Perkumpulan Panca Karsa, 2011), dan 39 kasus (Lespel, 2012). Indikasi adanya kasus buruh migran ilegal juga dilaporkan berbagai sumber, meskipun data persisnya tidak tersedia.

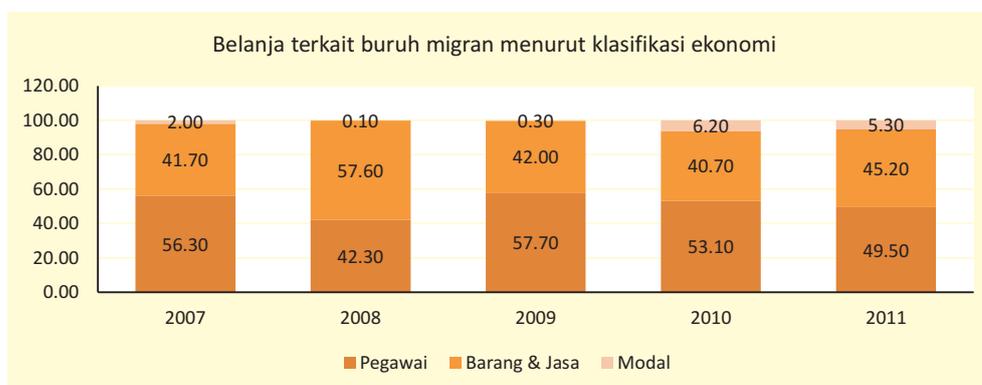
Isu-isu tersebut di atas adalah terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan tidak optimalnya penyiapan dan perlindungan buruh migran. Pada satu sisi, isu-isu di atas dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan buruh migran itu sendiri. Sebagian besar (76 persen) dari mereka berpendidikan setingkat SD dan memiliki pengalaman pelatihan kerja yang terbatas. Pada sisi lain, isu-isu tersebut juga disebabkan oleh belum terselenggaranya secara optimal kegiatan penyiapan, perlindungan dan fasilitasi pendukung buruh migran lainnya. Upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi kesempatan kerja dan pendataan tenaga kerja. Inipun dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

### 6.2.3 Analisis Belanja

Dalam periode 2007-2011, belanja daerah untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan adalah rata-rata 3 persen dari total belanja daerah Kabupaten Dompu. Di daerah ini, belanja pemerintah terkait urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan tersebar di 3 SKPD, yaitu: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam nilai nominal, belanja daerah untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan adalah meningkat dari Rp 8,36 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 12,26 milyar pada tahun 2011. Proporsi belanja urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan terhadap total belanja daerah Kabupaten Dompu adalah sebesar 2 persen pada tahun 2007 dan 2008, kemudian meningkat menjadi 3 persen dalam periode 3 tahun berikutnya. Proporsi belanja urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan adalah lebih kecil dibandingkan dengan belanja urusan kesehatan ataupun belanja urusan pendidikan Kabupaten Dompu.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja daerah untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Dompu sebagian besar untuk belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Dalam periode 2007-2011, proporsi belanja pemerintah Kabupaten Dompu untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan yang tersebar di 3 SKPD terkait sebagian besar merupakan belanja pegawai (52,28 persen) dan proporsi belanja barang dan jasa, dan belanja modal masing-masing 45,8 persen dan 2,8 persen. Namun pada tiga tahun terakhir, proporsi belanja pegawai cenderung menurun sementara proporsi belanja barang dan jasa meningkat.

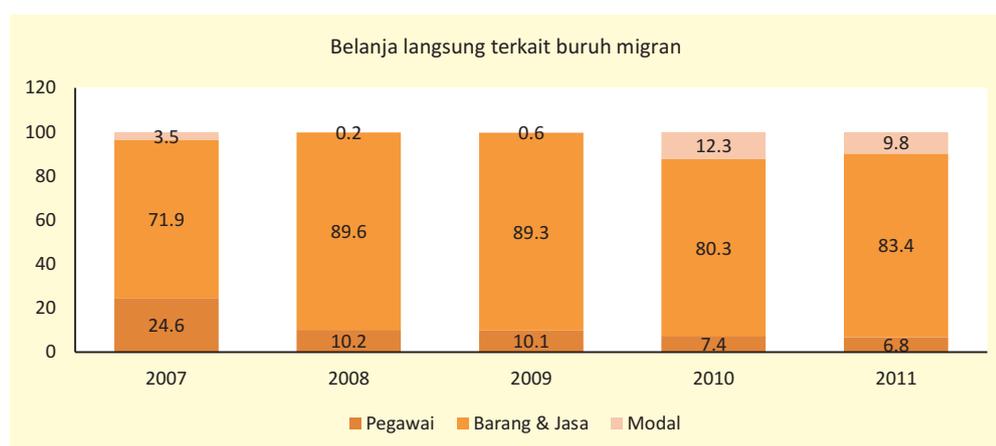
Gambar 6.8. Belanja Daerah untuk Urusan Buruh Migran dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi di Kabupaten Dompu, Tahun 2007-2011



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja daerah untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Dompu didominasi oleh belanja langsung.** Dalam periode 2007-2011 proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah untuk urusan buruh migran dan pemberdayaan perempuan menurun dari 59,12 persen pada tahun 2007 menjadi 54 persen pada tahun 2011, dengan rata-rata alokasi belanja barang dan jasa sebesar 55,29 persen per tahun.

**Gambar 6.9. Belanja Langsung Untuk Urusan Buruh Migran dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Dompu, tahun 2007-2011**



Sumber: Master Tabel APBD P2KP UNRAM, 2012 diolah.

**Belanja program SKPD terkait buruh migran dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Dompu didominasi belanja administrasi perkantoran.** Dari jumlah belanja SKPD tersebut belum ada program yang secara khusus untuk meningkatkan keterampilan buruh migran. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja hanya dialokasikan anggaran sedikit (5 persen pada tahun 2010) bahkan pada tahun 2007-2009 gagal dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi anggaran. Demikian juga program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan hanya dialokasikan anggaran yang kecil pada tahun 2011 (1 persen), sementara program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada periode tahun 2007-2011 dialokasikan hanya anggaran 0,7 persen.

## 6.2.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

**Pembangunan gender tergolong cukup memadai dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB.** Tingkat pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Dompu relative rendah dalam periode 2007-2009 (rata-rata IPG dan IDG kurang dari 60) kemudian menjadi lebih baik dalam periode 2010-2011 (rata-rata IPG 60,47).

**Dalam periode 2007-2011 jumlah buruh migran Kabupaten Dompu fluktuatif namun masih didominasi perempuan (84 persen).** Buruh migran telah menghasilkan remitansi yang cukup yaitu sebesar 0,16 persen dari total PDRB Kabupaten Dompu. Namun demikian perhatian pemerintah terhadap buruh migran masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh alokasi belanja untuk 3 SKPD yang terkait buruh migran (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) hanya sebesar rata-rata 3 persen dari total APBD per tahun selama lima tahun terakhir. Atas dasar ini maka pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran untuk buruh migran jika pemerintah daerah memanfaatkan potensi buruh migran dalam meningkatkan perekonomian daerah.

**Disamping memberikan keuntungan bagi daerah baik dari sisi tenaga kerja maupun remitansi, buruh migran juga membawa beberapa permasalahan yaitu kekerasan, pengasuhan anak, penyakit menular, dan trafficking.** Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman dan pelatihan kerja yang terbatas, program penyiapan dan fasilitasi pendukung buruh migran yang belum optimal dan perlindungan buruh migran yang masih kurang. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan

perhatian yang lebih kepada program-program yang mendukung penguatan kapasitas buruh migran. Program tersebut antara lain adalah pembekalan sebelum pemberangkatan termasuk peningkatan keterampilan, penguasaan bahasa, pengetahuan hukum, kesehatan, keselamatan kerja dan dan financial literacy. Disamping itu pemerintah perlu memberikan pelatihan pengelolaan remitansi kepada keluarga buruh migran agar remitansi tersebut menjadi produktif.

## 6.3 Mitigasi Bencana

**Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.** Salah satu kewenangan tersebut adalah pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang dalam level provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sejauh ini, Daerah belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk pembiayaan aktifitas penanggulangan bencana.

**Kabupaten Dompu termasuk salah satu daerah rawan bencana di Indonesia dengan kategori 'TINGGI'.** Hasil pengukuran Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2011, Kabupaten Dompu memiliki skor 70 (range skor : 36-139) dalam hal tingkat kerawanan bencana baik berupa bencana alam maupun non alam. Dengan nilai skor tersebut, Bima menempati urutan 7 di lingkup NTB dan rangking 151 secara Nasional. Beberapa potensi ancaman bencana di Kabupaten Dompu, antara lain : tanah longsor (Dorotangga dan Nangatumpu); tsunami (Calabahi, Nangamiro, Kilo, Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan); banjir (Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu); gunung berapi (Beringin Jaya, Kessi); kekeringan (Dorokempo-Pupu; Hu'u-Adu; dan Mbawi) serta konflik sosial.

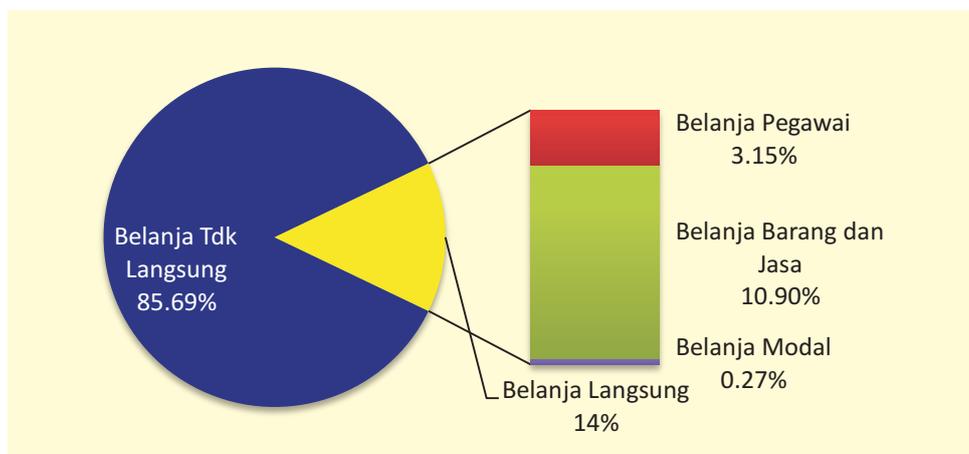
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu terbentuk pada tahun 2011 sehingga belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.** Kapasitas kelembagaan dimaksud terkait dengan kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut : penyusunan kebijakan; perencanaan dan penganggaran; pendanaan; serta pelibatan partisipasi masyarakat dan institusi lokal. Kelemahan kapasitas kelembagaan tersebut berimplikasi pada belum tersusunnya sejumlah instrumen perencanaan penanggulangan bencana daerah seperti : Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kontijensi (Rekon) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Di samping itu, kebijakan penanggulangan bencana daerah belum terintegrasi ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.** Akibatnya, kebijakan penanggulangan bencana daerah (kesiap-siagaan, tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan) belum menjadi satu kesatuan yang utuh melainkan masih bersifat sektoral. BPBD sendiri terlihat lebih menjalankan mandat lembaga penanggulangan bencana nasional (BNPB) daripada berfungsi sebagai instansi/lembaga penanggulangan bencana daerah secara otonom dan mandiri.

**Lemahnya kapasitas kelembagaan BPBD dalam menjalankan fungsi dan perannya juga disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran daerah.** Pemerintah Kabupaten Dompu belum mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai dalam APBD untuk penanggulangan bencana khususnya kesiap-siagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, ketiga aspek tersebut membutuhkan penanganan secara cepat jika bencana terjadi. Alokasi anggaran untuk tanggap darurat (saat terjadi bencana) sendiri masih memanfaatkan dana tidak terduga pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 300.000.000,00 per tahun. Sementara, anggaran untuk tujuan kesiapsiagaan (pra bencana) serta rehabilitasi dan rekonstruksi (pasca bencana) sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Propinsi (APBD I) dan Pemerintah Pusat (APBN).

**Selama dua tahun terakhir (2010-2011), komposisi belanja untuk penanggulangan bencana masih minim sekali jika dibandingkan dengan komposisi belanja lainnya dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.** Pada tahun 2010, total alokasi belanja untuk penanggulangan bencana hanya Rp. 14.495.312,33 atau sekitar 2.64 persen dari total belanja langsung untuk urusan Bakesbangpoldagri. Pada tahun 2011, alokasi ini mengalami kenaikan lebih dari 100 persen hingga mencapai jumlah Rp. 34.437.157,29 dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 6.72 persen dari total belanja langsung untuk urusan sama.

Grafik 6.10. Komposisi Realisasi Total Belanja pada Urusan Kesbangpolinmas Menurut Klasifikasi Ekonomi Selama Tahun 2010-2011



Sumber: APBD Kabupaten Dompu, data diolah

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Kabupaten Dompu memiliki tingkat kerawanan tinggi (70) dari ancaman sejumlah bencana potensial baik bencana alam (tanah longsor, tsunami, banjir, gunung berapi, kekeringan) maupun non alam (konflik sosial). Di sisi lain, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas dalam hal : koordinasi kebijakan penanggulangan bencana daerah guna mengurangi kerawanan daerah dari ancaman bencana; penyiapan dokumen kebijakan penanggulangan bencana daerah. Selain itu, penanggulangan bencana belum menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penguatan fungsi dan peran BPBD diperlukan dalam hal koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan bencana pada SKPD terkait. Selain itu, BPBD harus mampu menyiapkan sejumlah instrumen penanggulangan bencana, seperti : Analisa Risiko Bencana Daerah (ARBD); Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana (Perda PB); Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah (RAD), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Rencana Kontijensi (Renkon) bencana prioritas. Mengingat tingginya kerawanan daerah dari ancaman bencana, maka penanggulangan bencana harus menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD-Renstra SKPD).

## Daftar Pustaka

- ....., Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- ....., Peraturan Pemerintah RI No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- ....., Pemendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- ....., 2010, Modul Pelatihan Public Financial Management.
- ....., Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- ....., Permendagri No.17 Tahun 2007
- ....., Permendagri No.79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- ....., Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedomen Pengelolaan Keuangan Darah
- ....., 2004, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (UPP), AMPYKPN, Yogyakarta.
- ....., Permendagri No.4 Tahun 2008 tentang Pedomen Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ....., 2010, Kajian Belanja Publik NTB, Kerjasama Australian Indonesia Partnership, Bank Dunia dan Unram.
- ANTARA, 2010, Pengukuran Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi NTB, Kerjasama Australian Indonesia Partnership, Pemerintah NTB, Bank Dunia dan Unram.
- BP3TKI (2009). Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram. Mataram NTB.
- BP3TKI (2010). Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram. Mataram NTB.
- BP3TKI (2012). Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram. Mataram NTB
- BPS Kabupaten Dompu (2008-2012). Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Dompu.
- BPS NTB (2008-2012). Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Dinas Kelautan dan Perikanan NTB (2011). Laporan Pemberdayaan usaha garam Rakyat (PUGAR) di Provinsi NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Mataram NTB.
- Dinas Perikanan dan Kelautan NTB (2010). Buku Data Pokok Perikanan dan Kelautan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, Mataram.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB (2008). Laporan Tahunan. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi NTB. Mataram, NTB
- Halim, Abdul, 2002, Keuangan dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP), AMPYKPN, Yogyakarta.
- KPANTB (2011). Laporan Semester I Ronde SSF Provinsi NTB
- KPANTB (2011). Laporan Semester II Ronde SSF Provinsi NTB
- KPANTB (2011). Laporan Semester III Ronde SSF Provinsi NTB
- Larasati, Endang, ..., Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya, dalam Buku Keuangan Publik.
- LBH Apik (2005-2011). Data Kasus Buruh Migran 2005-2011.
- Pasolong, Harbani, 2007 Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Perkumpulan Panca Karsa (2011). Data Penanganan Kasus.

# Lampiran

## Lampiran A: Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi

### A1: Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Bab Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja Pengelolaan Keuangan Publik di Kabupaten Dompu menunjukkan hasil yang baik, terutama pada bidang pengelolaan aset

Ada beberapa kekurangan yang masih memerlukan perhatian, yakni dibidang Audit dan Pengawasan Eksternal, Kerangka Peraturan dan Perundangan, serta bidang Akuntansi dan Pelaporan

Perencanaan dan Penganggaran termasuk dalam kategori baik dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan yang memuat rencana capaian disertai indikator kinerja yang dapat diukur. Hanya saja pelaksanaan tahapan-tahapan dalam perencanaan seringkali tidak tepat waktu serta perbedaan antara APBD murni dan APBD-P masih lebih dari 10 persen

Pemda Dompu hendaknya: (i) mengupayakan tersedianya dokumen perencanaan (RKPD, Renja SKPD) dan penganggaran (KUA/PPA, RKA-SKPD, APBD) yang tepat waktu melalui peningkatan kapasitas SDM perencana di tingkat SKPD dan peningkatan koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan dokumen perencanaan dapat berjalan lebih efektif; (ii) mengupayakan agar perbedaan antara APBD induk dan APBD-P untuk kelompok belanja langsung kurang dari 10% melalui pelatihan/penyegaran mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD/APBD-P terutama untuk kelompok belanja langsung serta pelatihan dan pendampingan teknis untuk penyusunan Analisis Standar Belanja untuk APBD.

Pelaksanaan Anggaran, Kabupaten Dompu sudah dapat menerapkan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan dengan baik. Bidang pengelolaan aset mendapatkan grade 80 persen meski SIMBADA berbasis komputer belum diterapkan karena SDM yang belum siap. Bidang akuntansi dan pelaporan masih kurang bagus, disebabkan penempatan SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi baik pada tingkat SKPKD maupun SKPD. Pelaksanaan anggaran sudah terkategori relatif baik, namun belum sepenuhnya didukung dengan regulasi yang lengkap walaupun sudah diselenggarakan melalui institusi daerah yang terpadu (DPPKAD)

Segera menerapkan SIMBADA berbasis komputer pada pengelolaan asetnya dengan segera memberikan pelatihan pegerasian perangkat lunak terkait dengan penggunaan SIMBADA pada SDM bidang aset. Pada bidang akuntansi dan pelaporan pemda hendaknya meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan SKPD melalui Pelatihan dan pendampingan bidang akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah serta kebendaharaan secara rutin pada pengelola keuangan daerah dan Staf Keuangan SKPD serta menempatkan SDM yang berkualifikasi pendidikan akuntansi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan melengkapi peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Perda mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Standar dan prosedur audit internal dapat dilaksanakan dengan baik, meski dengan keterbatasan SDM dan sumberdaya anggaran, sementara dalam pengawasan eksternal masih banyak ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik

(i) Meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah pada masyarakat melalui publikasi laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); (ii) penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan; (iii) terus berupaya meningkatkan status laporan audit eksternal dari *disclaimer* menjadi yang lebih baik dengan cara menindaklanjuti dengan segera setiap rekomendasi dalam hasil LHP sesuai saran yang diberikan BPK.

### A2: Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah

#### Bab Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah

Tingkat kemandirian daerah Dompu relatif rendah, yang diindikasikan oleh tingginya kontribusi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) pada pendapatan daerah (rata-rata 85 persen), dan rendahnya kontribusi PAD (rata-rata 5 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (10 persen) selama periode 2007 – 2011.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dengan dukungan teknologi informasi yang terpadu

## Bab Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah

Terkait dengan sebagian besar DAU habis digunakan untuk belanja pegawai, dipandang penting bagi pemerintah daerah Dompu untuk memperjuangkan alokasi dana perimbangan yang lebih besar.

Mengusulkan revisi formula perhitungan kebutuhan fiskal. Tiga indikator utama IPM selama ini hanya dimasukkan dalam satu komponen dalam penghitungan kebutuhan fiskal, harus dibuat menjadi tiga komponen yang terpisah, ditambah dengan tingkat kemiskinan, dan kebutuhan infrastruktur dasar.

## A3: Belanja Daerah

### Bab Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Dompu meningkat rata-rata 5,7 persen.

- (i) Mengevaluasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan serta menyesuaikan dengan kemampuan anggarannya
- (ii) Melakukan moratorium penerimaan pegawai,
- (iii) Tidak memperpanjang masa pension,
- (iv) Meningkatkan porsi belanja untuk sektor-sektor strategis lainnya secara bertahap seperti sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur.

## A4: Sektor-sektor Strategis

### Bab Sektor-sektor Strategis

#### Sektor Pendidikan

Dalam periode 2007-2011 terjadi peningkatan indikator pendidikan di Dompu, namun berjalan relatif lamban sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah indikator output dan outcome.

Proporsi belanja modal semestinya diperbesar dan belanja program dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan hendaknya lebih diperhatikan di masa mendatang.

Besarnya proporsi belanja program wajib belajar sembilan tahun telah memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan Angka Partisipasi Murni dan penurunan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sebaliknya, proporsi belanja program pendidikan menengah memiliki kontribusi bagi lambannya akselerasi Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMA/MA.

1. Proporsi belanja untuk pendidikan menengah perlu ditingkatkan sehingga kinerja pencapaian APMD jenjang ini minimal sama dengan rata-rata Propinsi NTB.
2. Upaya yang lebih keras untuk meningkatkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas masih diperlukan melalui program pemberantasan buta aksara melalui jalur pendidikan non-formal.

#### Sektor Kesehatan

Indikator status kesehatan masyarakat Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan yang relatif lamban seperti tercermin dari indikator baik output (luaran) maupun outcome (hasil)

Meningkatkan program kesejahteraan masyarakat seperti program-program seperti promosi kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penduduk miskin, dan kesehatan lingkungan harus memperoleh perhatian yang lebih besar di masa mendatang

#### Sektor Infrastruktur

Kinerja sektor infrastruktur Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 2007- 2011, secara umum relatif kurang baik. Meskipun indeks aksesibilitas jalan dan mobilitas jalan di atas Standar Pelayanan Minimum, kualitas jalan yang ditunjukkan oleh tingkat kemantapan jalan masih di bawah 50 persen. Demikian juga dengan aksesibilitas RT terhadap infrastruktur dasar perumahan juga relatif rendah (sanitasi layak masih di bawah 50 persen) kecuali terhadap air minum layak.

1. Meningkatkan alokasi anggaran yang lebih proporsional terhadap program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan sanitasi layak
2. Merealokasi anggaran untuk program pembangunan jalan yang selama ini cukup besar ke program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan infrastruktur dasar perumahan yang terkait dengan sanitasi layak.

### Sektor Pertanian

Rendahnya harga jual komoditas (jagung) sebagai akibat dari kurangnya penanganan pasca panen dan kurang maksimalnya pemasaran  
Diperlukan intervensi pemerintah untuk pengembangan *off-farm* yang meliputi upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta memaksimalkan pemasaran

Permasalahan rendahnya produktivitas jambu mete terkait dengan usia sebagian tanaman yang sudah tua dan kurangnya penerapan teknologi budidaya  
Pemerintah perlu melakukan program peremajaan tanaman, memperbanyak demplot penerapan teknologi budidaya dan menyediakan tenaga penyuluh lapangan.

Meskipun sektor pertanian berkontribusi besar (rata-rata 39 persen) terhadap PDRB dan 31 persen terhadap kesempatan kerja daerah, namun sektor ini mendapat proporsi belanja daerah yang relatif kecil yaitu 5,04 persen pada tahun 2007 menurun menjadi 3,03 persen pada tahun 2011  
Seharusnya sektor pertanian menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Kabupaten Dompu dan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar.

Belanja sektor pertanian dalam periode 2007-2011 didominasi oleh belanja langsung yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal. Sementara itu, belanja program dialokasikan lebih kepada program peningkatan produksi daripada program peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha serta pemasaran hasil  
Diperlukan realokasi sebagian anggaran belanja baik dari belanja modal maupun dari belanja program untuk mendukung program pengembangan *off-farm* seperti penanganan pasca panen, peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil.

## A5: Isu-isu Strategis

### Isu-isu Strategis

#### Kemiskinan

Prosentase penduduk miskin Kabupaten Dompu tahun 2011 (18,17) lebih rendah dibandingkan rata-rata Propinsi NTB (19,67), namun masih tetap lebih tinggi daripada rata-rata Nasional (12,49).  
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Dompu perlu melakukan perbaikan atau optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan dan penyediaan pangkalan data (baseline data).

#### Gender

Dalam periode 2007-2011 jumlah buruh migrant Kabupaten Dompu fluktuatif namun masih didominasi perempuan (84 persen)  
Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran untuk buruh migrant jika pemerintah daerah memanfaatkan potensi buruh migrant dalam meningkatkan perekonomian daerah

Disamping memberikan keuntungan bagi daerah baik dari sisi tenaga kerja maupun remitansi, buruh migran juga membawa beberapa permasalahan yaitu kekerasan, pengasuhan anak, penyakit menular, dan trafficking.  
1. Memberikan program-program yang mendukung penguatan kapasitas buruh migrant antara lain adalah pembekalan sebelum pemberangkatan termasuk peningkatan keterampilan, penguasaan bahasa, pengetahuan hukum, kesehatan, keselamatan kerja dan *financial literacy*.  
2. Memberikan pelatihan pengelolaan remitansi kepada keluarga buruh migrant agar remitansi tersebut menjadi produktif.

#### Mitigasi Bencana

Kabupaten Dompu memiliki tingkat kerawanan tinggi (70) dari ancaman sejumlah bencana potensial baik bencana alam (tanah longsor, tsunami, banjir, gunung berapi, kekeringan) maupun non alam (konflik sosial).  
Penguatan fungsi dan peran BPBD diperlukan dalam hal koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan bencana pada SKPD terkait

## Lampiran B: Master Tabel

### B1: Pendapatan Berdasarkan Sumber (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
<b>PENERIMAAN</b>						
PAD	12,877.26	16,151.70	18,813.23	18,689.49	28,256.89	17,045.91
Pajak Daerah	1,385.93	1,629.12	1,665.26	1,945.91	2,675.53	1,160.30
Pajak Hotel	58.70	53.08	61.85	28.46	60.94	47.17
Pajak Restoran	81.98	83.81	81.07	61.67	135.70	60.92
Pajak Hiburan	3.50	1.45	7.86	2.70	3.70	0.70
Pajak Reklame	21.58	20.01	29.83	25.48	31.05	13.00
Pajak Penerangan Jalan	950.26	1,034.77	1,236.35	1,566.46	1,778.55	1,025.91
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	268.91	434.15	246.70	260.04	664.39	11.05
Pajak Parkir	1.00	1.85	1.60	1.10	1.20	1.56
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-
Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	702.50
Retribusi Daerah	3,696.45	3,514.73	3,748.98	3,981.82	3,545.20	1,843.15
Retribusi Jasa Umum	2,352.42	2,242.59	2,427.94	2,639.38	-	1,259.21
Retribusi Jasa Usaha	1,098.81	1,020.05	989.94	1,004.24	-	321.60
Retribusi Perizinan Tertentu	245.23	252.09	331.10	338.20	-	262.34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,906.31	4,961.59	8,070.71	9,517.66	14,849.33	11,399.90
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	2,906.31	-	8,000.71	905.22	14,849.33	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	8,612.44	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,888.57	6,046.26	5,328.28	3,244.10	7,186.83	2,642.56
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	178.60	13.77	36.88	-	-	50.70
Jasa Giro	2,633.38	2,902.22	2,608.18	1,582.51	1,531.12	888.31
Pendapatan Bunga Deposito	978.73	649.83	1,131.80	675.53	1,110.75	836.63
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.80	347.97	359.90	248.03	2,131.60	141.46
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	44.01	33.60	-	59.42
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	332.84	597.23	-	293.35	242.19	216.45
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.46	-	70.00	44.02	-	-
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	790.83	-	-	-	414.88
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-	744.42	-	-	-	34.72
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Pendapatan lain-lain	762.77	-	1,077.51	367.06	162.07	6,378.90
Dana Perimbangan	326,864.34	350,044.07	373,619.34	384,999.46	412,931.20	495,083.92
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	27,503.57	23,015.57	25,028.48	34,147.04	30,013.05	30,403.95
Dana Bagi Hasil Pajak	23,415.51	18,217.03	17,667.63	20,775.76	18,948.34	9,080.01
Bagi Hasil Bukan Pajak	4,088.07	4,798.54	7,360.85	13,371.28	11,064.71	6,120.91
Dana Alokasi Umum	258,877.83	284,521.61	300,006.86	311,256.73	340,434.36	419,778.27

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Dana Alokasi Khusus	40,482.93	42,506.89	48,584.00	39,595.70	42,483.80	44,901.70
<b>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	<b>11,398.78</b>	<b>24,436.29</b>	<b>23,355.63</b>	<b>60,897.41</b>	<b>114,048.48</b>	<b>17,917.45</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	6,500.00	-	-	-	-
Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,458.84	7,608.87	10,590.76	10,251.66	9,089.89	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	2,197.08	-	10,590.76	10,251.66	9,089.89	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	1,261.76	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,939.94	9,919.48	-	24,185.98	76,126.97	-
Dana Penyesuaian	2,000.00	9,919.48	-	-	76,126.97	-
Dana Otonomi Khusus	3,000.00	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,939.94	407.93	5,089.67	3,031.22	1,825.20	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	407.93	-	3,031.22	1,825.20	-
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Kota	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	7,675.20	23,428.55	27,006.42	10,697.68
<b>TOTAL</b>	<b>351,140.38</b>	<b>390,632.06</b>	<b>415,788.19</b>	<b>464,586.36</b>	<b>555,236.58</b>	<b>530,047.28</b>

\*) APBD Rencana

## B2: Belanja Berdasarkan Urusan Wajib (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Urusan Pendidikan	118,636.55	153,295.49	183,712.35	193,508.70	227,970.39	246,442.30
Urusan Kesehatan	28,791.92	29,158.13	33,428.27	32,856.51	49,980.76	40,406.22
Urusan Pekerjaan Umum	27,476.14	34,947.23	30,304.34	40,227.98	58,831.27	44,701.25
Urusan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-
Urusan Penataan Ruang	-	-	39.39	-	788.93	-
Urusan Perencanaan Pembangunan	5,927.73	5,224.69	4,261.87	4,568.72	5,545.08	8,921.23
Urusan Perhubungan	3,179.94	2,781.55	5,712.53	4,969.48	4,970.63	5,927.14
Urusan Lingkungan Hidup	1,607.62	-	3,183.75	1,739.96	2,039.97	2,390.95
Urusan pertanahan	-	-	-	-	-	-
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	538.33	-	173.08	1,940.12	2,318.45	3,563.48
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38.31	-	2,948.46	3,835.63	4,149.66	4,483.03
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2,258.65	3,109.31	701.78	57.43	-	-
Urusan Sosial	1,256.63	1,211.40	2,678.74	2,975.85	3,320.53	3,575.99
Urusan Ketenagakerjaan	1,104.11	-	15.77	49.18	-	-
Urusan Koperasi dan UKM	1,851.39	1,929.30	3,343.97	3,075.28	4,970.44	5,475.41

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Urusan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
Urusan Kebudayaan	-	-	1,492.43	1,794.32	2,252.69	2,451.56
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	43.69	-	-	1,212.98	-	-
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	6,658.27	5,837.64	7,183.07	7,382.07	8,235.42	4,675.28
Urusan Pemerintahan Umum	100,835.84	112,626.17	109,442.26	116,218.69	115,595.61	132,535.07
Urusan Kepegawaian	5,754.20	5,290.47	-	4,895.26	-	-
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,216.19	6,082.79	6,691.72	7,066.94	7,938.36	8,302.44
Urusan Statistik	-	-	-	-	-	-
Urusan Kearsipan	961.06	898.92	1,006.99	214.42	1,134.71	1,315.39
Urusan Komunikasi dan Informatika	1,049.18	1,053.24	118.50	119.37	-	-
Perpustakaan	-	-	-	763.42	-	-
Ketahanan Pangan	-	4,852.67	5,047.98	5,817.76	7,083.11	7,708.33
<b>Total</b>	<b>312,185.73</b>	<b>368,299.00</b>	<b>401,487.24</b>	<b>435,290.06</b>	<b>507,126.04</b>	<b>522,875.05</b>

\*) APBD Rencana

### B3: Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Urusan Pertanian	18,628.09	13,095.13	16,143.51	31,760.65	9,292.76	17,358.72
Urusan Kehutanan	3,746.95	3,949.76	4,414.88	6,697.73	5,981.61	7,019.56
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	55.79	1,816.62	288.88	5,513.65	-	-
Urusan Pariwisata	2,046.26	1,721.70	262.02	202.86	-	7,159.25
Urusan Kelautan dan Perikanan	5,800.57	6,711.47	5,630.98	272.13	6,685.04	-
Urusan Perdagangan	115.64	-	730.92	6,098.91	-	-
Urusan Industri	2,064.62	2,861.32	136.07	361.22	-	-
Urusan Ketransmigrasian	109.43	1,112.20	10.00	120.81	-	-
<b>Total</b>	<b>32,567.34</b>	<b>31,268.19</b>	<b>27,617.26</b>	<b>51,027.95</b>	<b>21,959.41</b>	<b>31,537.52</b>

### B4: Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (juta rupiah)

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Belanja tidak langsung	178,385.54	231,028.13	256,265.89	338,472.97	324,758.73	383,329.38
Pegawai	148,473.31	196,384.39	227,837.87	298,699.50	320,225.29	334,330.93
Bunga	7,014.22	-	-	-	-	-
Hibah/subsidi	-	-	1,250.00	13,219.62	-	12,987.80
Bantuan Sosial	7,014.22	23,987.42	14,713.52	13,513.77	-	16,343.30
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-	-
Bantuan ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-	16,771.64
Tidak Terduga	620.06	773.65	805.00	1,309.56	3,076.89	2,895.71
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	15,263.74	9,882.66	11,659.50	11,730.53	1,456.55	-
Belanja langsung	166,367.53	168,539.07	172,838.61	155,711.04	204,326.72	212,959.95
Pegawai	38,424.11	25,034.49	28,361.14	35,487.53	23,125.82	29,311.54
Barang dan Jasa	55,682.18	58,618.98	66,227.80	61,993.67	89,964.65	74,487.75
Modal	72,261.24	84,885.59	78,249.68	58,229.84	91,236.25	109,160.66
<b>Total</b>	<b>344,753.07</b>	<b>399,567.20</b>	<b>429,104.50</b>	<b>494,184.00</b>	<b>529,085.45</b>	<b>596,289.33</b>

\*) APBD Rencana

## Lampiran C: Catatan Metodologi PERA

Laporan studi *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) terbagi atas 6 (enam) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM); Bab III Analisis Pendapatan Daerah; Bab IV Analisis Belanja Daerah; Bab V Analisis Sektor Strategis, Bab VI Analisis Isu Lokal. Setiap bab ditutup dengan sub-bab kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk analisis sektor strategis, masing-masing sektor dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Data yang digunakan untuk analisis studi PERA secara umum dibagi atas dua kategori, yaitu (i) Data Fiskal (Keuangan Daerah), (ii) Data Non-Fiskal. Data Fiskal meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok, APBD Perubahan, dan APBD Realisasi (Pertanggungjawaban Kepala Daerah). Sementara data Non-Fiskal meliputi data makro ekonomi daerah, indikator pembangunan sosial, data kinerja *output* dan *outcome* sektor-sektor strategis (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian), dan data pembangunan gender, serta data dokumen perencanaan.

### Data Fiskal (APBD)

Seluruh data APBD diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah studi PERA pada lima Provinsi di Indonesia (Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Rentang waktu data tahun 2007 hingga 2011 dengan tiga kategori data, yaitu APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Realisasi. Selain itu, data rincian objek PAD diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten.

Data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah seluruhnya dinyatakan dalam angka/nilai riil dengan menggunakan tahun dasar (*base-year*) 2010. Artinya, angka tersebut telah dideflator berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 (2010=100) atau inflasi 2010. Cara ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur perkembangan anggaran secara riil dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2007-2011. Bagi kabupaten studi PERA yang tidak memiliki angka inflasi, ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk menghitung data keuangan secara riil yaitu: (i) menggunakan angka inflasi yang terdekat dengan kabupaten tersebut, (ii) menghitung melalui PDRB deflator.

Data APBD dipergunakan untuk menganalisis 3 bab dalam struktur Laporan PERA yaitu: (i) Bab III Pendapatan daerah yang meliputi gambaran pendapatan pendapatan daerah kabupaten PERA, Struktur pendapatan daerah dan analisis pembiayaan daerah, (II) Bab IV Belanja daerah yang meliputi Gambaran umum perkembangan belanja daerah, belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi, dan belanja daerah berdasarkan sektor, (iii) Bab V Isu Strategis khususnya menganalisis besaran alokasi belanja untuk masing-masing sektor-sektor strategis.

Analisis belanja untuk sektor strategis meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Data belanja sektor infrastruktur merupakan penggabungan atau penjumlahan belanja urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, dan urusan perhubungan; Data belanja sektor pendidikan merupakan penjumlahan belanja urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan perpustakaan; Data belanja sektor kesehatan adalah belanja urusan kesehatan; dan data belanja sektor pertanian merupakan penjumlahan dari belanja urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan. Selain itu, beberapa kabupaten menganalisis belanja pembangunan gender yang diproxy dari belanja urusan pemberdayaan perempuan dan urusan buruh migran; dan belanja pada urusan Kesbangpolinmas terkait dengan mitigasi bencana.

Selain data APBD, data APBN juga dianalisis terutama pada bagian belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran dana APBN yang dibelanjakan di masing-masing kabupaten yang menjadi studi PERA, baik berdasarkan organisasi, maupun berdasarkan fungsi.

Khusus untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dianalisis dengan menggunakan hasil survey. Penilaian keuangan daerah mencakup aspek: (1) kerangka peraturan perundang-undangan; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) pengawasan internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit dan pengawasan eksternal. Kesembilan aspek tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam tiga (3) bidang strategis, yakni: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan anggaran; dan (3) *oversight* dan akuntabilitas. Setiap bidang terdiri atas beberapa sub-bidang strategis dan setiap sub-bidang strategis terdiri atas beberapa pertanyaan (indikator penilaian).

Bidang Strategis	Sub-Bidang Strategis	Indikator
Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tersedia perencanaan dan penganggaran multi tahun, RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD?</li> <li>Apakah target anggaran disusun realistis?</li> <li>Apakah terdapat sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif?</li> </ul>
	TAPD dan Tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah setiap elemen dalam TAPD menjalankan tupoksinya?</li> <li>Apakah terdapat evaluasi terhadap tupoksi?</li> <li>Bagaimana kapasitas perencanaan dan penganggaran di SKPD?</li> <li>Apakah koordinasi antar unit kerja sudah efektif?</li> </ul>
	Pembahasan APBD di DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana proses pembahasan?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pembahasan APBD-APBD P?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pengesahan APBD-APBDP?</li> <li>Apakah target anggaran disusun secara realistis?</li> <li>Permasalahan apa yang ditemukan?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama APBD, dapat diakses oleh publik?</li> <li>Apakah disusun anggaran kas sebagai mekanisme pengendalian dan pengukuran kinerja?</li> <li>Apakah ada MIS yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan MIS lain?</li> <li>Apakah ada konsistensi antara RPJMD- RKPd dan RKPd-APBD?</li> </ul>
Pelaksanaan Anggaran	Institusi PKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah sudah terbentuk SKPD Pengelola Keuangan dan aset daerah?</li> <li>Bagaimana struktur institusi PKD?</li> <li>Apakah terdapat kerangka transparansi dan keterlibatan publik</li> </ul>
	Kondisi SDM Pengelola Keuangan Daerah (PKD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana kondisi SDM PKD, baik di SKPKD dan SKPD?</li> <li>Apakah SDM PKD telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis secara terencana dan memadai?</li> </ul>
	Kerangka Regulasi PKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah kerangka regulasi daerah untuk PKD sudah tersedia?</li> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk pengelolaan kas yang efisien dan efektif?</li> </ul>
	Optimalisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat sistem penagihan dan pemungutan PAD yang efisien?</li> <li>Apakah PAD sudah dikumpulkan secara optimal berdasarkan potensi daerah?</li> <li>Bagaimana dengan penerapan UU 28/ 2009?</li> </ul>
	E-Procurement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terbentuk dan berfungsi?</li> </ul>
	Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada SIM yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan SIM lain?</li> <li>Bagaimana pencatatan sebuah aset dan cara menilai aset?</li> <li>Apakah transaksi keuangan pemerintah tercatat secara akurat dan disajikan tepat waktu?</li> <li>Apakah laporan keuangan dan informasi manajemen dapat diandalkan?</li> </ul>
Oversight dan Accountability	Struktur dan Kondisi SDM Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana struktur dan kondisi SDM Inspektorat?</li> </ul>
	Standar dan proses audit internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Inspektorat mempunyai SOP dan bisa menjalankan tugasnya secara efektif?</li> <li>Apakah Standar dan proses audit internal dapat diaplikasikan dengan baik?</li> <li>Apakah program audit secara reguler dikaji dan direvisi?</li> <li>Apakah ada temuan signifikan dari internal audit?</li> </ul>
	Audit Eksternal dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apa saja temuan penting pada LHP LKPD beberapa tahun terakhir?</li> <li>Bagaimana tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut?</li> <li>Bagaimana status opini LHP LKPD selama 5 tahun terakhir?</li> </ul>
	Akses Publik atas LKPD dan LHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Publik dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan audit?</li> <li>Apakah LKPD dan LHP LKPD dipublikasikan ke masyarakat?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah?</li> </ul>

Para responden diminta untuk menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Skor dihitung berdasarkan presentase jawaban “Ya”. Jawaban “Ya” diberi score 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”. Untuk menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “Ya” harus didukung oleh kelengkapan dokumen terkait dan atau diperiksa silang dengan responden tambahan. Tidak semua sub-bidang strategis memiliki jumlah indikator yang sama, sehingga berimplikasi terhadap bobot penilaian.

Responden PFM meliputi SKPD seperti Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informasi, Seketaris DPRD, Bagian Akuntansi, Pembukuan dan Verifikasi BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah, dan beberapa lainnya. Bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, APBD, dan dokumen lainnya. Interpretasi hasil analisis PFM dalam studi PERA menggunakan dua metode yaitu metode perbandingan dan metode pengkategorian yang telah dilakukan oleh Word Bank. Metode perbandingan relatif yang dimaksud adalah interpretasi hasil yang didasarkan pada perbandingan relatif dari capaian skor antar sub-bidang strategis dalam setiap bidang strategis.

Metode pengkategorian adalah interpretasi hasil yang mengacu pada standar Bank Dunia dengan pemberian nilai sebagai berikut:

80 – 100	kategori sempurna/dapat diterima sepenuhnya
60 - 79	kategori sangat baik
40 - 59	kategori baik
20 - 39	kategori sedang/cukup
0 - 19	kategori kurang/tidak dapat diterima

Beberapa laporan studi PERA menggunakan metode perbandingan relatif dan beberapa lainnya menggunakan metode yang dikembangkan Bank Dunia.

## Data Non-Fiskal

Data non-fiskal digunakan untuk menganalisis Bab I Pendahuluan terkait dengan gambaran umum perekonomian kabupaten meliputi kinerja makro ekonomi dan pembangunan sosial; Bab V Analisis Sektor Strategis meliputi kinerja *output* dan *outcome* sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; Bab VI Analisis Isu Strategis meliputi isu kemiskinan, isu gender, dan isu lingkungan hidup.

Seluruh data non-fiskal diperoleh dari publikasi BPS seperti Daerah Dalam Angka, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Sosial, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Hasil Sensus Penduduk 2010, dll. Beberapa data teknis-sektoral diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA diperoleh dari Bappeda, dan SKPD terkait dengan sektor strategis.

Seluruh data non-fiskal dianalisis dengan menggunakan model analisis statistik-deskriptif untuk series 2007-2011 kecuali untuk Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dan data isu lokal terutama terkait dengan isu gender.

## Lampiran D

Lampiran 1.1. Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, NTB dan Nasional dalam Kurun Waktu 2006-2010

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bima	4,26	4,56	6,09	6,46	4,54	5,63
Dompu	4,11	4,97	4,11	5,29	4,57	7,98
Lombok Barat	4,91	5,0	5,70	6,34	4,78	5,57
Lombok Utara	N/A	N/A	4,40	5,07	4,03	4,66
NTB	2,77	4,90	2,63	12,11	6,29	-3,9
Nasional	5,50	6,35	6,01	4,63	6,20	6,46

Sumber: BPS, 2007-2012.

Lampiran 1.2. Tabel PDRB Per Kapita Kabupaten, Propinsi dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bima	3.075.710	3.198.671	3.361.255	3.546.441	3.547.066	3.710.522
Dompu	3.754.613	3.863.844	3.969.096	4.096.447	4.254.368	4.547.815
Lombok Barat	2.473.468	2.560.624	2.610.809	2.751.740	2.949.862	3.068.575
Lombok Utara	2.715.607	2.728.579	2.777.487	2.854.330	3.236.536	3.387.240
NTB	3.665.176	3.813.455	3.849.855	4.129.539	4.459.765	4.274.920
Nasional	8.237.717	8.631.408	9.015.742	9.294.168	9.736.695	10.219.310

Sumber: BPS, 2007-2012.

Lampiran 1.3. Perkembangan Nilai Realisasi PMA Kabupaten dan NTB 2006-2011 (dalam USD)

Kabupaten	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bima	2.269.000	0	0	0	0	1.365.000
Dompu	0	0	0	0	0	2.333.000
Lombok Barat	26.852.000	0	3.390.000	0	0	32.036.485
Lombok Utara	46.060.000	100.000	25.000	0	0	88.675.648
NTB	3.019.633.000	1.286.000	6.806.000	0	0	2.859.685.040

Sumber: BKPM NTB, 2012.

Lampiran 1.4. Jumlah Penduduk Kabupaten dan NTB 2006-2011

Kabupaten	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bima	407.716	412.504	416.446	420.207	439.228	443.663
Dompu	206.414	208.867	213.185	217.479	218.973	221.184
Lombok Barat	578.387	588.109	603.223	611.704	599.986	606.044
Lombok Utara	N/A	N/A	213.300	218.073	200.072	202.092
NTB	4.257.306	4.292.491	4.363.756	4.434.012	4.496.855	4.535.073

Sumber: BPS 2012.

Lampiran 1.5. Tabel Pertumbuhan Penduduk Kabupaten dan NTB periode 2006-2011

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bima	4,26	4,56	6,09	6,46	4,54	5,63
Dompu	4,11	4,97	4,11	5,29	4,57	7,98
Lombok Barat	4,91	5,0	5,70	6,34	4,78	5,57
Lombok Utara	N/A	N/A	4,40	5,07	4,03	4,66
NTB	2,77	4,90	2,63	12,11	6,29	-3,9
Nasional	5,50	6,35	6,01	4,63	6,20	6,46

Sumber: BPS, 2007-2012.

Lampiran 1.6. TPAK dan TPT Kabupaten dan NTB periode tahun 2007-2011

Kabupaten/ Provinsi	TPAK (dalam persen)					TPT (dalam persen)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Lombok Utara	N/A	61,11	60,98	69,82	66,91	N/A	3,54	3,44	3,29	4,85
Lombok Barat	70,40	67,71	60,70	61,14	66,08	6,30	5,95	5,45	5,12	4,89
Bima	67,76	66,89	59,12	71,01	66,67	4,99	4,75	2,71	3,14	5,13
Dompu	66,13	67,69	64,08	64,21	67,24	5,22	6,13	6,94	5,31	5,87
NTB	68,96	67,69	68,66	66,63	66,12	6,48	6,13	6,25	5,29	5,33
Nasional	66,99	67,18	67,23	67,72	68,34	9,11	8,39	7,87	7,14	6,54

Sumber: BPS, 2007-2012.

Lampiran 1.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten, NTB, dan Nasional pada periode tahun 2007-2011

Kabupaten	2007	2008	2009	2010	2011	Rerata kenaikan
Bima	63,8	64,39	64,81	65,18	65,74	0,48
Lombok Utara	N/A	57,79	58,40	58,96	60,93	1,05
Lombok Barat	59,3	60,53	61,27	61,71	62,50	0,80
Dompu	64,0	64,40	64,93	65,51	66,70	0,68
NTB	63,71	64,12	64,66	65,20	66,23	0,63
Nasional	70,59	71,17	71,76	72,27	73,00	0,60

Sumber: BPS, 2012.

## Lampiran Sektor Pendidikan

Tabel 5.1.1. Proporsi belanja sektor pendidikan menurut klasifikasi ekonomi, 2009-2011

Kabupaten	2007			2008			2009			2010			2011		
	Pegawai	Barang & Jasa	Modal												
Lombok Barat	81.4	6.1	12.5	85.7	4.8	9.5	87.2	2.0	10.7	90.3	1.5	8.2	86.8	1.6	11.6
Lombok Utara							11.2	66.1	22.7	4.6	14.4	81.0	72.2	15.6	12.3
Dompu	79.6	7.7	12.7	77.7	8.8	13.6	74.9	8.6	16.5	94.0	3.7	2.3	82,6	13,6	3,8
Bima	79.5	3.0	17.5	84.2	2.2	13.5	83.0	4.7	12.3	86.3	3.8	9.9	81.3	8.9	9.8

**Sumber:** Diolah oleh Tim PERAP2KP Unram dari dataset APBD

**Catatan:** Data merupakan angka riil pada harga konstan tahun 2011.

## Lampiran Sektor Kesehatan

Lampiran 5.2.1: Tabel Rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk

Kabupaten	Rasio faskes per 10.000 penduduk					Rasio nakes per 10.000 penduduk				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	2.8	3.7	4.1	4.2	4.2	12.3	12.7	12.8	14.6	15.1
Bima	2.6	3.5	3.7	3.8	3.9	10.1	10.5	10.7	11.6	12.0
Lombok Utara			2.0	2.3	2.4			4.7	4.9	7.1
Lombok Barat	1.5	2.1	2.4	2.4	2.6	6.5	6.9	7.2	7.7	8.3
NTB	1.9	2.4	2.6	2.7	2.9	8.6	8.9	9.8	10.8	11.5

**Sumber:** Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Prov NTB 2007-2011 diolah

**Catatan:** Fasilitas kesehatan: Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes.

Tenaga kesehatan terdiri dari: Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan dan Perawat

Lampiran 5.2.2. Tabel Proporsi perawatan antenatal (K1, K4)

Kabupaten	K1					K4				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	78.0	85.3	97.2	96.6	96.1	82.3	82.8	71.0	90.1	89.0
Bima	95.0	86.6	87.8	90.9	97.6	77.7	70.6	68.4	74.8	88.2
Lombok Utara			80.0	82.3	92.6			71.3	74.2	88.6
Lombok Barat	93.6	92.7	97.3	91.8	96.7	83.3	78.7	86.7	89.8	87.7
N T B	95.5	92.5	94.5	92.6	98.3	83.7	80.5	77.5	84.3	87.1

Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011 diolah

Lampiran 5.2.3. Tabel Proporsi penolong persalinan oleh tenaga kesehatan

Kabupaten	Persalinan dibantu tenaga kesehatan (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	72.4	82.8	71.0	87.1	89.0
Bima	74.4	70.6	78.4	82.8	88.2
Lombok Utara			69.3	81.2	87.1
Lombok Barat		76.7	78.7	86.7	89.8
N T B		79.8	80.5	77.5	84.3

Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011 diolah

Lampiran 5.2.4. Tabel Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah

Kabupaten	Proporsi BBLR (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	3.5	2.3	1.7	1.5	1.6
Bima	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7
Lombok Barat	4.2	4.8	4.0	4.5	3.9
Lombok Utara			4.9	3.7	3.7
N T B	3.0	3.0	2.7	4.1	4.1

Sumber: Data statistik/profil kesehatan, Dinas Kesehatan 2007-2011

Lampiran 5.2.5. Tabel Angka Harapan Hidup, 2007-2011

Provinsi/ kabupaten/kota	Angka Harapan Hidup (tahun)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dompu	60.70	60.83	60.94	61.05	61.16
Bima	62.01	62.31	62.62	62.93	63.24
Lombok Barat	59.54	59.97	60.40	60.84	61.28
Lombok Utara	-	59.80	60.18	60.56	60.94
N T B	61.20	61.50	61.80	62.11	62.41

Sumber: BPS, NTB 2012

**Lampiran: Sektor Infrastruktur**

Lampiran 5.3.1: Proporsi akses Rumah Tangga terhadap Infrastruktur Dasar Perumahan di 4 kabupaten wilayah studi, tahun 2007-2011.

Tahun	Bima			Dompu			Lombok Barat			KLU		
	L	AML	SL	L	AML	SL	L	AML	SL	L	AML	SL
2007	83.89	59.85	42.10	78.42	60.17	24.80	88.82	35.41	24.80	-	-	-
2008	88.33	50.53	24.72	77.76	55.76	41.26	89.17	41.45	24.72	-	-	-
2009	89.70	51.71	34.40	83.57	57.92	45.09	89.22	32.37	20.20	-	-	-
2010	94.68	45.79	56.19	90.20	63.58	57.71	90.37	38.35	33.94	71.91	35.66	13.30
2011	90.40	57.80	47.00	86.10	51.10	42.50	87.10	37.80	33.40	82.40	42.00	31.60
Rataan	89.40	53.13	40.88	83.17	57.71	42.27	88.93	37.08	27.41	77.15	38.83	22.45

Sumber: Data Susenas berbagai Tahun.

Keterangan : L = Listrik, AML = Air Minum Layak, SL = Sanitasi Layak

Lampiran 5.3.2: Panjang jalan menurut status jalan di 4 kabupaten wilayah studi, tahun 2007-2011 (Km).

Tahun	Bima			Dompu			Lombok Barat			KLU		
	Kab	Prov	Negara	Kab	Prov	Negara	Kab	Prov	Negara	Kab	Prov	Negara
2007	711.82	320.2	78.7	530.34	216.36	74.13	654.55	232.31	29.6	N/A	N/A	N/A
2008	808.71	320.2	78.7	808.71	320.2	78.7	654.55	232.31	29.6	N/A	N/A	N/A
2009	827.8	320.2	78.7	827.8	320.2	78.7	446.48	134.17	29.6	209,07	94.18	N/A
2010	827.8	320.2	78.7	827.8	320.2	78.7	446.48	134.17	29.6	209,07	94.18	N/A
2011	827.8	320.2	78.7	827.8	320.2	78.7	446.48	134.17	29.6	209,07	94.18	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum pada 4 kabupaten di Provinsi NTB diolah

Lampiran 5.3.3: Kualitas jalan berdasarkan tingkat kemantapan jalan di 4 kabupaten wilayah studi, tahun 2007-2011 (persen).

Tahun	Bima			Dompu			Lombok Barat			KLU		
	M	TM	K	M	TM	K	M	TM	K	M	TM	K
2007	35.55	15.78	38.67	42.07	25.4	32.53	56.89	19.95	23.16	-	-	-
2008	54.94	14.33	30.73	44.78	19.43	35.79	75.9	10.56	13.54	-	-	-
2009	45.48	18.91	35.61	48.75	17.6	33.65	61.07	12.81	26.12	-	-	-
2010	43.39	18.67	37.94	47.84	15.97	36.19	66.95	11.02	22.03	43.14	11.67	45.19
2011	45.41	16.91	37.68	48.73	15.49	35.78	73.55	9.17	17.28	61.52	21.74	16.74
Rataan	44.95	16.92	36.13	46.43	8.78	34.79	65.2	12.7	20.43	73.19	11.16	15.65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum pada 4 kabupaten di Provinsi NTB diolah  
Keterangan : M = Jalan Mantap, TM = Jalan Tidak Mantap, K = Jalan Kritis

Lampiran 5.3.4: Indeks Aksesibilitas dan Indeks Mobilitas Jalan di 4 kabupaten wilayah studi Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Indeks Aksesibilitas	SPM	Indeks Mobilitas	SPM
Bima	0.28	0.15	2.69	2.00
Dompu	0.36	0.05	3.77	2.00
Lombok Barat	0.58	0.50	5.50	2.00
Lombok Utara	0.37	0.15	1.50	2.00
Nusa Tenggara Barat	0.11	0.15	0.53	2.00

Keterangan: Indeks Aksesibilitas Jalan = Panjang jalan/Luas wilayah (km/km<sup>2</sup>); Indeks Mobilitas Jalan = Panjang jalan/1000 penduduk (km/1000 penduduk); dan Standar Pelayanan Minimum Berdasarkan SK Menteri Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001

## Lampiran: Isu Kemiskinan

Tabel 6.1.1 Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Dompu Tahun 2010 (dlm jutaan rupiah)

ALOKASI	APBN	APBD I	APBD II
Ketenagakerjaan	34.648,66	0	8.879,40
Kesehatan	25.017,25	910,00	12.514,03
Pendidikan	21.499,43	2.737,80	79.189,82
Infrastruktur	11.250,00	0	22.980,91
Ketahanan Pangan	40.300,50	20.245,78	14.700,60
TOTAL	132.715,84	23.893,58	138.264,76
PROPORSI (%)	45,01	8,10	46,89

## Lampiran: Isu Gender

Lampiran 6.2.1. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten, NTB, dan Nasional pada periode tahun 2007-2011

Kab/Prop	2007	2008	2009	2010	2011
DOMPU	59.3	59.38	59.75	60.16	60.78
BIMA	51.3	51.45	52.16	53.21	53.58
LOBAR	50.9	51.54	52.57	53.23	54.34
KLU	-	49.14	-	46.86	47.84
NTB	55.5	55.6	55.72	56.02	56.70
Nasional	65.3	66.38	66.77	67.2	67.8

Lampiran 6.2.2. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten, NTB, dan Nasional pada periode tahun 2007-2011

Kab/Prop	2007	2008	2009	2010	2011
DOMPU	53.7	52.78	53.94	58.38	60.94
BIMA	47.1	47.52	48.54	42.72	43.00
LOBAR	47.2	47.74	48.16	44.01	43.06
KLU	-	43.98	44.44	39.17	41.87
NTB	54.9	55.32	55.44	54.49	56.57
Nasional	61.8	62.27	63.52	68.15	69.14

Lampiran 6.2.3. Jumlah buruh migran kabupaten dan propinsi NTB pada periode 2007-2011

Kabupaten	2007		2008		2009		2010		2011	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Dompu	93	369	788	1,355	43	1,208	75	1,836	59	1,448
Lombok Barat	4,432	1,238	5050	1,446	4,221	1,415	5,412	818	6,904	790
Lombok Utara	-	-	-	-	136	452	597	477	869	506
Bima	479	576	348	1,097	259	1,168	421	1,701	480	1,686
NTB	24,791	18,135	21,393	28,491	32,903	20,828	37,405	18,745	44,088	14,142

Lampiran 6.2.4. Remitansi buruh migran kabupaten dan propinsi NTB pada periode tahun 2008-2011

Kabupaten/ Propinsi	2008	2009	2010	2011
Dompu	2,415,007,080	2,224,340,751	3,654,090,893	86,045,232,043
Mataram/LOBAR	289,509,814,203	394,589,040,589	284,817,235,142	263,682,964,492
Loteng	10,250,556,483	10,876,627,657	11,241,436,596	5,064,679,462
Lotim	2,636,733,077	4,997,386,550	7,460,214,886	2,468,228,007
Sumbawa	181,499,366,392	160,791,538,993	170,995,986,352	148,531,452,407
Bima	46,804,380,696	71,867,072,919	60,015,839,131	446,640,133
NTB	533,115,857,931	645,346,007,459	538,184,803,000	506,239,196,544

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dalam BPS NTB 2012